



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-06/Renja-Kalsel/09/2022

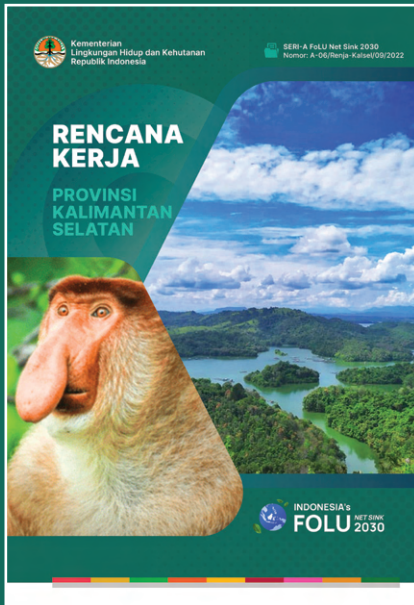
RENCANA KERJA

PROVINSI
KALIMANTAN
SELATAN



INDONESIA's
FOLU NET SINK
2030





RENCANA KERJA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Keterangan Gambar Sampul:

1. Bukit Matang Kaladan
2. Bekantan

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat

ISBN:

xxx - xxxx - xxx - xx

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, Sahbirin Noor.

REVIEWERS:

Bambang Supriyanto, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto, Roy Rizali Anwar.

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Jo Kumala Dewi, Naresworo, MK. Kissinger, Ahmad Jauhari.

CONTRIBUTORS OF MOEF:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R Karliansyah, Emma Rachmawaty, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Moech Firman Fahada Kepala BPKH Wil. V Banjarbaru, Kepala Balai KSDA Kalsel, Kepala Balai PPI dan Karhutla Wil. Kalimantan, Kepala Balai PSKL Wil. Kalimantan, Kepala Balai PHP Wil. IX Banjarbaru, Kepala Balai DASHL Barito, Kepala Balai Gakkum Wil. Kalimantan, Kepala BSLHK Banjarbaru, Kepala Seksi Wil. I Balai Gakkum Wil. Kalimantan, Koordinator Manggala Agni Balai PPI Wil. Kalimantan, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan BPKH Wil. V Banjarbaru, Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Usaha Perhutanan Sosial BPSKL Wil. Kalimantan, Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan BPSKL Wil. Kalimantan, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wil. IX Banjarbaru, Kepala Seksi RHL BPDASHL Barito, Kepala Seksi Program BPDASHL Barito, Kepala Seksi Wil. II Banjarbaru Balai KSDA Kalsel, Kepala

CONTRIBUTORS OF PROVINCE KALIMANTAN SELATAN:

Fathimatuzzahra (Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalsel), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalsel, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalsel, Kepala Dinas PUPR Prov. Kalsel, Kepala Bappeda Prov. Kalsel, Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Tata Hutan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Bidang Perlindungan KSDAE Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Kebakaran Hutan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dishut Prov. Kalsel, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Perbenihan dan Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran dan PNPB Dishut Prov. Kalsel, Kepala Bidang PDASRHL Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi RHL Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi PDAS Dishut Prov. Kalsel, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH Dinas LH Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pemeliharaan LH Dinas LH Prov. Kalsel, Kepala Seksi Konservasi Dishut Prov. Kalsel, Kepala Tahura Sultan Adam, Kepala Subbag TU Tahura Sultan Adam, Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tahura Sultan Adam, Kepala Seksi Penyuluhan Dishut Prov. Kalsel, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Dinas LH Prov. Kalsel, Kemitraan Pengelolaan Gambut Dinas LH Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pemulihan LH Dinas LH Prov. Kalsel, Kepala Seksi Pemantauan LH Dinas LH Prov. Kalsel, Kepala KPH Tabalong, Kepala KPH Balangan, Kepala KPH Hulu Sungai, Kepala KPH Kayu Tangi, Kepala KPH Tanah Laut, Kepala KPH Kusan, Kepala KPH Cantung, Kepala KPH Pulau Laut Sebuku, Kepala KPH Sengayam.

FACILITATORS:

Nuriela Komalasari, Efsa Caesariantika, Hasnawati Hamzah, Romilla Sari, Agung Bayu Nalendro, Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko, Claudia Meitriwane SilalahiLa Ode Bahtiar, Ahyar, Rohmatus, Rizki Puji Lestari, M. Riza Rifani, Kristian Dianina, Tyas Ajeng, Ahyar Gunawan, Yunita Fajarini, Ahmad Jazuli, Ramdhan Hadi, Noliando Ananda, Hendri.

Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan menegaskan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di *first NDC* dan *updated NDC* meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. *Enhanced NDC* ini adalah transisi menuju *Second NDC* yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050* dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita.

Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah diatur secara detail program



dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung *Net Zero Emission*, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Selatan.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc

Kata Pengantar



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saat ini kita merasakan perubahan iklim di berbagai belahan dunia, Hampir tidak ada tempat di bumi ini yang bebas dari perubahan iklim, termasuk di bumi Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Cuaca yang tidak menentu adalah bukti nyata dari perubahan iklim yang kita rasakan. Bahkan, perubahan musim hujan dan kemarau sudah tidak menentu lagi sekarang ini, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam dua tahun belakangan ini.

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait pengamanan isu perubahan iklim sudah dilakukan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Kuatnya komitmen ini kemudian diejawantahkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Netsink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim. Urusan penanganan isu perubahan iklim pada inisiasi "Indonesia's FOLU Netsink 2030" ini merupakan penancangan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya dalam pengurangan gas rumah kaca dengan Program Revolusi Hijau yang dicanangkan tahun 2017 yang dikuatkan dengan Perda Gerakan Revolusi Hijau No. 7 Tahun 2018 serta aktif melaksanakan penghijauan kembali lahan-lahan kritis. Program ini merupakan gerakan masif dari seluruh lembaga dan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman pohon

Alhamdulillah, Gerakan Revolusi Hijau ini membuahkan hasil yang sangat mengembirakan. Melalui program revolusi hijau, hingga tahun 2022 ini telah dilaksanakan penanaman ratusan hektar di dalam dan di luar kawasan hutan. Selain itu berbagai upaya strategis terus dilakukan dalam rangka pengelolaan lahan terganggu, termasuk lahan gambut yang rawan terbakar pada musim kemarau. Penanganan dini kebakaran hutan yang terus dilakukan telah berkontribusi besar dalam pengurangan polusi karbon yang berperan besar dalam pemanasan global.

Sinergis dengan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, tentunya kita harus menyambut baik dengan selesainya penyusunan Dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Netsink 2030

Provinsi Kalimantan Selatan ini yang mencakup lima aksi mitigasi utama pada sektor FOLU yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2023 – 2030 yaitu : 1.) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. 2) Pembangunan Hutan Tanaman : Penanaman di PBPH-HT dan PBPH-HA, 3) Sustainable Forest Management, 4) Rehabilitasi Hutan, dan 5) Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon. Akhir kata, saya mewakili seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan berharap bahwa segala upaya dalam mitigasi perubahan iklim akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bencana alam di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banjarbaru, November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ /KUM/2022

TENTANG

INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030
(PENYERAPAN BERSIH SEKTOR HUTAN INDONESIA DAN PENGGUNAAN LAHAN
LAINNYA PADA TAHUN 2030) SUB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dilakukan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim);
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional atau *Nationality Determined Contribution*, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memberikan kontribusi sebesar 17% (tujuh belas persen) dari 29% (dua puluh sembilan persen) target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario *Counter Measures 1* atau 24% (dua puluh empat persen) dari 41% (empat puluh satu persen) target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario *Counter Measures 2*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpanan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030),
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undnag-Undnag Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang0Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5501) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Laban Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

- KEDUA : Kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Laban Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk pengendalian perubahan iklim dengan pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)*, berpijak pada prinsip dasar *Sustainable Forest Management, Environment-Governance dan Carbon Governance*.
- KETIGA : Kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Laban Lainnya pada Tahun 2030) Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dirnaksud dalam Diktum KESATU dengan upaya pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)* mengacu kepada *Road Map Nationally Determined Contribution (NDC)* Mitigasi, dan *Long Term Strategy on low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* 2050.
- KEEMPAT : Kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan pencapaian *Nationallty Determined Contribution (NDC)* sebagaimana dimaksud dalam dokumen buku Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2021-2030* dilengkapi data spasial peta-peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan pencapaian *Nationallty Determined Contribution (NDC)* sebagaimana dimaksud dalam dokumen buku Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2021-2030* dilengkapi data spasial peta-peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dengan pencapaian *Nationallty Determined Contribution (NDC)* sebagaimana dimaksud dalam dokumen buku Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2021-2030* dilengkapi data spasial peta-peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETUJUH : Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dtlaksanakan koordinasi Tim Kerja Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk sebagaimana Struktur dan Komposisi, Pembagian Tugas Kerja dan Susunan Personil pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN : Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dtlaksanakan koordinasi Tim Kerja Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk sebagaimana Struktur dan Komposisi, Pembagian Tugas Kerja dan Susunan Personil pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- a. melaksanakan penyusunan seluruh program dan rencana kerja tahunan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kerjasama pihak lain, Corporate Social Responsibility (CSR), dan lain-lain yang relevan untuk sasaran Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. melakukan penyusunan rencana pembinaan dan supervisi kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan mitra kerja, menurut program kerja dan kebutuhan dalam rangkaian kerja Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. menyiapkan laporan hasil penyusunan rencana kerja sesuai sasaran Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Lahan Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk mendapatkan penilaian dan analisis, assessment/verifikasi akhir Nilai Ekonomi Karbon tiap-tiap sasaran kerja menurut metode dan teknik yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. National Focal Point Indonesia untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); dan
 - d. membangun interaksi kerjasama dan menyiapkan informasi pelaksanaan kegiatan, untuk dan dalam rangka komunikasi public, serta menerima umpan balik (feed back) untuk penyempurnaan kebijakan dan program-program lebih lanjut.

- KESEMBILAN : Resultante seluruh hasil kerja dalam bentuk unit hasil dan dalam bentuk notasi emisi gas rumah kaca serta assessment NRK dirangkum dalam laporan regular paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menjadi hasil akhir dan performa penurunan emisi gas rumah kaca dari *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (Penyerapan Bersih Sektor Hutan Indonesia dan Penggunaan Laban Lainnya pada Tahun 2030) Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dibantu tenaga ahli dan membentuk Tim Pendukung serta mengundang narasumber sesuai kebutuhan.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan/atau sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Seluruh keanggotaan Tim Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN
NOMOR 188.44/ /KUM/2022 TENTANG
*INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE
NET SINK 2030* (PENYERAPAN BERSIH SEKTOR
HUTAN INDONESIA DAN PENGGUNAAN LAHAN
LAINNYA PADA TAHUN 2030) SUB NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PEMBAGIAN TUGAS TIM KERJA *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE
(FOLU) NET SINK 2030* SUB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. PENANGGUNG JAWAB

Mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksana dan hasil kerja.

1. TIM PENGARAH Mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan kerja pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. Memberikan arahan kebijakan, penyelesaian masalah, dan pengembangan kebijakan serta inovasi baru.
2. KETUA PELAKSANA, KETUA HARIAN PELAKSANA DAN KETUA BIDANG PELAKSANAAN
 - a. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:

Mengoordinasikan keseluruhan kegiatan dengan dibantu dalam koordinasi keseharian oleh ketua pelaksana harian atau Ketua Bidang dalam pelaksanaan kerja semua agenda *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*;
 - b. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
 - 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan rencana operasional pelaksanaan *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2) Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Tugas Tim Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU)* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3) Membuat laporan kepada Penanggung Jawab;
 - 4) Ketua Pelaksana Harian 1 mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas penyusunan rencana kerja Bidang II tentang Peningkatan Cadangan Karbon dan Bidang III tentang Konservasi; dan.
 - 5) Ketua Pelaksana Harian 2 mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas penyusunan rencana kerja Bidang I tentang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang IV tentang pengelolaan Ekosistem Gambut.
 - c. Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas:
 - 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan hutan lestari meliputi penerapan teknik *reduced impact logging*, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan

perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan social multi usaha, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan

- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.

d. Ketua Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon mempunyai tugas:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional peningkatan cadangan karbon, karbon dengan kegiatan utama meliputi penanaman hutan tanaman lahan mineral, penanaman hutan tanaman lahan gambut, serta pengayaan dan rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman mangrove, restorasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; dan
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab

e. Ketua Bidang III Konservasi mempunyai tugas:

- 1) Mengoordinir penyusunan rencana operasional peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan kegiatan utama meliputi perlindungan , pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan , pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, *high conservation value forest* dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi , pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan kebun raya; dan
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.

f. Ketua Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut mempunyai tugas :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional pengelolaan ekosistem gambut dengan kegiatan utama meliputi pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi, vegetasi , pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian erusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana; dan
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab.

3. KETUA-KETUA KELOMPOK KERJA DALAM BIDANG:

a. Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai 3 (tiga) Kelompok Kerja yang terdiri dari:

- 1) Kelompok Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan; dan
 - b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
- 2) Kelompok Kerja Perhutanan Sosial mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional perhutanan sosial; dan
 - b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
- 3) Kelompok Kerja Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi mempunyai tugas :
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional penerapan teknik *reduced impact logging*, dan penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan

- b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang
- b. Ketua Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon mempunyai 3 (tiga) Kelompok Kerja yang terdiri dari:
- 1) Kelompok Kerja RHL mempunyai tugas :
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan kerjasama. masyarakat; dan
 - c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - 2) Kelompok Kerja Mangrove mempunyai tugas :
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional mangrove;
 - b) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang mangrove; dan
 - c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - 3) Kelompok Kerja Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian mempunyai tugas :
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional penanaman hutan lahan mineral, replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparia;
 - b) Mengembangkan inovasi kebijakan pola KPBU dan kerjasama masyarakat untuk replikasi ekosistem, RTH dan ekoriparian; dan
 - c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Bidang.
- c. Ketua Bidang III Konvensional mempunyai 4 (empat) Kelompok Kerja yang terdiri dari:
- 1) Kelompok Kerja Kawasan dan Peningkatan Populasi spesies mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana kerja operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species; dan
 - b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Bidang;
 - 2) Kelompok Kerja *High Conservation Value Forest* dan kelola fragmentasi habitat mempunyai tugas;
 - a) Membantu penyusunan rencana operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, *High Conservation Value Forest* dan melakukan penataan, tata kelola habitat yang terfragmentasi dan pemulihannya; dan
 - b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua bidang.
 - 3) Kelompok Kerja Intensifikasi jasa lingkungan, Tahura dan kebun raya mempunyai tugas;
 - a) Membantu penyusunan rencana operasional intensifikasi jasa lingkungan, pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan kebun raya;
 - b) Mendorong dan memfasilitasi RTH, Tahura dan Kebun Raya dengan dukungan KPBU dan kerjasama masyarakat; dan
 - c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
 - 4) Kelompok Kerja Kemitraan Konservasi mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana operasional kemitraan konservasi;
 - b) Mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak;
 - c) Menyiapkan dan fasilitasi langkah kemitraan masyarakat;
 - d) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.

d. Ketua Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut mempunyai 2 (dua) Kelompok Kerja yang terdiri dari:

- 1) Kelompok Kerja Kemitraan Kelola Gambut mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana operasional pengembangan program desa mandiri peduli gambut, pengendalian perizinan di areal gambut, pembangunan infrastruktur pembasahan kawasan gambut serta pengendalian, pengawasan tata laksana dan kelola gambut; dan
 - b) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
- 2). Kelompok Kerja Rewetting dan Sarana mempunyai tugas:
 - a) Membantu penyusunan rencana operasional pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, penyiapan dan dukungan sarana; dan
 - b) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/ /KUM/2022 TENTANG
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE
NET SINK 2030 (PENYERAPAN BERSIH SEKTOR
HUTAN INDONESIA DAN PENGGUNAAN LAHAN
LAINNYA PADA TAHUN 2030) SUB NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

PEMBAGIAN TUGAS TIM KERJA INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030 SUB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A	PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
B	TIM PENGARAH	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
		:	
C	PELAKSANA	:	
	Ketua	:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua I Urusan Lahan Gambut	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua II Urusan Mangrove	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua III Urusan Lahan Perkebunan	:	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua IV Urusan Lahan Pertanian	:	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua V Urusan Tata Ruang	:	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua VI Urusan Perencanaan Daerah	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
		:	
	Ketua Harian I	:	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru
	Ketua Harian II	:	Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

	Sekretaris I	:	Kepala Seksi Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru
	Sekretaris II	:	Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	
D	ANGGOTA	:	
1.	BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI		
		:	
	Ketua Bidang	:	Kepala Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru
	Kelompok Kerja I	:	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan
	Ketua	:	Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Baji Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru
		:	Kepala Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Koordinator Manggala Agni Kalimantan Selatan Baji Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan
		:	Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja II	:	Pengelolaan Perhutanan Sosial
	Ketua	:	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
		:	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Usaha Perhutanan Sosial Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
		:	Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja III	:	Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi
	Ketua	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

		:	Kepala Seksi Perbenihan dan Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
		:	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan produksi Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru
2	BIDANG PENINGKATAN CADANGAN KARBON		
	Ketua Bidang	:	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito
		:	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito
	Kelompok Kerja I	:	RHL
	Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Lahan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito
		:	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja II	:	Mangrove
	Ketua	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito

	Kelompok Kerja III	:	Replikasi Ekosistem Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian
	Ketua	:	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
		:	Kepala Seksi Evaluasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito
		:	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
3	BIDANG KONSERVASI		
	Ketua Bidang	:	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja I	:	High Conservastion
	Ketua	:	Kepala Seksi Wilayah II Banjarbaru Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja II	:	Intensifikasi Jasa Lingkungan Tahura
	Ketua	:	Kepala Taman Hutan Raya Sultan Adam
			Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tahura Sultan Adam
	Kelompok Kerja III	:	Kemitraan Konservasi
	Ketua	:	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tahura Sultan Adam
			Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
4	BIDANG PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT		
	Ketua Bidang	:	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
	Kelompok Kerja I	:	Kemitraan Pengelolaan Gambut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
	Ketua	:	Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

	Kelompok Kerja II	:	Rewetting
	Ketua	:	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
	TIM PENDUKUNG TEKNIS		Kepala KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
			Rizki Puji Lestari, S.Hut.
			M. Riza Rifani, S.Hut.
			Kristian Dianina, S.Hut.
			Tyas Ajeng, S.Hut.
			Ahyar Gunawan, S.Hut., M.Sc.
			Yunita Fajarini, S.Hut.
			Ahmad Jazuli, S.Hut.
			Ramdhan Hadi, S.Hut. M.Hut.
			Nolianto Ananda, S.Si
			Hendri, S.Hut.

GUBERNUR KALIMANTAN



Daftar Isi

Kata Pengantar	3
---------------------------------	----------

Daftar Isi	21
-----------------------------	-----------

Daftar Tabel	22
-------------------------------	-----------

Daftar Gambar	24
--------------------------------	-----------

Daftar Lampiran	25
----------------------------------	-----------

BAB I. Pendahuluan	20
-------------------------------------	-----------

1.1. Latar Belakang	20
1.2. Tujuan dan Sasaran	32
1.3. Dasar Hukum	33
1.4. Definisi	35

BAB II. Kondisi Umum Dan Kerangka Regulasi Pendukung Folu Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat.	39
--	-----------

2.1. Luas dan Batas Wilayah	39
2.2. Topografi	40
2.3. Kependudukan	42
2.4. Kawasan Hutan	45
2.5. Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan	46
2.6. Indeks Lingkungan Hidup	46
2.7. Bencana Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan	46
2.8. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	50

BAB III. Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Selatan	53
---	-----------

3.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari	62
3.2. Strategi Konservasi	143
3.3. Strategi Pengelolaan Gambut dan	

Mangrove	155
3.4. Strategi Pengelolaan Mitigasi FOLU Net-Sink pada Kawasan Non Hutan	156
3.5. Strategi Instrumen dan Informasi	176

BAB IV. Pendanaan	179
------------------------------------	------------

BAB V. Monitoring Dan Evaluasi.	184
--	------------

BAB VI. Penutup	188
----------------------------------	------------

Daftar Pustaka.	189
----------------------------------	------------

Lampiran.	190
----------------------------	------------

Daftar Tabel

TABEL 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
TABEL 2.	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng
TABEL 3.	Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan
TABEL 4.	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan menurut Jenis Kelamin
TABEL 5.	Statistik Luas deforestasi tahun 2013-2020 di Provinsi Kalimantan Selatan
TABEL 6.	Jumlah kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan
TABEL 7.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
TABEL 8.	Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Kalimantan Selatan
TABEL 9.	Arahan Indeks Prioritas Lokasi sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan
TABEL 10.	Arahan Indeks Jasa Lingkungan sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan
TABEL 11.	Arahan Indeks Kelembagaan sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan
TABEL 12.	Sebaran lokasi aksi mitigasi tiap Rencana Aksi Mitigasi (RO) berdasarkan status kawasan hutan
TABEL 13.	Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PBPH hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Selatan periode 2023-2030
TABEL 14.	Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PBPH hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Selatan periode 2023-2030
TABEL 15.	Rencana Program Kegiatan, Indikator FOLU Net Sink pada Kawasan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Selatan
TABEL 16.	Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada KPH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030
TABEL 17.	Ringkasan Luas per KPH Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program FOLU Netsink Periode 2023-2030
TABEL 18.	Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada KPH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030
TABEL 19.	Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030
TABEL 20.	Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030

- TABEL 21.** Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030
- TABEL 22.** Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 23.** Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 24.** Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030
- TABEL 25.** Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 26.** Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 27.** Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 28.** Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada kawasan Non-Hutan di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 29.** Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non-Hutan di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 30.** Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non-Hutan di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030
- TABEL 31.** Rencana Pendanaan Program Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2023-2030 di Provinsi Kalimantan Selatan

Daftar Gambar

- GAMBAR 1.** Proyeksi emisi sektor FOLU pada skenario NDC (CM1) dan LTS (LCCP)
- GAMBAR 2.** Tata waktu kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan ekosistem gambut periode 2022-2030
- GAMBAR 3.** Grafik Jumlah kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 4.** Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 5.** Peta Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 6.** Peta Indeks Kelembagaan (IK) Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 7.** Peta Sebaran Rencana Aksi Mitigasi di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 8.** Peta arahan Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2030 pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 9.** Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2030 pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 10.** Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2030 Pada Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Provinsi di Kalimantan Selatan
- GAMBAR 11.** Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2030 Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Selatan
- GAMBAR 12.** Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU NetSink 2030 Pada Areal Konservasi di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 13.** Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi IFNET 2030 Pada Non-Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan

Daftar Lampiran

- GAMBAR 1.** Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1)) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 2** Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut (RO2) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 3** Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Konsesi (RO3)) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 4** Peta Aksi Pembangunan Hutan Tanaman (RO4) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 5** Peta Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO5) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 6** Peta Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C (RO6) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 7** Peta Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7)) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 8** Peta Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Non-Rotasi (RO8) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 9** Peta Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9)) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 10** Peta Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)
- GAMBAR 11** Peta Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 12** Peta Saksi Mitigasi Pengelolaan Gambut (RO12) di Provinsi Kalimantan Selatan
- GAMBAR 13** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait RO1 pencegahan deforestasi lahan mineral
- GAMBAR 14** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait RO2 pencegahan deforestasi lahan gambut
- GAMBAR 15** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada RO3 Pencegahan Deforestasi Konsesi
- GAMBAR 16** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada RO4 Pembangunan Hutan Tanaman
- GAMBAR 17** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada RO5 Pengayaan Hutan Tanaman
- GAMBAR 18** Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada RO6 Penerapan RIL-C
- GAMBAR 19** Kegiatan Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO7)

GAMBAR 20 Output, Target dan Para pihak Terkait pada peningkatan

GAMBAR 21 Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pengelolaan tata air gambut gambut (RO9)

GAMBAR 22 Kegiatan, Output, Target dan Para pihak terkait pelaksanaan restorasi gambut (RO10)

GAMBAR 23 Kegiatan, Output, Target dan Para pihak terkait pelaksanaan perlindungan area konservasi tinggi (RO11)

GAMBAR 24 Kegiatan, Output, Target dan Para pihak dalam pengelolaan mangrove (RO12)

BAB 01



PENDAHULUAN

BAB I | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh aktifitas manusia menyebabkan *global warming* dan perubahan iklim yang dampaknya terasa semakin besar. Dari hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dampak buruk perubahan iklim dapat dihindari dengan menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 2°C. Pada COP21 yang dilaksanakan di Paris tahun 2015 silam, disepakati bahwa untuk menghindari dampak buruk perubahan iklim, tingkat emisi gas rumah kaca harus dikurangi serendah mungkin dan emisi mencapai nol (*net-zero emission/ NZE*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkomitmen untuk mencapai mengurangi emisi dengan target tanpa syarat sebesar 29% dan target bersyarat (dengan dukungan internasional) sebesar 41% dibandingkan dengan tingkat emisi business as usual (BaU) pada tahun 2030. Sejak tahun 2020, Indonesia juga telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), menuju net-zero emission dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi bertumbuh, berketahanan iklim dan berkeadilan. Dokumen LTS-LCCR 2050 merupakan arahan jangka panjang yang akan menjadi pedoman dalam implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC lima-tahunan selanjutnya. Dalam skenario ini, emisi gas rumah kaca akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 sebesar 1.240 juta ton CO₂e kemudian menurun dan terus menurun hingga mencapai 540 juta ton CO₂e pada tahun 2050. Diharapkan net-zero emission (NZE) akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih awal.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan penggunaan lahan lain serta sektor energi akan sangat menentukan arah yang akan dituju pada tahun 2050. Dengan skenario paling ambisius yaitu LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement), secara nasional Indonesia akan berubah menjadi net sink pada tahun 2030. Sektor FOLU diperkirakan akan terus meningkatkan net sink hingga tahun 2050. Sektor ini memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor-sektor yang sulit untuk dikurangi, seperti sektor energi. Dalam LCCP, tingkat kenaikan emisi sektor energi melambat sedangkan dari sektor lahan dan kehutanan (FOLU) yang sebelumnya merupakan net emitor, akan berubah menjadi net sink pada tahun 2030. Sektor FOLU diperkirakan akan terus meningkatkan net sink hingga tahun 2050. Sektor ini memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor-sektor yang sulit untuk dikurangi, seperti sektor energi. Upaya signifikan untuk mengurangi emisi sektor FOLU dan mengubahnya menjadi net-sink pada tahun 2030 (dalam Skenario LCCP) akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya berikut:

- a) mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan memperluas hutan alam lindung, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat di hutan pengelolaan;
- b) meningkatkan kapasitas penyerapan karbon hutan alam dengan mengurangi degradasi dan meningkatkan regenerasi hutan melalui pengayaan atau penerapan hutan lestari

- sistem manajemen;
- c) meningkatkan penyerapan karbon sistem lahan dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang tidak produktif atau rendah lahan karbon untuk pengembangan hutan tanaman, dan tanaman keras lainnya (tanaman industri);
 - d) mengurangi emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut dengan memperbaiki sistem pengelolaan lahan gambut.
 - e) penegakan hukum

Mengingat pentingnya kontribusi sektor FOLU pada upaya pencapaian target ambisiun nasional, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perlu dilakukan pendekatan karbon Net Sink pada sektor FOLU pada tahun 2030, yang kemudian dikenal sebagai program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (IFNET 2030).

FOLU Net Sink 2030 adalah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tipe lahan lainnya, untuk mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi karbon dari hutan dan tipe lahan lainnya pada tahun 2030. Proyeksi target FOLU Net Sink 2030 adalah angka Net Sink 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e. Sebagai bentuk arahan untuk mencapai target tersebut, telah disusun Rencana Operasional (RENOPS) FOLU Net Sink 2030 sebagaimana termuat dalam SK Menteri LHK No.168/2022. Dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030 berisi rencana kegiatan yang terdiri dari 11 rencana aksi mitigasi yang merupakan penjabaran dari 5 aksi mitigasi utama yang tercantum pada NDC dan telah diakselerasi dengan dokumen LTS-LCCR. Lima aksi mitigasi utama tersebut adalah: 1) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2) Pembangunan Hutan Tanaman: Penanaman di PBPH-HT, 3) Sustainable Forest Management, 4) Rehabilitasi Hutan, dan 5) Pengelolaan Lahan Gambut. Sedangkan 11 rencana aksi mitigasi yang merupakan turunan dari 5 aksi mitigasi utama tersebut adalah: 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove. Selain kesebelas rencana aksi mitigasi tersebut, terdapat tambahan aksi mitigasi untuk upaya pengelolaan mangrove.

Dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030 yang telah disusun dapat menjadi acuan arah kebijakan bagi seluruh pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU. Namun pelaksanaan secara efektif pada tingkat tapak, perlu diperjelas lagi rencana aksi mitigasi pada dokumen RENOPS pada tingkat sub-nasional atau provinsi.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tutupan hutan yang masih cukup luas, memiliki peran penting dalam memenuhi target capaian pengurangan emisi nasional. Dengan tutupan hutan ± 1,7 juta hektar di Provinsi Kalimantan Selatan

berpotensi untuk mendukung penyerapan karbon. Selain dari potensi hutannya, Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki kawasan gambut yang menjadi tempat simpanan karbon (carbon sink). Simpanan karbon pada lahan gambut ini terus meningkat seiring penambahan ketebalan gambut yang diperkirakan mencapai 3 mm/tahun (Parish et al., 2008). Namun jika kondisi alami tersebut terganggu, misalnya terdrainase, maka akan terjadi percepatan proses pelapukan (dekomposisi) dan kebakaran hutan dan lahan yang memicu terbentuknya gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO₂.

Mangrove juga diketahui sebagai tipe hutan yang menjadi penyerap dan penyimpan cadangan karbon. Total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, dengan kondisi tutupan tajuk >70% atau kategori mangrove lebat adalah 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70% memiliki luas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30% seluas 54.474 Ha (2%). Mangrove di Kalimantan Selatan. Mangrove kalsel mencapai 84.621,59 ha dengan pembagian hutan mangrove lebat seluas 54.878,50 Ha (64,85%), hutan mangrove sedang seluar 26.263,83 Ha (31,04%) dan hutan mangrove jarang seluas 3.479,26 Ha (4,11%). Berdasarkan perbandingan luas dari tutupan hutan mangrove lebat di Indonesia, maka tindakan rehabilitasi mangrove menjadi salah satu rencana aksi penting dalam upaya peningkatan serapan dan cadangan karbon

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dari 12 Provinsi yang dimandatkan melaksanakan kegiatan FOLU Net Sink hingga 2030, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan segala perangkat yang dimungkinkan untuk mensukseskan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia hingga mencapai -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Dokumen Rencana Kerja IFNET Sub Nasional Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah provinsi untuk turut mensukseskan target ambisius nasional dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Terbangunnya komitmen bersama antar para pihak berkepentingan pada sektor FOLU di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung tercapainya Indonesia's FOLU Net Sink 2030;
2. Tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan adalah mendukung tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017

- tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387).
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 1)
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16)
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 107);

1.4. Definisi

Dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan ini memuat beberapa istilah dengan bahasa asing. Untuk memudahkan memahami maksud dari istilah tersebut, berikut definisi dari berbagai istilah yang digunakan.

1. Nationally Determined Contribution (NDC) adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).
2. LTS-LCCR adalah dokumen yang menyampaikan visi Indonesia dalam skenario yang lebih ambisius (Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target; LCCP) bahwa Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO₂e atau setara 4,23-ton CO₂e per kapita.
3. FOLU atau Forestry and Other Land Use adalah kategori sektor yang merupakan salah satu sumber emisi dan rosot GRK yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NDC.
4. Net zero emission adalah sebuah kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga net emisi bernilai nol.
5. Net Sink adalah sebuah kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK.
6. FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka net sink 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e tersebut.



BAB 02



DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1. Luas dan Batas Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis, tepat di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghadap selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Keanekaragaman hayati yang melimpah, dan posisi yang strategis menjadi daya tarik bagi penduduk asli maupun perantau untuk mengembangkan wilayah ini sejak dulu kala. Setelah kemerdekaan RI, sebagai tindak lanjut ketatanegaraan dan hasrat rakyat di Kalimantan, pada tanggal 14 Agustus 1950 dibentuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur melalui Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi antara $114^{\circ} 17' 36,787''$ – $117^{\circ} 39' 31,467''$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 18' 45.286''$ – $5^{\circ} 8' 37.698''$ Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur
- Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar

Luas wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah sekitar 38.744,23 km² atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia, sedangkan luas kewenangan perairan laut untuk 0 – 12 mil laut sebesar 23.075,72 km². Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota, 154 Kecamatan, 144 Kelurahan dan 2007 Desa. Kabupaten/Kota dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Kotabaru yakni sebesar 24,48% dari total wilayah Kalimantan Selatan dan wilayah terkecil adalah Kota Banjarmasin hanya sebesar 0,19%, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. | Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah		Kecamatan	Kelurahan/Desa		Jumlah
		KM2	%		Desa	Kabupaten	
1	Tanah Laut	3.729,30	9,94	11	130	5	135
2	Kotabaru	9.422,73	25,11	22	198	4	202
3	Banjar	4.710,97	12,55	20	277	13	290
4	Barito Kuala	2.376,22	6,33	17	195	6	201
5	Tapin	2.174,95	5,80	12	126	9	135
6	Hulu Sungai Selatan	1.804,94	4,81	11	144	4	148
7	Hulu Sungai Tengah	1.472,00	3,92	11	161	8	169
8	Hulu Sungai Utara	951,25	2,53	10	214	5	219
9	Tabalong	3.599,95	9,59	12	121	10	131
10	Tanah Bumbu	5.066,96	13,50	10	144	5	149
11	Balangan	1.819,75	4,85	8	153	3	156
12	Banjarmasin	72,67	0,19	5	0	52	52
13	Banjarbaru	328,83	0,88	5	0	20	20
	Kalimantan Selatan	37.530,52	100	154	1.863	144	2007

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2020¹ dan Permendagri No 137 Tahun 2017

2.2. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai dengan kemiringan lahan <2% mencapai 39,89%, kemiringan lahan 2-8% mencapai 26,94

1 Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/publication/2020/04/27/b8ffa26a7fa66b9494c10df2/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2020.html>. Access Time: September 7, 2022, 1:58 am

%, kemiringan lahan 8-15 % mencapai 8 %, kemiringan lahan 15-25 % mencapai 10,09 %, kemiringan lahan 25-40 % mencapai 8,93 % dan untuk kemiringan lahan di atas 40% mencapai 6,16%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah , 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi ini disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2 | Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng

Kabupaten	Kelas Lereng						Jumlah
	0-2%	2-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
Tanah Laut	290.147	2.590	20.470	19.150	7.638	12.890	372.885
Kotabaru	88.453	526.666	55.075	114.236	106.822	51.021	942.273
Banjar	196.282	62.210	52.024	54.060	77.490	25.202	467.268
Barito Kuala	237.622	-	-	-	-	-	237.622
Tapin	180.376	1.340	11.170	14.879	3.840	5.890	217.495
Hulu Sungai Selatan	128.057	6.550	14.187	10.500	8.590	12.610	180.494
Hulu Sungai Tengah	75.281	4.184	6.084	17.465	32.449	11.737	147.200
Hulu Sungai Utara	91.204	3.921	-	-	-	-	95.125
Tabalong	93.727	34.200	58.710	89.018	37.590	46.750	359.995
Tanah Bumbu	65.758	219.87	75.698	53.505	56.734	35.125	506.696
Balangan	9.230	127.764	5.810	5.695	3.506	29.970	181.975
Banjarmasin	7.267	-	-	-	-	-	7.267
Banjarbaru	33.692	1.580	970	120	350	-	36.712
Kalimantan Selatan	1.497.096	1.010.881	300.198	378.628	335.009	231.195	3.753.007

Sumber: BPS Prov Kalsel, 2022²

² Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/publication/2021/02/26/dcf0c95d8cf054b7f498e75c/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2021.html>. Access Time: September 7, 2022, 3:08 am

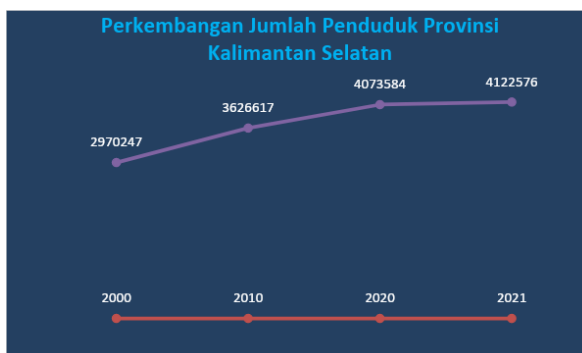
Secara regional bentang alam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar (70%) merupakan daerah dataran rendah hingga dataran bergelombang yang umumnya tersebar di wilayah dataran pantai dan daerah aliran sungai, selebihnya merupakan bentang alam pegunungan dan perbukitan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Provinsi Selatan mempunyai ketinggian di bawah 100 meter dari permukaan laut (dpl). Kemiringan lahan di wilayah Kalimantan Selatan dapat dibedakan :

- Daerah datar (0 - 8 %) meliputi areal seluas ± 915.427 Ha atau 24,39 % dari seluruh luas daratan yang ada tersebar di sepanjang Pantai Timur dan Selatan, sepanjang aliran Sungai Barito dan sungai-sungai lainnya.
- Daerah landai (8 - 15 %) meliputi areal seluas ± 646.250 Ha atau 17,22 % dari seluruh areal yang ada tersebut di daerah antara Pegunungan Meratus dengan Sungai Barito, di bagian Barat dan Pantai Timur sampai Selatan.
- Daerah agak curam (15 - 25 %) meliputi areal seluas $\pm 1.742.472$ Ha ($\pm 46,43\%$) dari seluruh luas daratan yang ada tersebar di sebelah Timur dan Selatan mendekati pegunungan Meratus.
- Daerah curam (25 - 40 %) meliputi areal seluas ± 88.153 Ha (2,35 %).
- Daerah sangat curam (> 40 %) meliputi areal seluas ± 36.075 Ha (9,61%). Daerah ini sebagian besar merupakan pegunungan Meratus dan merupakan hulu dari sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan

2.3. Kependudukan

Berdasarkan data statistik dari BPS, pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2021. Dalam kurun 21 (dua puluh satu) tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 38%. Kenaikan tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh faktor kelahiran dan kematian, namun juga migrasi dari beberapa wilayah lain/ provinsi lain di Indonesia yang juga cukup tinggi. Masuknya penduduk dari wilayah lain di Indonesia ini dikarenakan adanya program transmigrasi, peluang kerja/mata pencaharian dan juga karena adanya perkawinan. Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk pada tiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber : BPS per tanggal 7 Juli 2022³

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 – 2021 (Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa)

TABEL 3. | Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten	2000	2010	2020	2021
Kab. Tanah Laut	229.066	296.333	348.966	354.340
Kab. Kotabaru		290.142	325.622	329.483
Kab. Banjar	535.001	506.839	565.635	572.109
Kab. Barito Kuala	244.547	276.147	313.021	316.963
Kab. Tapin	141.092	167.877	189.475	191.801
Kab. Hulu Sungai Selatan	193.813	212.485	228.006	229.960
Kab. Hulu Sungai Tengah	223.268	243.460	258.721	260.754
Kab. Hulu Sungai Utara	289.167	209.246	226.727	228.831
Kab. Tabalong	170.384	218.620	253.305	256.903
Kab. Tanah Bumbu		267.929	322.646	328.146
Kab. Balangan		112.430	130.355	132.213
Kota Banjarmasin	532.556	625.482	657.663	662.320
Kota Banjarbaru	411.353	199.627	253.442	258.753
Provinsi Kalimantan Selatan	2.970.247	3.626.617	4.073.584	4.122.576

(Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa)

Data: BPS Kalsel dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan⁴

³ Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/publication/2021/02/26/dcf0c95d8cf054b7f498e75c/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2021.html>.

⁴ Source Url: <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/311.html>.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Banjarmasin dengan total penduduk pada tahun 2021 sebanyak 662.320 jiwa. Sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten Balangan dengan total penduduk pada tahun 2021 sebanyak 132.213 jiwa. Penambahan total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2000 sampai dengan 2021 sebesar 1.152.329 jiwa (38%).

Jumlah penduduk menurut wilayah, jenis kelamin dan sex ratio dapat dilihat pada Tabel 3. Sex ratio menunjukkan jumlah laki-laki di antara 100 wanita, berdasarkan data BPS, sex ratio Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah 103%, yang artinya ada 103 laki-laki di antara 100 perempuan. Sex ratio tertinggi pada tahun 2021 berada di Kabupaten Kotabaru (107%), terendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kota Banjarmasin dengan sex ratio sebesar 100%.

TABEL 4. | Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan menurut Jenis Kelamin

Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kalimantan Selatan	2.153.738	2.062.383	2.086.503	2.090.358	2.011.201	2.036.073	4.244.096	4.073.584	4.122.576
Tanah Laut	176.319	179.012	181.706	167.571	169.954	172.634	343.890	348.966	354.340
Kotabaru	177.594	168.324	170.261	164.623	157.298	159.222	342.217	325.622	329.483
Banjar	299.089	285.885	289.057	288.977	279.750	283.052	588.066	565.635	572.109
Barito Kuala	157.433	158.593	160.534	156.162	154.428	156.429	313.595	313.021	316.963
Tapin	96.578	95.810	96.952	94.794	93.665	94.849	191.372	189.475	191.801
Hulu Sungai Selatan	119.027	114.426	115.366	118.675	113.580	114.594	237.702	228.006	229.960
Hulu Sungai Tengah	136.778	130.068	131.045	135.641	128.653	129.709	272.419	258.721	260.754
Hulu Sungai Utara	117.192	113.200	114.211	120.381	113.527	114.620	237.573	226.727	228.831
Tabalong	129.330	128.547	130.327	124.992	124.758	126.576	254.322	253.305	256.903
Tanah Bumbu	187.674	165.642	168.407	172.513	157.004	159.739	360.187	322.646	328.146
Balangan	66.325	65.905	66.821	65.103	64.450	65.392	131.428	130.355	132.213
Kota Banjarmasin	355.412	329.423	331.640	353.19	328.240	330.680	708.606	657.663	662.320
Kota Banjarbaru	134.987	127.548	130.176	127.732	125.894	128.577	262.719	253.442	258.753

Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa) Data: BPS Kalimantan Selatan⁵⁾

5 Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/indicator/12/91/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>. September 6, 2022, 9:11 am

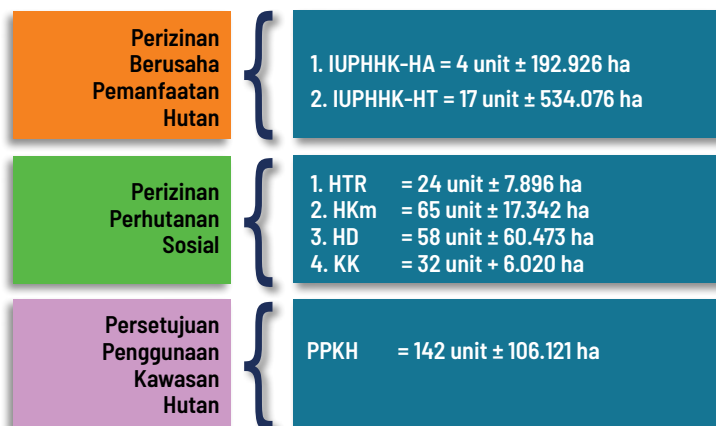
Peningkatan jumlah populasi di Provinsi Kalimantan Selatan mengakibatkan adanya tuntutan terhadap penambahan kebutuhan ruang hidup dan ruang ekonomi. Peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan hingga untuk pembangunan infrastruktur akan berjalan linier dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga tekanan terhadap sumberdaya alam dan hutan juga akan semakin massif.

2.4. Kawasan Hutan

Sumber daya hutan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari produk hasil hutan kayu serta produk hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan hutan-hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Luas Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai SK Menhut No. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan adalah seluas 1.779.982 ha, yang meliputi:

- Hutan Konservasi seluas 213.285 ha
- Hutan Lindung seluas 526.425 ha
- Hutan Produksi Terbatas seluas 126.660 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas 762.188 ha
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi 151.424 ha

Dengan luas total Provinsi Kalimantan Selatan seluas 3.874.423 hektar, sebesar 45% wilayahnya adalah hutan. Masyarakat masih banyak bergantung dari sumber daya hutan, baik kayu maupun non kayu. Terdapat 3 (tiga) skema perizinan di dalam kawasan hutan, yaitu: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dengan jumlah izin beserta luasan tercantum dalam gambar 2 berikut.



Gambar 2. Pemanfaatan Lahan dan Hutan dan perizinan di Kalimantan Selatan

2.5 Deforestasi dan Degradasi Hutan & Lahan

Meningkatnya pertumbuhan penduduk tak ayal mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan. Tuntutan ekonomi menuntut masyarakat untuk membuka hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, juga pembangunan infrastruktur berupa jalan dan sebagainya. Belum lagi aktivitas membuka hutan untuk segala bentuk perizinan di dalam kawasan hutan. Berbagai aktivitas tersebut tentunya berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Data deforestasi hutan dan lahan disajikan dalam tabel 5 berikut.

TABEL 5. | Statistik Luas deforestasi tahun 2013-2020 di Provinsi Kalimantan Selatan

Tren	Deforestasi		Total Deforestasi
	Kawasan Hutan	APL (Areal Penggunaan Lain) / Bukan Kawasan Hutan	
Luas 2013-2014	5191.9	1746.6	6938.5
Luas 2014-2015	34631.5	12072.3	46703.8
Luas 2015-2016	26180.6	6944.6	33125.2
Luas 2016-2017	661.3	-1343.1	-681.8
Luas 2017-2018	5396	8972.6	14368.6
Luas 2018-2019	6309.9	1789.4	8099.3
Luas 2019-2020	5247.8	2299.4	7547.2

Sumber : BPS Prov Kalsel⁶

2.6 Indeks Lingkungan Hidup

Indeks lingkungan Hidup Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan berada pada nilai 61.94. turun dari realisasi tahun 2019 sebesar 68.38. Capaian IKLH ini masih belum mencapai target RPJMD sebesar 64 dan target Perubahan RKPD 2020 sebesar 64. Komponen penilaian IKLH Provinsi Kalsel terdiri dari Indeks Kualitas Udara 88.78; Indeks Kualitas Air 55.31 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 46.78. Capaian IKLH Provinsi Kalsel masih berada di bawah nasional sebesar 66.55 dan berada pada kategori cukup baik ($60 < \text{Nilai IKLH} < 70$)

2.7 Bencana Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kalimantan Selatan. Sedimentasi sungai yang semakin meningkat tiap tahun ditambah dengan sistem resapan air yang buruk memperparah banjir yang terjadi. Jika intensitas hujan besar, berpotensi akan menyebabkan sebagian wilayah tergenang banjir. Kejadian banjir disajikan dalam Tabel 6 berikut.

⁶ Source Url: <https://kalsel.bps.go.id/publication/2021/02/26/dcf0c95d8cf054b7f498e75c/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2021.html>.

Peningkatan terlihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Terlihat dalam Gambar 3 berikut.

TABEL 6. Jumlah kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

Lokasi/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Tanah Laut	4		0	3	2	44	37
Kab. Kotabaru			0	3	2	3	0
Kab. Banjar	2		12	2	0	22	53
Kab. Barito Kuala	1	1	0	0	0	0	7
Kab. Tapin	3	2	4	4	17	11	4
Kab. Hulu Sungai Selatan	1		0	0	3	2	11
Kab. Hulu Sungai Tengah	1		0	0	1	10	21
Kab. Hulu Sungai Utara			3	0	0	32	12
Kab. Tabalong	1		2	3	5	119	13
Kab. Tanah Bumbu	4	3	1	5	19	34	33
Kab. Balangan	3		45	7	13	58	89
Kota Banjarmasin			0	0	1	0	33
Kota Banjarbar			4	3	3	14	21
Prov. Kalimantan Selatan	20	6	71	30	66	349	334

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per tanggal 8 Juli 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan⁷

Gambar 3. Grafik Jumlah kejadian banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

⁷ Source Url: <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/311.html>. Access Time: September 6, 2022, 1:02 pm

Sedangkan luas kawasan yang mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ditampilkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

TABEL 7. | Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Lokasi/Tahun	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2019)	Jumlah Luas Hutan Terbakar (2019)	Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan (2019)	Jumlah Luas Lahan Terbakar (2019)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2020)
Tanah Laut	6	18	540	1262.15	0
Kotabaru	0	0	41	135.9	0
Banjar	5	67.5	241	1227.25	0
Barito Kuala	21	84.25	87	334.9	2
Tapin	0	0	202	930.56	0
Hulu Sungai Selatan	1	0.02	211	287.65	0
Hulu Sungai Tengah	20	35.6	87	192.93	12
Hulu Sungai Utara	0	0	24	123.3	0
Tabalong	7	18.4	118	285.23	33
Tanah Bumbu	1	3	119	475.45	3
Balangan	14	63.6	122	565.46	0
Banjarmasin	0	0	21	51.95	0
Banjarbaru	1	6	336	568.41	0
Kalimantan Selatan	76	296.37	2149	6441.14	50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam per tanggal 8 Juli 2022 dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan⁸

⁸ Source Url: <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/311html>. Access Time: September 6, 2022, 3:14 pm

Jumlah Luas Hutan Terbakar (2020)	Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan (2020)	Jumlah Luas Lahan Terbakar (2020)	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2021)	Jumlah Luas Hutan Terbakar (2021)	Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan (2021)	Jumlah Luas Lahan Terbakar (2021)
0	2	6.1	0	0	47	411.45
0	2	0.6	0	0	1	0.5
0	90	102.34	0	0	26	366.2
80.02	19	53.98	0	0	7	38.5
0	7	3.04	0	0	37	212
0	3	0.45	0	0	107	781.3
21.54	1	1	0	0	6	38.05
0	1	0.7	0	0	1	50
55.42	12	13.73	0	0	3	5.6
1.3	5	4.83	0	0	4	6
0	61	96.62	0	0	24	34.55
0	4	11.5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	64	523.3
158.2	207	294.89	0	0	327	2467.45

2.8. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/ PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423,81 ha atau 88,73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277,86 ha atau 11,27%, sebagaimana disajikan pada Tabel 8 berikut.

TABEL 8. | Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	170.402,98	19.768,37
Banjar	387.831,60	81.757,61
Barito Kuala	131.316,56	99.944,77
Hulu Sungai Selatan	148.814,78	21.047,17
Hulu Sungai Tengah	138.878,15	28.592,42
Hulu Sungai Utara	77.445,08	15.320,22
Kota Banjarbaru	22.004,96	10.449,6
Kota Banjarmasin	171,93	9.270,02
Kotabaru	896.465,56	26.324,66
Tabalong	350.399,74	19.762,32
Tanah Bumbu	450.442,59	25.546,36
Tanah Laut	342.468,64	43.630,44
Tapin	199.781,25	19.863,86
KALSEL	3.316.423,81	421.277,86
Persentase (%) 2015	88,73	11,27

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98,18%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43,22%) dan Kota Banjarbaru (32,20%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97,15%), selanjutnya Kabupaten Tabalong (94,66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,63%).



BAB 03



**RENCANA KERJA AKSI MITIGASI SUB
NASIONAL KALIMANTAN SELATAN**

BAB III. RENCANA KERJA AKSI MITIGASI SUB NASIONAL KALIMANTAN SELATAN

Untuk mencapai terwujudnya Program Net-Sink FOLU priode 2023-2030 di Indonesia, ada beberapa strategi yang perlu ditetapkan. Strategi tersebut adalah 1) Strategi Pengelolaan Hutan Lestari, 2) Strategi Konservasi, 3) Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut, 4) Strategi Peningkatan Cadangan Karbon melalui Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non Hutan, dan 5) Strategi Instrumen dan Informasi. Semua strategi tersebut bertujuan untuk peningkatan cadangan karbon dan mencegah karbon yang ada terdegradasi di kawasan hutan dan non hutan. Strategi Pengelolaan hutan lestari diterapkan pada kawasan hutan. Strategi Konservasi diterapkan pada areal kawasan konservasi dan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut diterapkan pada kawasan bergambut. Strategi Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non Hutan diterapkan pada seluruh areal yang berpotensi untuk peningkatan cadangan karbon yang ada di masing-masing kabupaten di luar kawasan hutan.

Penyusunan strategi ini dibuat secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholders yang ada di Kalimantan Selatan, yakni dari SOPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan juga dari UPT KLHK yang ada di Kalimantan Selatan. Proses penyusunan startegi yang telah dilaksanakan menghasilkan rumusan berdasarkan masukan dan kondisi di lapangan sehingga menjadi target prioritas yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya mitigasi melalui kegiatan Folu Net Sink Sub Regional Kalimantan Selatan Tahun 2023- 2030.

Para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan, Strategi Program dan Rencana Aksi Folu Net Sink Sub Regional Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) terdiri dari:

1. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
5. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
7. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
9. Dinas Energi dan Pertambangan Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
10. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

11. KPH Kayu Tangi
12. KPH Kayu Hulu Sungai
13. KPH Tabalong
14. KPH Balangan
15. KPH Tanah Laut
16. KPH Cantung
17. KPH Kusan
18. KPH Sengayam
19. KPH Pulau Laut Sebuku
20. UPTD BPTH Kalimantan Selatan
21. Tahura Sultan Adam

Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK terdiri dari:

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjar Baru
2. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
3. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan
4. Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Karhutla Wilayah Kalimantan
5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan
6. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru
7. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito
8. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
9. Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Provinsi Kalimantan Selatan

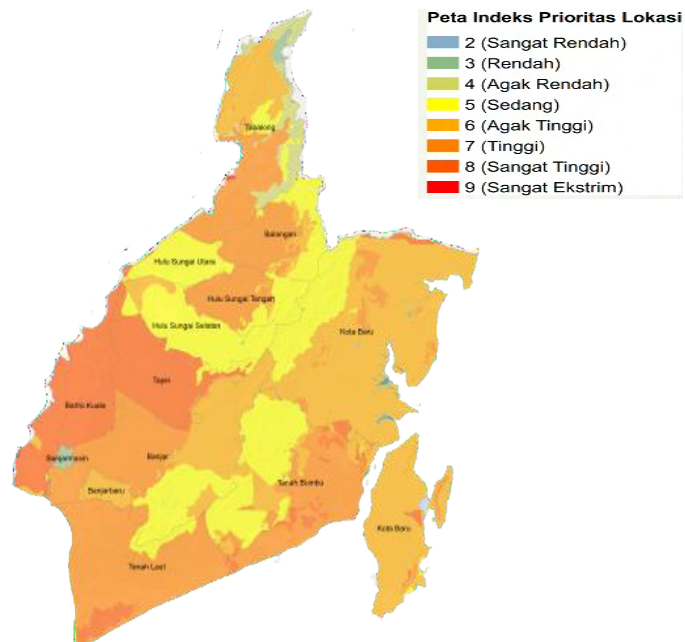
Aspek utama dalam penerapan strategi ini memperhatikan ruang, potensi isi ruang, pengelola ruang, sistem pendukung berbasis masyarakat atau pemerintah daerah dan sistem informasi. Ruang yang dimaksud adalah kawasan hutan dan non hutan. Potensi isi ruang adalah potensi biogeofisik, khususnya yang terkait karbon. Sistem pendukung berbasis masyarakat atau pemerintah daerah adalah kelembagaan yang sudah ada seperti MPA, DARWIS, dan lain lain yang ada di level tapak. Sedangkan, di level pemerintah daerah perlu dibentuk 'unit khusus' untuk mendukung pencapaian Program FOLU Net-Sink ini. Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi yang interaktif di mana parapihak bisa berperan serta untuk pencapaian program Net-Sink FOLU ini khususnya dan program Perubahan Iklim umumnya.

Masing-masing rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai arahan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) pada dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030. Pada penyusunan IPL tersebut, digunakan tiga informasi berbasis spasial yang meliputi; (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF). Area yang masuk kategori prioritas tinggi ialah yang nilai IPL 7 sampai 9 dan yang masuk kategori sedang ialah yang nilai IPL 5 dan 6, dan yang rendah yang nilai IPL 1 sampai 4.

Hasil analisis spasial penyusunan peta arahan mitigasi propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Indeks Prioritas Lahan (IPL) disajikan pada Gambar 4. dan Tabel 9 berikut ini.

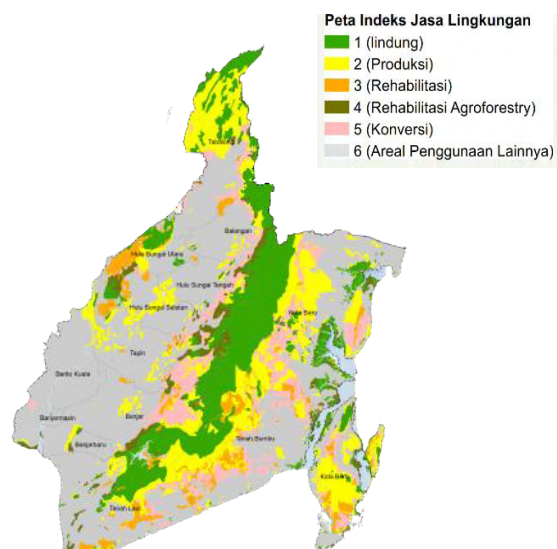
TABEL 9. | Arahan Indeks Prioritas Lokasi sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan

Kawasan Hutan	Arahan Indeks Prioritas Lokasi (Ha)								Luas Total (Ha)
	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sangat Rendah	Rendah	Agak Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Ekstrim	
KPH Balangan			3.460,28	426.652,40	125.690,96	953,93	639,80		557.397,37
KPH Balangan	903,99			679,05	1.006.788,18	49.170,18	1,91		1.057.543,31
KPH Hulu Sungai				507.191,60	176.503,73	139,13	206,68		684.041,14
KPH Kayu Tangi			3.682,02	885,64	1.088.153,59	22,85			1.092.744,11
KPH Kusan				813.044,94	307.484,38	51.752,65	103.075,62		1.275.357,60
KPH Pulau Laut Sebuku					651.355,53	50.706,88	1.396,42		703.458,84
KPH Sengayam			3.247,22	426.803,94	36.041,25	38.631,53	6,28	14,10	504.744,33
KPH Tabalong		13.877,61	329.064,09	92.395,59	19.154,35	1.668,66	131,34	0,00	456.291,62
KPH Tabalong Kiwa		189,01	17.944,11	11.742,66	155.387,55	58.592,75	12,75	4.692,82	248.561,65
KPH Tanah Laut				1.413,35	1.631,28	404.116,26	72.319,48		479.480,37
TAHURA				626.807,89	26.172,31	364,54			653.344,74
Area Penggunaan Lain	743,03	42.590,99	3.969,33	1.857.727,37	8.717.166,82	13.752.891,40	4.544.969,95	27.560,42	28.947.624,30
Luas Total (Ha)	1.652,02	56.657,61	361.367,04	4.765.344,45	12.311.529,93	14.409.010,75	4.722.760,23	32.267,34	36.660.589,38



Gambar 4. Indeks Prioritas Lokasi (IPL) Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 4 dan Tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan didominasi indeks prioritas lokasi dari sedang (5) hingga sangat tinggi(8) , terutama yang terletak di KPH Cantung, KPH Kayu Tangi, KPH Kusan dan Area Penggunaan Lain (APL)



Gambar 5. Peta Indeks Jasa Lingkungan (IJL) Provinsi Kalimantan Selatan

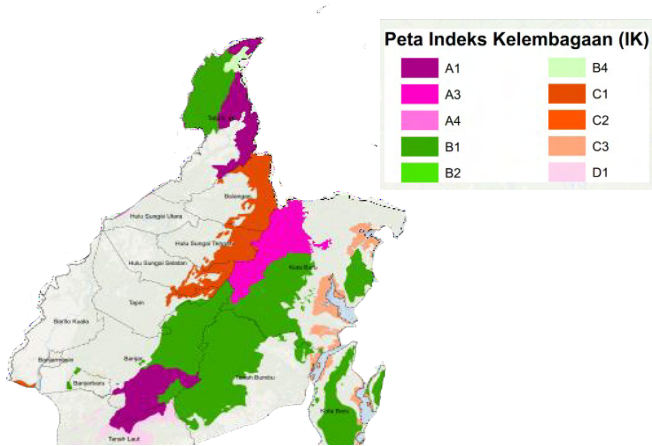
Gambar 5 dan Tabel 10 memperlihatkan bahwa Propinsi Kalimantan Selatan didominasi tiga Indeks Jasa Lingkungan, yaitu berupa lindung dan produksi serta konversi selanjutnya di Areal penggunaan lain juga mendominasi luasannya. Arahkan lindung terdapat di lokasi Tahura, KPH Sengayam dan KPH Kusan; selanjutnya arahan produksi di KPH Kusan dan KPH Tabalong Kiwa, sedangkan arahan konservasi di KPH Cantung dan KPH Kayu Tangi.

TABEL 10. | Arahan Indeks Jasa Lingkungan sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan

Kawasan Hutan	Arahan Indeks Jasa Lingkungan (Ha)						Luas Total (Ha)
	1	2	3	4	5	6	
	Lindung	Produksi	Rehabilitasi	Rehabilitasi Agroforestry	Konversi	Area Penggunaan	
KPH Balangan	66.695,24	12.200,95	21.190,64	10.084,20	17.512,97	379,21	128.063,22
KPH Cantung	45.251,51	64.731,45	8.966,08	1.923,29	69.753,00	4,85	190.630,18
KPH Hulu Sungai	44.216,22	9.844,37	8.906,62	32.741,81	33.810,19	272,63	129.791,85
KPH Kayu Tangi	29.224,77	39.617,37	8.855,50	15.571,21	65.607,66	2,40	158.878,92
KPH Kusan	83.998,24	88.180,30	47.831,43	322,70	58.878,54	31,71	279.242,02
KPH Pulau Laut Sebuku	5.500,89	53.716,76	20.602,61	1.004,65	24.202,52	77,45	105.104,88
KPH Sengayam	104.668,67	41.939,27	1.147,11		15.261,32	4,01	163.015,39
KPH Tabalong	42.680,98	45.045,42	6.201,35	3.089,65	18.044,87	2,58	115.064,95
KPH Tabalong Kiwa	29.856,46	73.252,87	820,66	436,22	8.588,02	0,10	112.954,33
KPH Tanah Laut	6.673,11	30.072,64	37.550,13	6.352,76	18.855,73	15,66	99.520,04
TAHURA	99.212,98	225,66	5.732,58	10.652,90	1.015,00	13,62	116.852,74
Area Penggunaan Lain	84.433,39	190.720,88	30.270,39	25.086,53	15.496,41	1.726.776,79	2.072.734,40
Luas Total (Ha)	642.407,45	649.547,95	198.075,11	107.265,94	347.026,23	1.727.581,14	3.671.903,81

Gambar 6 dan Tabel 11 di atas memperlihatkan bahwa Propinsi Kalimantan Selatan didominasi indeks kelembagaan A1 dan B1; Indeks kelembagaan A1 berada di lokasi KPHTabalong dan Tahura; sedangkan indeks kelembagaan B1 didominasi lokasinya di KPH Kusan, KPH Cantung, KPH Kayu Tangi, KPH Pulau Laut Sebuku dan KPH Tabalong Kiwa yang

mencakup areal sekitar 800 ribu hektar.



Gambar 6. Peta Indeks Kelembagaan (IK) Propinsi Kalimantan Selatan

TABEL 11. | Arahkan Indeks Kelembagaan sesuai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Propinsi Kalimantan Selatan

Kawasan Hutan	Arahkan Indeks Kelembagaan (Ha)										Luas Total (Ha)
	A1	A3	A4	B1	B2	B4	C1	C2	C3	D1	
KPH Balangan	67,22	22,98	1.833,48			1.554,10	82.014,29				85.519,06
KPH Cantung				190.521,66							190.521,66
KPH Hulu Sungai		184,21		5.755,10			98.086,66				104.025,96
KPH Kayu Tangi		9,03		155.726,34			228,12			0,04	155.963,53
KPH Kusan				251.848,16						759,94	252.608,09
KPH Pulau Laut Sebuku				104.302,07					1,52		104.303,59
KPH Sengayam		144.025,24		344,46		1.355,75	336,45				146.061,90
KPH Tabalong	99.394,33			24,27	114,93	14.233,27	1.297,85				115.064,65
KPH Tabalong Kiwa	25,07			107.933,38	446,48	809,03	230,06				109.444,03
KPH Tanah Laut				677,05					0,00	89.107,85	89.784,89
TAHURA	115.493,35			6.518,91						116,40	122.128,66
Area Penggunaan Lain	657,94	314,06	48,00	19.426,39	0,22	697,16	4.877,45	249,34	93.777,25	0,36	120.048,18
Luas Total (Ha)	215.637,91	144.555,51	1.881,48	843.077,79	561,64	18.649,32	187.097,87	249,34	93.778,77	89.984,59	1.595.474,21

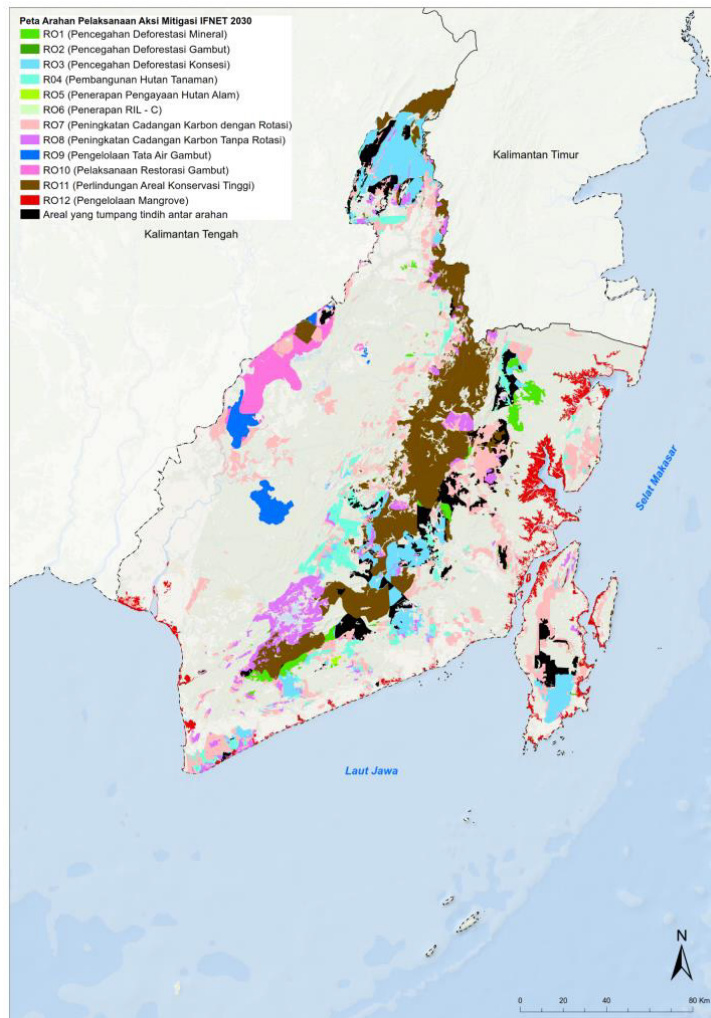
Dari hasil analisis spasial yang sudah dilakukan, sebaran lokasi prioritas tiap aksi mitigasi RO1-RO12 di provinsi Kalimantan Selatan yang tersaji pada Tabel 12. Dari Tabel 12 tersebut diketahui bahwa luas kawasan intervensi untuk aksi mitigasi perubahan iklim di provinsi Kalimantan Selatan mencapai 1,457 juta hektar, dengan luasan terbesar untuk aktivitas RO11 yang mencapai 343 ribu hektar, dan RO7 sebesar 324 ribu hektar dan terendah pada aktivitas RO2 yang seluas 2,326 ribu hektar. Sedangkan berdasarkan status kawasan hutan, paling luas di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) dengan area intervensi untuk masing-masing kawasan seluas 540 ribu dan 411 ribu hektar.

Gambar 7 serta Lampiran 1 sampai dengan 12 menunjukkan peta sebaran rencana aksi mitigasi di provinsi Kalimantan Selatan. Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2030 ini mencakup 12 rencana aksi mitigasi yaitu 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove.

TABEL 12. | Sebaran lokasi aksi mitigasi tiap Rencana Aksi Mitigasi (RO) berdasarkan status kawasan hutan

No	Kawasan	Luas Arahana Pelaksanaan AksiMitigasi (Ha)				
		R01	R02	R03	R04	R05
A	Kawasan Hutan					
	CA	12.30		.	.	0.08
	KSAIKPA		.	.	.	
	SM	18.24	.	0.87		
	TWA	.		.		
	TAHURA		.	.	.	.
	HL	1,421.27	.	49,270.41	.	1,387.66
	HP	23.893.00	20.14	168,251.31	73,054.79	89.339.43
	HPK	5,743.15	40.66	3,742.28	5,998.94	2.28
	HPT	717.84	.	48,142.11	3,770.60	10,300.33
	Sub Total	31,805.80	60.80	269,406.98	82,824.33	101,029.78
B	Non Kawasan Hutan					
	APL	4.642.53	2,265.90	4,262.55	1,429.21	2,376.01
	Tubuh Air	2.82		.	.	0.92
	Sub Total	4,645.36	2,265.90	4,262.55	1,429.21	2,376.93
	Grand Total	36,451.15	2,326.69	273,669.53	84,253.54	103,406.72

	R06	R07	R08	R09	R010	R011	R012	R013
		2.87	783.04	.	.	.	.	47,961.46
		1.98	994.26		.	7.35	7.35	1,761.48
		1,785.95	4,605.79	.	.	.	.	9,897.00
		9.86		.	.	.	.	767.84
.	2.36129	46,337.03	.	.	48,872.76	48,872.76		97,571.09
0.76	40,386.86	38,847.72	.	.	280,500.90	280,500.90		411,815.58
1,704.88	160,733.92	8,712.28			11,304.16	1,225.14	1,225.14	540,034.13
.	33,722.92	2,402.55	.	40,899.19	6,837.47	6,837.47		99,638.27
1,183.20	28,990.00	795.72	.	.	45.47	45.47		93,945.26
2,888.85	267,995.64	103,478.40	.	52,203.35	337,489.10	337,489.10		1,303,392.11
89.91	56,307.68	699.39	39,265.78	6,524.29	5,372.72	5,372.72		152,972.90
0.92	24.17	0.00		.	.	.		677.87
90.83	56,331.86	699.39	39,265.78	6,524.29	5,372.72	5,372.72		153,650.78
2,979.68	324,327.49	104,177.79	39,265.78	58,727.64	342,861.82	342,861.82		1,457,042.89



Gambar 7. Peta sebaran rencana aksi mitigasi di provinsi Kalimantan Selatan

3.1. STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Strategi Pengelolaan Hutan Lestari diarahkan pada perwujudan Rencana Operasional RO3-RO8, dan RO11-RO12 pada Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Perhutanan Sosial (PS) di Kalimantan Selatan, Strategi tersebut disajikan secara lengkap pada Lampiran 13 s/d 18. Strategi rencana operasional yang berada di luar kawasan hutan, tidak dimasukkan sebagai bagian dari strategi pencapaian pengelolaan hutan lestari, namun dimasukkan dalam bahasan rencana operasional diluar kawasan hutan.

Strategi pengelolaan hutan lestari pada laporan ini difokuskan kepada pencegahan kerusakan potensi karbon, peningkatan cadangan karbon, pemeliharaan potensi karbon,

pemanenan karbon (kayu) yang aman terhadap lingkungan berbasis RIL (Reduce Impact Logging).

A. Kegiatan dan Target Rencana Operasional pada PBPH

Pencegahan Deforestasi Konsesi (RO3) pada PBPH Tanaman dan Hutan Alam merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam program FOLU Net-sink. Adapun sasarannya adalah tercapainya upaya pencegahan deforestasi konsesi (RO3). Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan adalah :

- 1) Pelatihan Sumberdaya manusia (SDM),
- 2) Penegakkan hukum (Law Enforcement),
- 3) Pencegahan kebakaran,
- 4) Mempertahankan cadangan karbon yang ada di masing-masing konsesi,
- 5) Pemeliharaan dan Pengayaan tanaman pada hutan sekunder,
- 6) Memaksimalkan sistem pendukung kelembagaan masyarakat

Besarnya target luasan (ha) dan lokasi kegiatan Pencegahan Deforestasi Konsesi pada masing-masing PBPH yang akan direalisasikan disajikan pada Tabel 13, Sedangkan, Gambar Peta Rencana Operasional Pencegahan Deforestasi Konsesi pada PBPH Hutan Tanaman dan Hutan Alam periode 2023-2030 disajikan pada Gambar 8.

Tabel 13. memperlihatkan Rencana Operasional Pencegahan Deforestasi Konsesi (RO3) pada beberapa PBPH hutan alam dan hutan tanaman pada beberapa fungsi hutan, tipe penutupan lahan dan indek prioritas lokasi untuk priode 2023-2030. Dari Tabel 13 dan Gambar 8 disajikan data areal yang perlu dipertahankan agar tidak mengalami deforestasi pada konsesi dengan total luas mencapai 215.742 ha yang terdiri dari 60.458 ha untuk hutan tanaman, 155.016 ha hutan sekunder dan hutan primer pada kawasan HPT (hutan Produksi Terbatas) dan HP (Hutan Produksi).

Areal yang perlu dipertahankan agar tidak mengalami deforestasi terdapat pada beberapa konsesi seperti pada PT. Aya Yayang Indonesia masing-masing seluas 878 Ha untuk hutan tanaman dan 50.508 ha untuk hutan sekunder, PT Hutan Rindang Banua seluas 14.481 ha untuk hutan tanaman dan 22.848 Ha untuk hutan sekunder, PT Kodeco Timber seluas 26.539 ha untuk hutan sekunder, PT Inhutani II PLS seluas 18.862 untuk hutan tanaman ha dan 11.666 Ha untuk hutan sekunder dan PT Batulicin Bersujud seluas 11.636 hHa untuk hutan sekunder.

Selain dari PBPH yang disebut di atas semua penutupan hutan sekunder dan pada kawasan HPT dan HP mempunyai luas di bawah 10.000 ha. Komitmen terkait tindakan untuk mempertahankan hutan tanaman dan hutan sekunder yang ada perlu dilakukan agar program ini segera tercapai. Bahkan lebih jauh jika memungkinkan pihak konsesi melakukan pemeliharaan dan pengayaan. Dengan asumsi program ini dimulai dari 2023-2030 atau selama 8 tahun, maka kegiatan pemeliharaan dan pengayaan pada kawasan HPT dan HP mencapai

7.557 ha/tahun pada hutan tanaman dan 19.377 ha pada hutan sekunder. Pencegahan kebakaran dan penebangan liar pada daerah-daerah yang memiliki potensi kebakaran dan penebangan liar yang tinggi perlu diperhatikan.

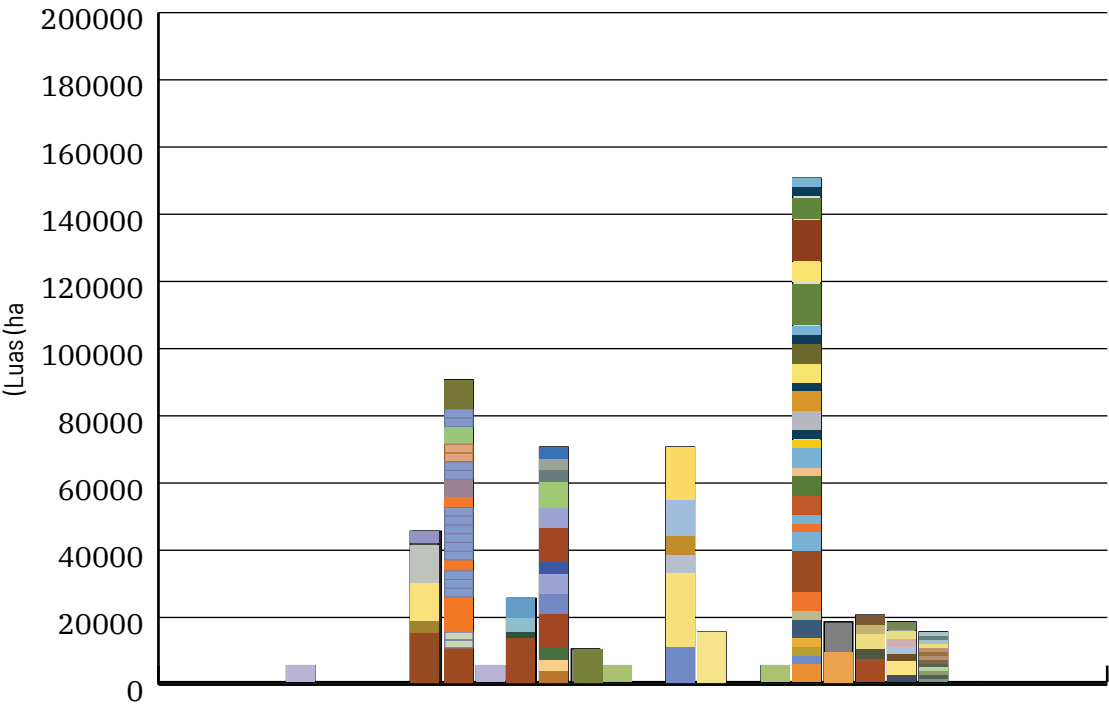
Kegiatan peningkatan pemahaman baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan pendampinga dilakukan untuk mendapatkan kader-kader yang paham dan ikut bertanggung jawab dalam Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Pada daerah ini juga sekaligus dilakukan pemahaman tentang PHL melalui pelatihan untuk mendapatkan kader-kader yang paham PHL Pemberian sertifikat PHL dan insentif pada kader yang memiliki kapasitas tersebut sangat penting. Bagi pihak-pihak yang kurang atau tidak memperhatikan hal tersebut, mekanisme pemberian sanksi dapat dilakukan. Secara sederhana jabaran tersebut disampaikan pada Tabel 15.

Pembangunan hutan tanaman (RO4) pada PBPH tanaman dan hutan alam pada program Net-sink FOLU difokuskan pada areal yang tidak produktif. Adapun sasarannya adalah tercapainya penambahan areal berhutan untuk meningkatkan serapan dan cadangan karbon. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan RO4 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia (SDM),
- 2) Penegakan hukum (Law Enforcement) dan penerapan mekanisme insentive dan disinsentive,
- 3) Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu (illegal logging),
- 4) Mengoptimalkan sistem pendukung dari masyarakat adat dan pemerintah lokal
- 5) mengoptimalkan sistem kelembagaaan masyarakat MPA (masyarakat Peduli Api) dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat tapak
- 6) Pemeliharaan dan Pengayaan tanaman,
- 7) Pengamanan dan pengukuhan kawasan,
- 8) Membangun Nota Kesepahaman dan Pakta Integritas dalam mensukseskan pencegahan deforestasi

Besarnya target (ha) dan lokasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada masing-masing PBPH yang akan direalisasikan disajikan pada Tabel 14, Sedangkan, Gambar Peta Rencana Operasional pembangunan hutan tanaman pada PBPH Hutan Tanaman dan Hutan Alam periode 2023-2030 disajikan pada Gambar 8.

TABEL 13. | Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PBPH hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Selatan periode 2023-2030



[illegible]

[illegible]

	HPT	HL	HP R05	HPT	HPT R06	HL	HP R07	HPK	HPT	HL	HP R08	HPK	HPT
	50.8	52.6					0.1		0.1				
							92.5						
			380.1	383.7			789.3						
			0.3										
			0.6										
	71.9						1.5				17.7		
	0.7					82.2	87.1			1014.7			
							1.1			0.3			
						0.5	178.1						
						0.3	96.2			5.4	137.5		
			0.3										
			73.8										
			68.7	0.1							21.0		
						0.0	839.9			3.5			
											363.3		
							4.2						
							2098.4		7.3				
	26.5						6458.6		0.2	0.9	32.3		
				0.6									
						0.0	520.0		0.1	2.0			0.1
											648.5		
							18.9						
							2940.9				1010.2		
							244.3				55.2		
							983.7				230.9	0.0	
							10484				249.0		
											11.5		
							50.8				21.7		
							157.6						
							111.7						
							48.3	7.5					
							12142						
								0.1	2				
							105.3						
							559.6				58.6		
											49.5		
							85.3						
							0.0						

[illegible]

	HPT	HL	HP	HPT	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
			R05		R06		R07				R08		
							6780.0				48.2		
							1226.0						
							17448						
			11260				0.1						
						0.0	999.1						
							2773.2						
							182.7						
							6074.6						
							520.9						
			4799.3				61.6						
							5273.6						
							54.0				31.0		
							3.0						
							3.5						
			4.5				0.7						
			3931.9	8.9			0.5						
						22.1	598.0		0.7	1054.3			8.3
						280.7	26.5			15.9			
						475.0	90.3						
						0.7							
							108.3			101.4			
			190.0										
			1662.6							0.5	0.5		
			38.5										
										377.4			
						333.2	149.0			2089.3			
						0.0				14.6			
								14.3					
								59.7				327.1	
							1.5				602.2	125.7	
							8.3			39.0	379.6		23.3
								35.1					
							0.2	2.3			173.2		
	24.0						1386.5		27.1	130.4	81.2		
							0.0						
								88406				2.6	
							2767.7	7465.2	0.7		39.8		
						188.8	4171.7	244.0	375.8				
							0.0						
								5.8					
								726.1				0.0	
	18.5						309.1	149.4	21.4	14.2	2030.3		
	914.3						10736		61.2	1339.2	10.9		
							0.0			0.0			

	HL	HL	HP	HPT	HP	HL	HP	HPK	HPT	HP	HPK	
	R01		R011		R012		R03				R04	
HRB - Pb - 7												
HRB - Pb - 6												
HRB - Ht - 8								463.2				
HRB - Ht - 7							7022.7	121.6				
HRB - Ht - 6							5945.6		1510.1			
HRB - Ht - 5							0.0					
HRB - Hs - 7	0.5					59.9	900.9	3126.1	130.9			
HRB - Hs - 6						12561	137.2		73.8			
HRB - Hs - 5						0.1	0.0					
HRB - Br - 8												
HRB - B - 8											116.4	
HRB - B - 7										2705.8	215.9	
HRB - B - 6												
HJU - Hs - 6						2664.9			4.9			
HJU - Hs - 4						1.6						
HJU - Hs - 3						0.4						
EAI - Pk - 4												
EAI - Pc - 8												
EAI - Pc - 4												
EAI - Hs - 8									115.6			
EAI - Hs - 7									4.1			
EAI - Hs - 6									294.0			
EAI - Hs - 4		1067.3					1835.3		2542.1			
EAI - Hs - 3		703.2							2264.4			
EAI - B - 8												
EAI - B - 6												
EAI - B - 4												
EAI - B - 3												
DI - T - 5												
DI - Pt - 5										49.4		
DI - Pc - 6										1193.8		
DI - Pc - 5										2083.5		
DI - Ht - 5							888.3					
DI - Hs - 6							1.4					
BBB - Pt - 5										129.2		
BBB - Pk - 5												
BBB - Pc - 6										0.4		
BBB - Pc - 5										1974.6		
BBB - Hs - 7							273.4					
BBB - Hs - 6		0.0					109.0					
BBB - Hs - 5		0.5				0.0	0.3		0.0			
BBB - B - 7										16.1		
BBB - B - 5												
AYI - Pk - 6												
AYI - Pc - 6										760.7		
AYI - Pc - 5												
AYI - Ht - 7								8.5				
AYI - Ht - 6							878.1					
AYI - Hs - 7							0.5		504.6			
AYI - Hs - 6		174.0				20705	18861		18153			
AYI - Hs - 5							108.3					
AYI - Hs - 4		4.2				79.2	41.1		123.9			
AYI - Hs - 3						116.1						
AYI - Hp - 6		231.3		0.5								
AYI - B - 7												
AYI - B - 6						0.0						
AYI - B - 4												

	HPT	HL	HP R05	HPT	HPT R06	HL	HP R07	HPK	HPT	HL	HP R08	HPK	HPT
							1.1						
							4.4	0.2					
							6485.4						
							0.0						
			3.4				382.2				775.0	2.4	12.5
			15438	6088.1			633.0		3502.9	7256.3	411.9		20.4
			0.5										
								0.3					
							90.1					64.4	
	383.9						1744.3	210.7			945.6	159.1	
							971.4		134.7	1626.7	623.1		122.7
							114.5						
							482.0		5.6				
				0.2					144.1	1.5			
			0.7	197.4			58.2			7.7			
		0.8		304.6									
									2.1				
										1.4			
						127.8	2067.9		763.3	533.0			
						257.7			31.0	300.0			
							0.0				159.4		
							137.5						
							246.7						
							2386.4						
			29.0										
							28.2				0.0		
							1582.7		0.0		226.7		
	0.0						262.2		0.3				
			0.0										
			16.2										
		0.0	11316	0.2							12.9		
	0.0												
							795.0		0.0		16.3		0.0
						0.6							
							435.1		84.6	2.9			
							0.0						
			941.6	410.6			0.0		11768		0.1		455.4
			2.5										
		5.6		277.4	137.2								
									172.3				
						60.7	4149.3		2003.1	1021.7			
						0.9	32.2		106.8	0.1			

TABEL 14 | Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PBPH hutan alam dan hutan tanaman di Kalimantan Selatan periode 2023-2030

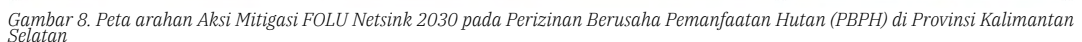
No	Nama PB.PH	ROI	R010			R0U			R012	R02	R03				
		HI	HP	HPK	HI	HP	HPK	HPT	HP	HP	HI	HP	HPK	HPT	
1	PT.Aya Yayang Indonesia				410			1			20901	19889	8	18782	
2	PT. 83tulicin Bumi Bersujud				0						0	383		0	
3	PT. Dwima Int iga											890			
4	PT.El bana AbadiJaya				1771							1835		5220	
5	PT. HasnurJaya Utama										2667			s	
6	PT. Hutan Rindang Sanua	0									12622	14006	3711	1715	
7	PT. HutanSembada				817						94S	219			
8	PT. Inhutani II											1486			
9	PT. Inhutani II Unit Pulau Laut								s			19268			
10	PT. Inhutani II Unit Senakin					0			0			246			
11	PT. Inhutani III Pelaihari								so			3074			
12	PT. Inhutani III Riam Kiwa				0							1998			
13	PT. InniJoa				99						9910	112S0		27	
14	PT.Jenggala Semesta				0						126	3009	23	1451	
15	PT.JhonlinAgro Mandiri				3						22	11394			
16	PT. Kirana Chatulis tiwa											2188			
17	PT. Kodeco Timber								0			723			
18	PT. Prima Mult ibuana				12						2154	1257		1S68	
19	PT. Trikorindot ama Wanakarya										34	238			
20	PT.Wana Oipa Perkasa				0	0					1	8			
Grand Total		0	0	0	3111	0	0	1	SS	0	49381	93364	3742	28768	

	R04			R05				R06				R07				Total
	HP	HPK	HPT	HI	HP	HPT	HPT	HI	HP	HPK	HPT	HI	HP	HPK	HPT	
	761			6	944	688	137	62	4617		14135	102S	0		4SS	82820
	2120		0	0	11333	0			2668		0		28S		0	16790
	3327				29			0	2999			0	a64			7408
				1	1	502		385	2722		946	844				14228
																2672
	30983	5994	1341		15442	6088		189	29603	17410	4124	104-06	6070	681	179	160564
	S12				1891			1090	374			2S99	1			8447
					4799				14887							21172
	99				11261			0	26S39				98			57270
	31S3	4							13176	8			80			16666
	6549	0							14673				220S	0		26SS1
	7662		26			1		0	9081		8	3	396		0	19174
	770				3936	9		22	660		1	1054	31		8	27777
	112	1	128		381	384		82	972		0	101S	18			7702
	1453				143	0		1	1114			9	as9			14297
	3133		1		247				657				646			6871
	61		83		20706	2			45409		2002		304		4	69294
	2731		2192		6	4		82	S3		18	660			14S	10882
	5465								2240	2		92S	69			8974
	4121				917			2	188			0	0			S238
	73011	S999	3771	6	72037	7678	137	191S	172631	17419	21233	18S39	10524	681	792	584796

TABEL 15 | Rencana Program Kegiatan, Indikator FOLU Net Sink pada kawasan Perijinan Berusaha .Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Selatan

Program	R01	R010	R011	R012	R02	
Kegiatan	Pencegahan Deforestasi Mineral	Restorasi Lahan Gambut	Perlindungan areal konservasi Tinggi	Pengelolaan Mangrove	Pelaksanaan Restorasi	
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	
	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	
	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	
	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	
		Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	
Indikator Capaian	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	
		cadangan karbon tidak berkurang, cenderung meningkat	cadangan karbon tidak berkurang, cenderung meningkat	cadangan karbon tidak berkurang, cenderung meningkat	cadangan karbon meningkat	
Pendanaan (dalam juta Rupiah)/ Ha	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	
	5	5	5	5	5	
Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Dishut, Dinas LH, Pemprov/Pemkab, NGO, APLI, masyarakat/KTH sekitar hutan					

	R03	R04	R05	R06	R07	R08
	Pencegahan deforestasi oleh konsesi	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan pengayaan Hutan alam	Penerapan RIL-C	Peningkatan cadangan karbon-Rotasi	Peningkatan cadangan karbon-Non Rotasi
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penanaman, Pemeliharaan, Pembangunan PUP hutan tanaman	Pemeliharaan dan Pengayaan	Penerapan RIL-C, tebang pilih	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan, penebangan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan,
	Law Enforcement	Law Enforcement	Pembangunan PUP hutan alam	Penerapan SILIN	Pembangunan PUP hutan alam/tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
	Pemeliharaan, penanaman	Pembangunan PUP hutan tanaman	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Pengayaan	Penyuluhan, pelatihan PHL	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon meningkat
	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	5	26,57	5,59	17,04	34,66	32,16



Kegiatan pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration, ENR) merupakan salah satu kegiatan mitigasi yang diharapkan dapat meningkatkan laju regenerasi alami hutan alam. Upaya mitigasi dengan meningkatkan laju serapan GRK melalui tindakan pengayaan (R05) memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target NDC dan juga net sink 2030. Pemilihan lokasi untuk diterapkan ENR adalah pada area dengan tutupan lahan hutan alam namun berada pada arahan konversi dan rehabilitasi mengindikasikan bahwa kondisi hutan sudah mengalami degradasi berat atau sudah berupa belukar. Kegiatan ENR juga diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya berupa hutan alam dan masuk ke dalam arahan konservasi dan

rehabilitasi, termasuk hutan sekunder di arahan produksi Luas total areal kurang produktif yang dapat dikayakan untuk meningkatkan cadangan karbon adalah 97.412 ha yang tersebar pada areal PBPH. Upaya Pembangunan Hutan Alam (RO5) di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total areal seluas 97.412 ha. Lokasi yang terbanyak pada PT. Kodeco (21.241 ha), PT. Hutan Rindang Banua (21.684 ha, PT. Inhutani II PLS (11.581 ha). Target RO5 pada seluruh areal PBPH hutan tanaman di Kalimantan Selatan per tahun adalah 12.177 ha untuk kegiatan pengayaan hutan tanaman.

Kegiatan Reduced Impact Logging-Carbon- RILC (RO6) terutama dilakukan pada area dengan tutupan hutan alam primer yang masuk arahan produksi dan berada di konsesi PBPH-HA. Pada area tersebut, RIL dapat diterapkan pada hutan primer dan pada hutan alam sekunder dilakukan dengan teknik SILIN (Tebang Pilih Tanam Rumpang, Tebang Pilih Tanam Jalur). Selain pada PBPH HA, RIL-C juga dapat diterapkan pada area PBPH HT yang berhutan alam. Hal ini memungkinkan karena adanya kebijakan multi usaha kehutanan. Luas total areal hutan alam yang dapat diterapkan RO6 adalah 137 ha yang terdapat di areal PBPH hutan alam yang terdapat di PT Aya Yayang Indonesia. Target RO6 pada seluruh areal PBPH hutan tanaman di Kalimantan Selatan per tahun adalah 17,125 ha untuk kegiatan RIL-C

Penerapan RIL-C (RO6) pada PBPH tanaman dan hutan alam pada program Net-sink FOLU difokuskan pada areal produktif. Adapun sasarannya adalah tercapainya pengurangan

degradasi hutan alam dan pengurangan emisi karbon. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan RO6 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia (SDM),
- 2) Law enforcement,
- 3) Penerapan mekanisme insentive dan disinsentive,
- 4) Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu (illegal logging),
- 5) Mengoptimalkan sistem pendukung dari masyarakat adat dan pemerintah lokal,
- 6) mengoptimalkan sistem kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat tapak
- 7) Pengamanan kawasan,
- 8) Membangun Nota Kesepahaman/Fakta Integritas dalam mensukseskan penerapan RIL-C

Penerapan peningkatan cadangan karbon dengan rotasi (RO) pada PBPH tanaman dan hutan alam pada program Net-sink FOLU difokuskan pada areal produktif. Adapun sasarannya adalah tercapainya peningkatan cadangan karbon. Luas total areal hutan alam yang dapat diterapkan RO7 adalah 139.975 ha, di mana wilayah yang terluas adalah PT. Kodeco = 18.889 ha, HRB = 25.266, AYI = 18899. Sementara PBPH lainnya relatif kecil dengan target < 15.000 ha. Target RO7 pada seluruh areal PBPH hutan tanaman di Kalimantan Selatan per tahun adalah 17,125 ha. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan RO7 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia (SDM),
- 2) Penegakan hukum (Law Enforcement),

- 3) Penerapan mekanisme insentive dan disinsentive,
- 4) Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu (illegal logging),
- 5) Pengembangan hutan tanaman energi,
- 6) Mengoptimalkan sistem pendukung dari masyarakat adat dan pemerintah lokal,
- 7) mengoptimalkan sistem kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat tapak
- 8) Penanaman, Pemeliharaan dan Pengayaan tanaman,
- 9) Pengamanan kawasan,
- 10) Membangun Nota Kesepahaman dan pakta Integritas dalam mensukseskan kegiatan peningkatan karbon dengan rotasi.

Peningkatan cadangan karbon non rotasi (RO-8) pada Perizinan Berusaha Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Kalimantan Selatan. Luas total areal hutan alam yang dapat diterapkan RO8 adalah 16894 ha. Target RO8 pada seluruh areal PBPH hutan tanaman di Kalimantan Selatan per tahun adalah 2.112 ha. Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia (SDM),
- 2) Penegakan hukum (Law Enforcement),
- 3) Penerapan mekanisme insentive dan disinsentive,
- 4) Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu (illegal logging),
- 5) Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK,
- 6) Mengoptimalkan sistem pendukung dari masyarakat adat dan pemerintah lokal,
- 7) mengoptimalkan sistem kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat tapak
- 8) Penanaman, Pemeliharaan dan Pengayaan tanaman,
- 9) Pengamanan kawasan,
- 10) Membangun Nota Kesepahaman dan pakta Integritas dalam mensukseskan kegiatan peningkatan karbon non-rotasi

B. Kegiatan dan Target Rencana Operasional pada KPH

Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 10 KPH yang mencakup luasan total sebesar 1.026.111 ha yang berada pada kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT). Tiga KPH yang paling luas berturut-turut adalah KPH Kusan (193.389 ha), KPH Cantung (138058 ha) dan KPH Sengayam (127.645 ha). Berdasarkan lokasinya, setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di provinsi Kalimantan Selatan pada Tabel 16, 17 dan Gambar 9 memuat seluruh kegiatan rencana aksi mitigasi dari RO1 hingga RO12. Tabel dan Gambar tersebut memperlihatkan bahwa RO3 RO7 dan RO11 menjadi aksi mitigasi yang dominan karena cakupan luasannya yang terbesar pada areal KPH di Provinsi Kalimantan Selatan.

Arahan pelaksanaan mitigasi pada kabupaten Balangan, Cantang dan Kapuas Hulu didominasi oleh RO7 yaitu Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi dan RO 11 yaitu

Secara rinci, rencana program kegiatan, indikator capaian, pendanaan serta para pihak terkait untuk mensukseskan aksi mitigasi perubahan iklim pada wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 18.

Sum of Luas

(Luas (ha))

Category	Sum of Luas (ha)
1	12000
2	10000
3	5000
4	108000
5	5000
6	23000
7	78000
8	7000
9	38000
10	23000
11	5000
12	5000
13	5000
14	5000
15	70000
16	12000
17	10000
18	10000
19	10000
20	10000
21	10000
22	10000
23	10000
24	10000
25	10000
26	10000
27	10000
28	10000
29	10000
30	10000
31	10000
32	10000
33	10000
34	10000
35	10000
36	10000
37	10000
38	10000
39	10000
40	10000
41	10000
42	10000
43	10000
44	10000
45	10000
46	10000
47	10000
48	10000
49	10000
50	10000

	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HP	HPK	HL	HP	HPK	HPT	
	R01				R01			R01		R03				
					1			2						
KPH Tanah Laut - Tm - 7									0.0					
KPH Tanah Laut - T - 8														
KPH Tanah Laut - T - 7														
KPH Tanah Laut - Sw - 8														
KPH Tanah Laut - Sw - 7														
KPH Tanah Laut - Pt - 7														
KPH Tanah Laut - Pt - 6														
KPH Tanah Laut - Pk - 8														
KPH Tanah Laut - Pk - 7									6.0					
KPH Tanah Laut - Pc - 8														
KPH Tanah Laut - Pc - 7														
KPH Tanah Laut - Pc - 5														
KPH Tanah Laut - Pb - 7														
KPH Tanah Laut - Ht - 8											2660			
KPH Tanah Laut - Ht - 7											6637	53.3		
KPH Tanah Laut - Hs - 7	0.0	9447	215	112	1338	1.0					362		130	
KPH Tanah Laut - Hs - 6											0.0			
KPH Tanah Laut - Hs - 5											5.8			
KPH Tanah Laut - Hp - 7		251												
KPH Tanah Laut - Hms - 8									0.0		396			
KPH Tanah Laut - Hms - 7								0.0						
KPH Tanah Laut - Hmp - 8								19.0			17.4			
KPH Tanah Laut - Hmp - 7								0.0						
KPH Tanah Laut - Br - 8								1.4						
KPH Tanah Laut - Br - 7								0.1	67.7					
KPH Tanah Laut - B - 8								0.0						
KPH Tanah Laut - B - 7			7.8											
KPH Tanah Laut - B - 6														
KPH Tanah Laut - B - 5														
KPH Tabalong Kiwa - Tr - 7														
KPH Tabalong Kiwa - T - 9														
KPH Tabalong Kiwa - T - 7														
KPH Tabalong Kiwa - Sw - 9														
KPH Tabalong Kiwa - Sw - 7														
KPH Tabalong Kiwa - Pt - 9														
KPH Tabalong Kiwa - Pt - 7														
KPH Tabalong Kiwa - Pt - 6														
KPH Tabalong Kiwa - Pt - 5														
KPH Tabalong Kiwa - Pt - 4														
KPH Tabalong Kiwa - Pk - 9														
KPH Tabalong Kiwa - Pk - 8														
KPH Tabalong Kiwa - Pk - 7														
KPH Tabalong Kiwa - Pk - 6														
KPH Tabalong Kiwa - Pk - 4														
KPH Tabalong Kiwa - Pc - 9														
KPH Tabalong Kiwa - Pc - 7														
KPH Tabalong Kiwa - Pc - 6														
KPH Tabalong Kiwa - Pc - 5														
KPH Tabalong Kiwa - Ht - 7											323	31.0	14.3	
KPH Tabalong Kiwa - Ht - 6											2886		1421	
KPH Tabalong Kiwa - Hs - 7		69.0		282						29.2	97.5	0.3	472	
KPH Tabalong Kiwa - Hs - 6					98.5					1901	1691		2296	
KPH Tabalong Kiwa - Hs - 5					179					87.6	133			
KPH Tabalong Kiwa - Hs - 4					3901		1.9			39.7	27.1		38.7	
KPH Tabalong Kiwa - Hs - 3					94.4					13.4			79.7	
KPH Tabalong Kiwa - Hp - 6					66.1		0.3							
KPH Tabalong Kiwa - B - 9														
KPH Tabalong Kiwa - B - 7														
KPH Tabalong Kiwa - B - 6														
KPH Tabalong Kiwa - B - 5														
KPH Tabalong Kiwa - B - 4														

	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04			R05			R06	R07				R08			
	155												648		
	169								37.1	35.5	54.9	300	604	26.4	
									18.9						
								0.3	0.0			32.3			
								19.6	311	5.2		686	173	0.0	
									31.3						
									2940				1010		
	389							0.6	3399	2041	4.1	703	39.	508	
	1737	449	18.5						244	0.0			55.2		
	0.0							358	1493	577	193	4937	356	280	
									44.0						
								0.9	1.0			11.6			
									686			180			
				1.8	3.4	874			325	9.6	13.6	426	453		12.5
					0.1										
					0.2										
	5055	0.0							983				217	0.0	
									0.2	94.5			0.1	0.0	
	938								1048				249		
	1092		352					150	4258	355	1349	3156	519	388	
													3.4		
													0.0		
										0.8					
														11.3	
	6.2												76.0		
										1.8					
										15.9					
										0.7					
	757								3.6	153					
	23.9		4.2												
	39.5							280	26.5			15.9			
									63.5						
										74.1				104	
									3.1						
									2336	2047				5.3	
									1.7						
									248	1.4					
										250					
	682	1.4							4.4	55.1		305	0.0		
	813		50.8						369		84.7	2.9			
	0.4											10.3			
					0.3	49.6			121						
				1363	80.2	49.0			1.3				0.1		455
					58.1										
					14.7	0.0									
					0.6										
					5.6	47.9									
										11.2				0.0	
	2537		71.9						478	0.3	172	619	17.7		
	91.9		0.7						87.4	4002	1615	1614			
									237	100		660			
	89.9								0.9	109		8.9			

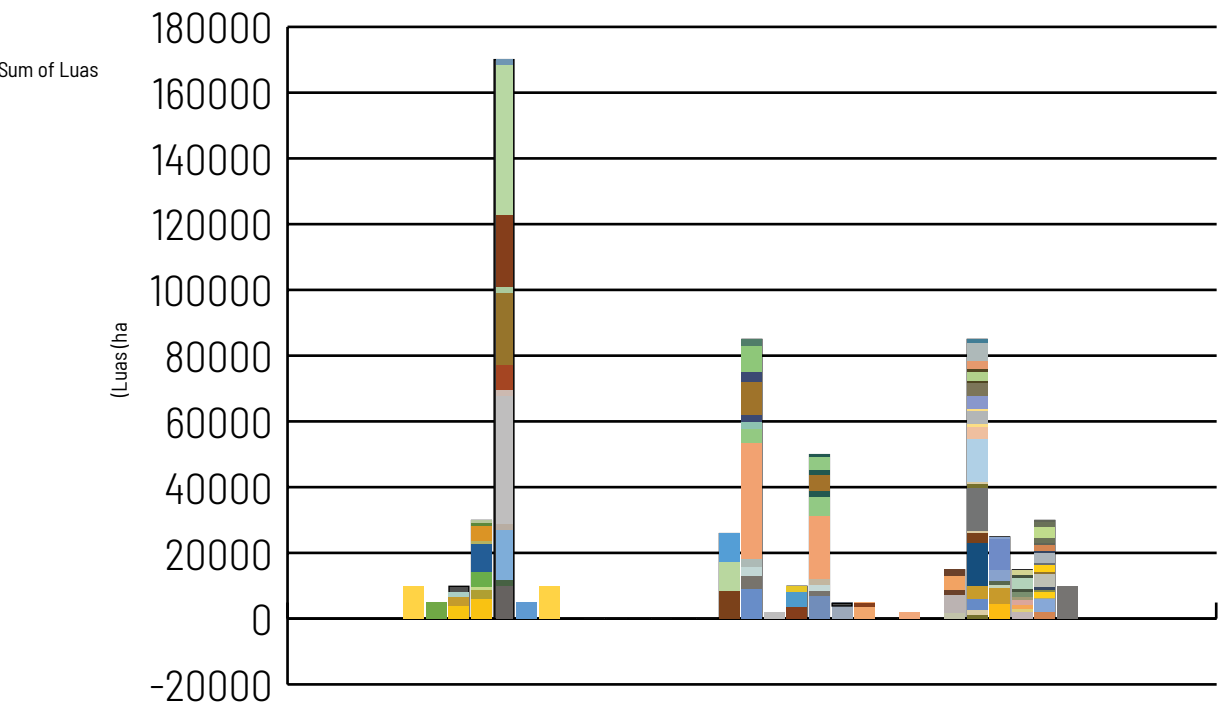
	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HP	HPK	HL	HP	HPK	HPT	
	R01				R01			R01		R03				
					1			2						
KPH Tabalong - T - 4														
KPH Tabalong - Sw - 4														
KPH Tabalong - Pt - 5														
KPH Tabalong - Pt - 4														
KPH Tabalong - Pk - 7														
KPH Tabalong - Pk - 6														
KPH Tabalong - Pk - 5														
KPH Tabalong - Pk - 4														
KPH Tabalong - Pc - 8														
KPH Tabalong - Pc - 6														
KPH Tabalong - Pc - 5														
KPH Tabalong - Pc - 4														
KPH Tabalong - Ht - 5											1			
KPH Tabalong - Hs - 8													115	
KPH Tabalong - Hs - 7				0							0.1			
KPH Tabalong - Hs - 6					75.8					3285	4097		7791	
KPH Tabalong - Hs - 5					978					530	688			
KPH Tabalong - Hs - 4					2183		6			83.7	1886		2628	
KPH Tabalong - Hs - 3					5098		1			103			2184	
KPH Tabalong - Hp - 6					165		0.2							
KPH Tabalong - B - 8														
KPH Tabalong - B - 7														
KPH Tabalong - B - 6														
KPH Tabalong - B - 5														
KPH Tabalong - B - 4														
KPH Tabalong - B - 3														
KPH Sengayam - T - 7														
KPH Sengayam - Pt - 7														
KPH Sengayam - Pt - 6														
KPH Sengayam - Pk - 9														
KPH Sengayam - Pk - 8														
KPH Sengayam - Pk - 7														
KPH Sengayam - Pk - 6														
KPH Sengayam - Pc - 7														
KPH Sengayam - Pc - 6														
KPH Sengayam - Pc - 5														
KPH Sengayam - Hs - 7		5716	5450									3126		
KPH Sengayam - Hs - 6					226						9253			
KPH Sengayam - Hs - 5					6217	0								
KPH Sengayam - Hs - 4					470									
KPH Sengayam - Hp - 6					109									
KPH Sengayam - Hp - 5					1661									
KPH Sengayam - B - 7														
KPH Sengayam - B - 5														
KPH Pulau Laut Sebuku - Tm - 7									0.40.1					
KPH Pulau Laut Sebuku - Tm - 6								33.1						
KPH Pulau Laut Sebuku - T - 6								0.2						
KPH Pulau Laut Sebuku - Sw - 6														
KPH Pulau Laut Sebuku - Pt - 7														
KPH Pulau Laut Sebuku - Pt - 6								0.2						
KPH Pulau Laut Sebuku - Pk - 8														
KPH Pulau Laut Sebuku - Pk - 7								7.6						
KPH Pulau Laut Sebuku - Pk - 6								68.1						
KPH Pulau Laut Sebuku - Pc - 7														
KPH Pulau Laut Sebuku - Pc - 6								27						
KPH Pulau Laut Sebuku - Pb - 7									6.6					
KPH Pulau Laut Sebuku - Pb - 6								82.8						

	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04			R05			R06	R07				R08			
									19.6						
									1.9						
									12.7						
									115			10.1			
									15.6						
								0.6							
								475	1358			102			
								0.7	641			0			
									0						
									65.5						
									1065			135			
									1458			660			
						0.2									
					104	213			0						
					1103						61.4	94.8	0.5		
					5.1	197			179		237	2736			
				0.1		304									
						229	137								
											2.1				
	1642								0.4						
	163							55.4	234		387	801			
								96.2	1740		212	1822			
								127	2665		1538	972			
								257			31	300			
									0						
		192							15.4						
	3105								127			4.5			
									1.3						
									0						
										5837					
									204						
		657							0	22.3					
	2138								12.5			5.2			
									505						
									120					2.4	
					0							262			
									254			6627			
		215							212	181				9	
									57.3			3726			
									2773			430			
									3.6						
										323					
	12.8							0	362			19.7			
									85.3						
									22.1			4.7			
									1313		110	48.2			
									7.2	73.1					
	85.9							0.2	531			810			

	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HP	HPK	HL	HP	HPK	HPT	
	R01				R01 1			R01 2		R03				
KPH Pulau Laut Sebuku - Ht - 8											1087			
KPH Pulau Laut Sebuku - Ht - 7								0.7						
KPH Pulau Laut Sebuku - Ht - 6								1.2			1723			
KPH Pulau Laut Sebuku - Hs - 8											85.1			
KPH Pulau Laut Sebuku - Hs - 7		185						9.8						
KPH Pulau Laut Sebuku - Hs - 6					596	0.1		31.5			1786			
KPH Pulau Laut Sebuku - Hms - 7								9.2	53.8					
KPH Pulau Laut Sebuku - Hms - 6						190		839			0.9			
KPH Pulau Laut Sebuku - Br - 7								8.4	4.6					
KPH Pulau Laut Sebuku - Br - 6								82.4						
KPH Pulau Laut Sebuku - B - 7								102	4.4					
KPH Pulau Laut Sebuku - B - 6								92.7						

	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04			R05			R06	R07				R08			
									138						
									142						
									398						
								765	1161			335			
									0				17.6		
										53.7			8		
									61.6						
									70.1	1533			239		
								84.2	7316			510			

Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada KPH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030



[illegible]

HL	HP	HPK	HPT	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
R03				R04			R05			R07				R08			
												29.8					
											1.4						
												59.7				366	
			152								38.1				188	120	
											0.6			10.5	363		23.3
											12.3		121	17.9	163		
				179								561					
			155								0.2						
			514								103						
			275								294						
												100					
											126		0				
											419		96.6				
									0.5		208		20.9				
				148								224					
			105								117	2.8	3.7	14.2	0.2		
			248		83.2				0		121		571	18.8	5.7		
			417		0				18.8		429		0.3	927	168		
											13.4						
											4.4						
											14.8						
		463															
				49.4							137						
														0.1			
											6.4			125			
				268					95		514		703	655			
				205					179		331		146	327			
									0.7				2.6				
											0.0			7.2			
		888									42.9			23.4			
											0.2		120	30.4			
									20.5		133		1.3	80.4			
										3.8							
										22.7	33.7		55.8	93.6			
										435	100		122	136	4.3		
											63						
											9.4						
											204				21.7		
											41.7						
											157						
				820							143			26.6			
											310	149				2.7	
									320		181		25.3	3.2			
											0.4						
											0.3	1.6					
				4.4	4						124	26.4			114		
				236						268	176		11.3	616			
											4.0				0.1		
											37.7						
										158	63.4			233			

[illegible]

HL	HP	HPK	HPT	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPT	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
R03				R04			R05			R07				R08			
	2.2																
	243																
											31.8						
											10.1						
				3.8							256				57.8		
										232	108			895	58.6		
										0.0							
												5.6					
											22						
												155					
													0.1				
											0.6						
											0.6						
											386	622					
				285						0.1	0.4			0.0			
											68.3			25.6			
				383						103	270			122	0.0		
										353	100			310			
											1.1						
0.6	925										30.8			48.8			
	0.0									107	3.7			420			
														0.7			
														112			
											71.9						
												10.2					
											0.1						
											652	549					
										0.1	474			25.1			
										251	0.2			227			
														0.5			

TABEL 17. | Ringkasan Luas per KPH Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program FOLU Netsink Priode 2023-2030

KPH	R01				R010		R0U				R012		R02		
	HI	HP	HPK	HPT	HP	HPK	HI	HP	HPK	HPT	HP	HPK	HP	HPK	
KPH Balangan					8106	10250	35187	212	6790				20	41	
KPH Cantung		7892					36712	676			237				
KPH HuluSungai					125	25069	24668			0					
KPH Kayu Tangi		0					14442	6		0					
KPH Kusan	0	267		323			55750	2		36	78	83			
KPH Pulau Laut Sebuk		185					596	190			1410	70			
KPHSengayam		5718	5451				79598	0							
KPH Tab.along				0			28150			7					
KPH Tabalong Kiwa		69		282			434-0			2					
KPH Tanah Laut	0	9708	215	112			1338	1			90	83			
Grand Total	0	23857	5666	718	8231	35318	280482	1087	6790	45	1775	236	20	41	

TABEL 18. | Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada KPH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030

Program	R01	R010	R011	R012	R02	
Kegiatan	Pencegahan Deforestasi Mineral	Restorasi Lahan Gambut	Perlindungan areal konservasi	Pengelolaan Mangrove	Pelaksanaan Restorasi	
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	
	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	
	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	
	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	
Indikator Capaian	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	
	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	
Pendanaan (dalam juta Rupiah)/ Ha	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	
	302.210	435.490	2.884.040	20.110	610	
Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Dishut, Dinas LH, Pemprov/Pemkab, NGO, APHI, masyarakat/KTH sekitar hutan					

	R03	R04	R05	R06	R07	R08
	Pencegahan deforestasi oleh konsesi	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan pengayaan Hutan alam	Penerapan RIL-C	Peningkatan cadangan karbon-Rotasi	Peningkatan cadangan karbon-Non Rotasi
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penanaman, Pemeliharaan, Pembangunan PUP hutan tanaman	Pemeliharaan dan Pengayaan	Penerapan RIL-C, tebang pilih	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan,
	Law Enforcement	Law Enforcement	Pembangunan PUP hutan alam	Penerapan SILIN	Pembangunan PUP hutan alam/tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
	Pemeliharaan, penanaman	Pembangunan PUP hutan tanaman	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Pengayaan	Penyuluhan, pelatihan PHL	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon meningkat
	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	2.667.570	825.630	50.040	1.370	2.280.670	793.350

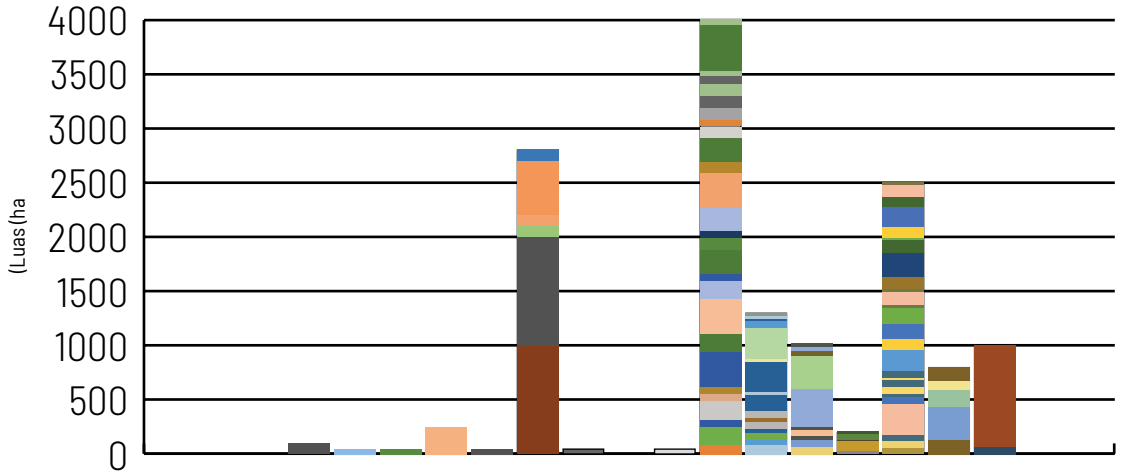
C. Kegiatan dan Target Rencana Operasional pada Perizinan Penggunaan

Kawasan Hutan (PPKH).

Salah satu skema perizinan di dalam kawasan hutan adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 46 unit PPKH dengan luasan total sebesar 12.965 ha. PPKH terbesar berada di areal PT Borneo Indobara seluas 4079 ha, selanjutnya PT Arutmin Ind seluas 1701 ha. Setiap pemegang PPKH di provinsi Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel 19. Dan Tabel 20. Tabel 21 dan Gambar 10 memuat seluruh kegiatan rencana aksi mitigasinya, selanjutnya dapat dilihat bahwa RO3, RO7 dan RO8 menjadi aksi mitigasi yang dominan karena cakupan luasannya yang terbesar pada kawasan hutan produksi bagi pemegang PPKH di Provinsi Kalimantan Selatan.

Aksi Pencegahan deforestasi (RO3) merupakan salah satu prioritas penting bagi semua pemangku kawasan, termasuk pemegang izin PPKH di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati areal seluas 2691 ha. Program mitigasi berupa pemeliharaan, penanaman, pengayaan maupun kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan pada areal tersebut, tentu saja tindakan penegakkan hukum perlu diperhatikan. Selanjutnya aksi RO7 yaitu Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi dapat dilakukan pada kawasan PPKH dengan luas 6636 ha. Program mitigasi yang dapat direncanakan berupa pembangunan PUP hutan alam, pemeliharaan dan pengayaan tanaman, serta penyuluhan dan pelatihan PHL. Sedangkan RO11 yaitu Perlindungan Areal Konservasi Tinggi berada pada luasan 3564 ha dengan program aksi penanaman pengayaan, pemberdayaan masyarakat untuk PHL maupun penegakkan hukum.

TABEL 19. | Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030



	HL	HP	HPk	HPT	HP	HPK	HP	
	R01				R01		R03	
					2			
XL Axiata Tbk - Pt - 6								
XL Axiata Tbk - Pc - 7								
XL Axiata Tbk - Pc - 8								
PT. Yiwon Mining - Pk - 6								
PT. Yiwon Mining - Hs - 6								
PT. Yiwon Mining - B - 6								
PT. Wira Bara Sakti - Pk - 7								
PT. Wira Bara Sakti - B - 7								
PT.Wahana Baratama M. - T - 7								
PT.Wahana Baratama M. - T - 6								
PT.Wahana Baratama M. - Pt - 8								
PT.Wahana Baratama M. - Pt - 6								
PT.Wahana Baratama M. - Pk - 8								
PT.Wahana Baratama M. - Pk - 7								
PT.Wahana Baratama M. - Pc - 8								
PT.Wahana Baratama M. - Pc - 6								
PT.Wahana Baratama M. - Ht - 6							47.8	
PT.Wahana Baratama M. - B - 8								
PT.Wahana Baratama M. - B - 7								
PT.Wahana Baratama M. - B - 6								
PT.Tunas Inti Abadi - Pk - 6								
PT.Tunas Inti Abadi - Ht - 6							219	
PT.Tunas Inti Abadi - Ht - 5							3.6	
PT.Tunas Inti Abadi - B - 7								
PT.Tunas Inti Abadi - B - 6								
PT.Tunas Inti Abadi - B - 5								
PT. Transcoal Minergy - Pc - 5								
PT. Suryaraya Permata K. - Hs - 5								
PT. Suryaraya Permata K. - B - 6								
PT. Sumber Daya Energi - Hs - 7	43.7							
PT. Sri Raya Persada - Pk - 7								
PT. Sri Raya Persada - Pc - 7								
PT. Sri Raya Persada - B - 7								
PT. Sebuku Iron L.O. T2 - Pt - 7								
PT. Sebuku Iron L.O. T2 - Pc - 7								
PT. Sebuku Iron L.O. T2 - B - 7								

	HP	HP	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04	R05	R07				R08			
				0.4						
					0.4					
				1.5						
				14.8				4,3		
								2,3		
				85.3				12.4		
					1.2					
									14.3	
									1,2	
								17.9		
					24.4					
				40.2				76.7		
					13.7					
					0,2					
					6.1					
				7.1						
									2.5	
								201		
								58,1		
				17.8						
								106		
								360		
								56.6		
				29.3						
										455
						9,6				
					0,3					
					0,6					
									4,0	
					1.3					
					65.7					
					308					

	HL	HP	HPk	HPT	HP	HPK	HP	
	R01				R01		R03	
					2			
PT. Sebuku Iron LO. - Tm - 6					0,0			
PT. Sebuku Iron LO. - Pt - 7								
PT. Sebuku Iron LO. - Pc - 7								
PT. Sebuku Iron LO. - Pc - 6					0,6			
PT. Sebuku Iron LO. - Hms - 6					8,1			
PT. Sebuku Iron LO. - Br - 6					0,4			
PT. Sebuku Iron LO. - B - 7								
PT. Satui Terminal U. - T - 7								
PT. Satui Terminal U. - T - 6								
PT. Satui Terminal U. - Pk - 8								
PT. Satui Terminal U. - Pk - 6								
PT. Satui Terminal U. - Pc - 6								
PT. Satui Terminal U. - B - 8								
PT. Satui Terminal U. - B - 6								
PT. Sasangga Banua B. - Pt _6								
PT Sasangga Banua B. - Hs - 6							70.3	
PT. Saraba Kawa - Pc - 6								
PT. Pelsart Tambang K. - Pt - 6								
PT. Pelsart Tambang K. - Pc - 6								
PT. Pelsart Tambang K. - Hs - 6								
PT. Pelsart Tambang K. - Hs - 5								
PT. Metalindo Bumi R. - Tm - 7						0,4		
PT. Metalindo Bumi R. - Tm - 6					2.7			
PT. Metalindo Bumi R. - Pt - 7								
PT. Metalindo Bumi R. - Pb - 7						6.2		
PT. Metalindo Bumi R. - Pb - 6					60,2			
PT. Metalindo Bumi R.- Hms - 7						3		
PT. Metalindo Bumi R.- Hms - 6					141			
PT. Metalindo Bumi R. - Br - 7						3.5		
PT. Metalindo Bumi R. - Br - 6					17.6			
PT. Metalindo Bumi R. - B - 7						3.9		
PT. Metalindo Bumi R. - B - 6					12.3			
PT. Mandiri Citra B. - Pc - 7								
PT. Mandiri Citra B. - B - 7								
PT. Karbon Mahakam - Pt - 7								
PT. Karbon Mahakam - Pb - 7						0,0		
PT. Karbon Mahakam - Pb - 6					1.4			
PT. Karbon Mahakam- Hms - 6					7.9			
PT. Karbon Mahakam - Br - 7						1.1		
PT. Karbon Mahakam - Br - 6					2.5			
PT. Karbon Mahakam - B - 7								
PT. Kalimantan Prima P. - PC - 6								
PT. Kalimantan Prima P. - Pb - 6								
PT. Kalimantan Prima P. - B - 6								
PT Kalimantan Energi L. - Pt - 6								
PT Kalimantan Energi L. - Pc - 7								
PT Kalimantan Energi L. - Hs - 7			8.2					
PT Kalimantan Energi L. - Hs - 6								
PT. Jorongbarutama G - T - 7								
PT. Jorongbarutama G - Pt - 7								
PT. Jorongbarutama G - Pk - 7								

	HP	HP	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04	R05	R07				R08			
					37,9					
				1,4	0,9					
								3,4		
				0,4						
									51,9	
					4,4			37,9		
				11,2						
				47,1						
								19,4		
				5,6						
								70,3		
				0,0						
	1.7			1.7						
				0,4						
								0,7		
							5,8			
					7.2					
								6,3		
					3.3					
					145					
				7,8						
					1.9			0,2		
								0,7		
					44,3					
					7,0					
			0,0							
			0,1			0,1				
			0,2							
				76,1				4,5		
					3,2				2,4	
								191		
	3.1							169		
								107		
				119				39,8		

	R01				R01		R03	
					2			
PT. Jorongbarutama G - Pc - 7								
PT. Jorongbarutama G - B - 7								
PT. Indonesian M&CM - Pk - 7								
PT. Indonesian M&CM - Pc - 7								
PT. Indonesian M&CM - B - 7								
PT. Indobara Bagas J. - B - 6								
PT. Indo kodeco C. - Tr - 6								
PT. Indo kodeco C. - Pk - 6								
PT. Indo kodeco C. - Pc - 6								
PT. Indo kodeco C. - Hs - 6								
PT. Indo kodeco C. - B - 6								
PT. Eternal Richway - Pk - 4								
PT. Energi Batubara L - T - 5								
PT. Energi Batubara L - Pt - 5								
PT. Energi Batubara L. - Ht - 5							75,9	
PT. Borneo Indobara - T - 7								
PT. Borneo Indobara - T - 6								
PT. Borneo Indobara - T - 5								
PT. Borneo Indobara - Pt - 6								
PT. Borneo Indobara - Pt - 5								
PT. Borneo Indobara - Pk - 6								
PT. Borneo Indobara - Pk - 5								
PT. Borneo Indobara - Pb - 5								
PT. Borneo Indobara - Ht - 6							108	
PT. Borneo Indobara - Ht - 5							118	
PT. Borneo Indobara - Hs - 6								
PT. Borneo Indobara - Hs - 5								
PT. Borneo Indobara - B - 7								
PT. Borneo Indobara - B - 6								
PT. Borneo Indobara - B - 5								
PT. Binuang Mitra B. - Pc - 5								
PT. Bhumi Rantau E. - Pt - 5								
PT. Bhumi Rantau E. - Pc - 5								
PT. Baramega Citra MP. - Pk - 6								
PT. Banjar Asri - Pt - 7								
PT. Pro Sarana C. - Pt - 5								
PT. Pro Sarana C. - Pc - 5								
PT. PLN - Pc - 9								
PT. Bahari Cakrawala S. - Pt - 7								
PT. Bahari Cakrawala S. - Pb - 6				3,5				
PT. Bahari Cakrawala S. - Hms - 6				3,5				
PT. Bahari Cakrawala S. - B - 7								
PT. Bahari Cakrawala S. - B - 6				0,6				
PT. Arutmin Ind. Senakin - T - 6								
PT. Arutmin Ind. Senakin - Pk - 6								
PT. Arutmin Ind. Senakin - Pc - 6								
PT. Arutmin Ind. Senakin - B - 6								
PT. Arutmin Ind. Asam2 - Tr - 8								
PT. Arutmin Ind. Asam2 - Pk - 8								
PT. Arutmin Ind. Asam2 - Pk - 7								
PT. Arutmin Ind. Asam2 - Pc - 7								

	R04	R05	R07				R08			
				26,6						
								165		
				0,2						
				1,2						
				3,6				0,2		
				70,2						
				18,3						
				10,1						
				184						
								56,6		
				130						
				0,0						
								0,3		
				7,7						
								1,2		
				0,1				25,7		1,4
						27,2		6,3		
				451						
				262				1,4		
				2,8						
				56,7		0,0				
						54,9				
				0,8						
				0,0						
		0,2				0,0		99,9		18,0
						252				
	4,5					423		1,7		
								72,2		
						39,1				
				0,0						
				25,9						
				143						
						22,2				
					10,5					
				5,3						
				4,3						
					2,3					
					7,3					
								7,3		
					42,7					
								7,1		
				307						
				42,2						
								15,2		
					1,7					
					7,8					
				7,8	48,9			0,0		
				4,7	65,1					

	HL	HP	HPk	HPT	HP	HPK	HP	
	R01				R01		R03	
					2			
PT. Arutmin Ind. Asam2 - B - 7								
PT. Arutmin Ind. - Tr - 8								
PT. Arutmin Ind. - T - 7								
PT. Arutmin Ind. - T - 6								
PT. Arutmin Ind. - Pt - 8								
PT. Arutmin Ind. - Pt - 7								
PT. Arutmin Ind. - Pt - 6								
PT. Arutmin Ind. - Pk - 8								
PT. Arutmin Ind. - Pk - 7								
PT. Arutmin Ind. - Pk - 6								
PT. Arutmin Ind. - Pc - 8								
PT. Arutmin Ind. - Pc - 7								
PT. Arutmin Ind. - Pc - 6								
PT. Arutmin Ind. - Pc - 5								
PT. Arutmin Ind. - Hs - 7	0,6			26,1				
PT. Arutmin Ind. - Hs - 6								
PT. Arutmin Ind. - Hs - 5								
PT. Arutmin Ind. - B - 8								
PT. Arutmin Ind. - B - 7								
PT. Arutmin Ind. - B - 6								
PT. Arutmin Ind. - B - 5								
PT. Antang GM. - Pt - 5								
PT. Antang GM. - Pc - 5								
PT. Antang GM. - Pb - 5								
PT. Antang GM. - B - 5								
PT. Angsana JE. - T - 8								
PT. Angsana JE. - Pt - 5								
PT. Angsana JE. - Pk - 5								
PT. Angsana JE. - Ht - 8								
PT. Adaro Ind. - Pt - 4								
PT. Adaro Ind. PK - 4								
PT. Adaro Ind. - Pc - 4								
Pemprov Kalsel - Pt - 6								
Pemprov Kalsel - Pm - 6								
Pemprov Kalsel - Pm - 5								
Pemprov Kalsel - Pc - 6								
Pemprov Kalsel - Pc - 5								
Pemprov Kalsel - Hs - 6								
Pemprov Kalsel - Hs - 5								
Pemprov Kalsel - B - 5								
Pemkab Tabalong - Pt - 5								
Pemkab Tabalong - Pk - 7								
Pemkab Tabalong - Pc - 7								
Pemkab Tabalong - Pc - 6								
Pemkab Tabalong - Pc - 5								
Pemkab Tabalong - Pc - 4								
Pemkab Tabalong - Hs - 6								
Pemkab Tabalong - Hs - 5								
Pemkab Tabalong - B - 7								
Pemkab Tabalong - B - 6								

	HP	HP	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04	R05	R07				R08			
								92,8	5,3	
					0,5					
									0,1	
								6,2		
					40,6					
				0,4						
				113				0,0		
					19,7				23,0	
					0,7	2,5				
				259		39,0		191		
					23,7				0,0	
				154	22,9	21,4	0,3	0,0		
				331				5,7		
				33,0						
				1,4				2,4		12,5
								3,5		
				0,8				13,1		
									67,5	
				1,0		75,1			135	
								51,6		
				4,2				16,3		
				24,9						
				4,9						
				0,0			0,0			
							0,0	4,3		
									80,1	
				0,6						
				0,3						
					0,2					
				0,0						
				0,0						
				0,0						
				127		2,1	0,9			
							0,1			
							0,1			
			0,4	13,8		0,0	35,2			
			4,9	59,4			7,1	46,3		2,4
							94,9	20,8		
			1,1				44,3			
			1,9				1,2			
							0,0			
				4,3						
				1,2						
				0,1						
				2,8						
						0,2				
								0,1		
							0,5	0,5		
	1,2			6,6						
							2,7			

	HL	HP	HPk	HPT	HP	HPK	HP	
	R01				R01		R03	
					2			
Pemkab Tabalong - B - 5								
Pemkab Tabalong - B - 4								
PD. Baratala Tuntung P. - Pc - 7								
PD. Baratala Tuntung P. - B - 7								
PD. Baramarta - Pt - 6								
PD. Baramarta - Pc - 6								
PD. Baramarta - B - 6								
CV. Sangga Borneo - B - 7								
Cv. Hidup Hidayah I. - Pt - 6								

	HP	HP	HL	HP	HPK	HPT	HL	HP	HPK	HPT
	R04	R05	R07				R08			
							4,2			
				0,1		0,9				
				30,4						
				121			2,2			
				9,2		0,8				
				3,4		34				
								1,3		9,7
				63,0		3,7				
				0,9						

TABEL 20. | Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di kalimantan Selatan Priode 2023-2030

[illegible]

25	PT Indonesian M&CM								5,0	0,2	
26	PT Jorongbarutama G			0		3,1			145,8	482,1	
27	PT Kalimantan Energi L								76,1	196,2	
28	PT Kalimantan Prima P	0,3									
29	PT Karbon Mahakam			15,1						0,7	
30	PT Mandiri Citra B								7,8	0,2	
31	PT Metalindo Bumi R			234,2						6,3	
32	PT Pelsart Tambang K		5,8			1,7			2,1	0,7	
33	PT Saraba Kawa								0,0		
34	PT Sasangga Banua B				70,3				5,6	70,3	
35	PT Satui Terminal U								58,3	57,3	
36	PT Sebuku Iron L0			9,1					1,8	3,4	
37	PT Sebuku Iron L0 T2										
38	PT Sri Raya Persada										
39	PT Sumber Daya Energi			43,7							
40	PT Suryaraya Permata K										
41	PT Transcoal Minergy								29,3		
42	PT Tunas Inti Abadi				223,2				17,8	523,3	
43	PT Wahana Baratama M				47,8				409,9	353,7	
44	PT Wira Bara Sakti										
45	PT Yiwan Mining								100,1	19,1	
46	XL Axiata Tbk								1,9		
47	PT Yiwan Mining										
48	XL Axiata Tbk			0							
Grand Total		0,6	8,6	199,5	43,7	265,9	2691,6	10,6	0,2	3972,7	2464,8

								5,1
								631,1
	8,2		3,2	2,4				286,1
						0,1		0,4
		1,1	53,2					70,0
								8,0
		17,0	155,6					413,1
								10,4
								0,0
								146,3
			4,4	64,3				184,4
			409,4					423,7
			375,6					375,6
			3,6	4,0				7,6
								43,7
						9,6	455,4	465,0
								29,3
								764,4
			44,4	3,8				859,6
			1,2	14,3				15,5
								119,1
			0,4					2,3
								119,1
								2,3
	8,2	18,1	1345,8	400,2	26,1	1009,1	499,6	12965,1



TABEL 21. | Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada PPKH di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030

Program	R01	R012	R03	R04	R05	R07	R08
Kegiatan	Pencegahan Deforestasi Mineral	Pengelolaan Mangrove	Pencegahan deforestasi oleh konsesi	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan pengayaan Hutan alam	Peningkatan cadangan karbon-Rotasi	Peningkatan cadangan karbon-Non Rotasi
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penanaman, Pemeliharaan, perlindungan	Pemeliharaan dan Pengayaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan
	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Pembangunan PUP hutan alam	Pembangunan PUP hutan alam/ tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pembangunan PUP hutan tanaman	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Penyuluhan, pelatihan PHL	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement
Indikator Capaian	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon meningkat
Pendanaan (juta Rp)/tahun	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	785	28.410	26.916	106	20	63.361	35.640
Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Dishut, Dinas LH,Pemprov/Pemkab, NGO, APHI, masyarakat/KTH sekitar						

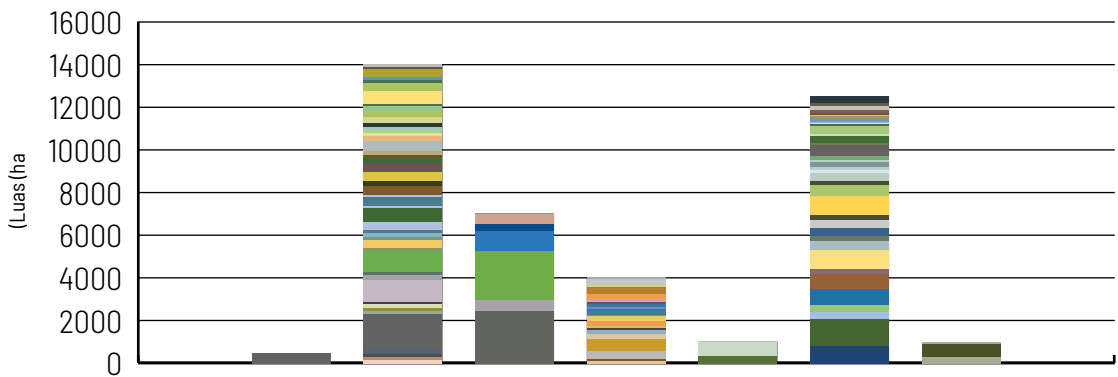
D. Kegiatan dan Target Rencana Operasional pada Perhutanan Sosial (PS)

Skema perizinan di dalam kawasan hutan yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat adalah Perhutanan Sosial (PS) dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kelompok Serba Usaha (KSU), Koperasi, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Tani (KT), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dll. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 179 unit PS dengan luasan total sekitar 91.731 ha yaitu melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebanyak 65 unit dengan luasan 17.342 ha, Kemitraan Kehutanan (KK) sebanyak 32 unit dengan luasan 6.020, Hutan Desa (HD) sebanyak 58 unit dengan luasan 60.473 ha, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 24 unit dengan luasan 7.896 ha, seperti yang disajikan pada Tabel 22 dan Tabel 23. Seluruh unit PS tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Strategi kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 diarahkan kepada areal KPHL Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) dan KPHP PIAPS dengan menjamin keberlanjutan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Kegiatan aksi mitigasi perhutanan sosial yang dilakukan pada kedua areal tersebut meliputi ENR (Enhanced Natural Regeneration/ Pengayaan Regenerasi Alami) dan Pembangunan Hutan Tanaman, serta didukung dengan upaya konservasi cadangan karbon dan pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat (alternative livelihood).

Perhutanan Sosial terbesar dikelola PS Muara Urie seluas 9877 ha, PS Bararawa 4872 ha dan PS Tampakang 4205 ha. Setiap pemegang PS di provinsi Kalimantan Selatan seperti Tabel 22, dan 23 memuat seluruh kegiatan rencana aksi mitigasinya, yaitu RO7 dan RO8 menjadi aksi mitigasi yang dominan (Tabel 24) karena cakupan luasannya yang terbesar pada kawasan HP, HPK dan HL

TABEL 22. | Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030



	APL	HP	HPK	HPT	SM	HL	TAHURA
	R07					R08	
KT GALAM R. & KT B. KURA - Pk - 7						9,09	
KT GALAM R. & KT B. KURA - Pc - 7	0,04					222,64	
KT GALAM R. & KT B. KURA - B - 7						147,00	
KT G. R. & KT B.K. - Pc - 7	0,01						
KT G. R. & KT B.K. - Pc - 7	0,01						
KT G. R. & KT B.K. - B - 7	0,00						
KT BUNGA SARI - Pc - 4	0,02						
KT BUNGA SARI - Hs - 4				96,63		139,2	
KT BUNGA SARI - B - 4				19,03		21,59	
KT BINA BERSAMA - Pc - 7				367,02		49,22	
KT BERKAT SANTOSA - Pc - 5	0,00					50,64	
KT BERKAT SANTOSA - Ht - 5	38,21	102,38				0,04	
KSU Jasa Mandiri - Pt - 7		25,83					
KSU Jasa Mandiri - Pc - 7		32,28					
KSU Jasa Mandiri - P - 7	0,00	258,77					
KSU Jasa Mandiri - Ht - 7		3,05					
KSU Jasa Mandiri - Hs - 7		43,02					
KSU Jasa Mandiri - Hs - 5		166,94					
KSU Jasa Mandiri - Pt - 13							
KSU Jasa Mandiri - B - 5		88,42					
KSU Jasa Mandiri - B - 8							
KPM Kuntum Melati - T - 7			35,50				
KPM Kuntum Melati - Pk - 7			137,56				
KPM Kuntum Melati - Pc - 7			106,71				
KPM Kuntum Melati - Hs - 7			9,57				
KPM Kuntum Melati - B - 7			196,45				
Koperasi Suka Maju - Pk - 7		45,48					
Koperasi Suka Maju - Pc - 7		14,32					
Koperasi Suka Maju - Pb - 7		1,05					
Koperasi Suka Maju - Ht - 7		49,74					
Koperasi Suka Maju - B - 7		503,44					
KOPERASI KARYA M. - Pk - 5		0,05					
KOPERASI KARYA M. - Hs - 5		0,02					0,00
KOPERASI KARYA M. - B - 5		0,75					
KOP. PRODUSEN KRJ - T - 5	0,00	0,51					0,00
KOP. PRODUSEN KRJ - Ht - 6		3,00					
KOP. PRODUSEN KRJ - Ht - 5		27,70					
KOP. PRODUSEN KRJ - Hs - 6		0,67					
KOP. PRODUSEN KRJ - Hs - 5	0,01	680,81					
KOP. PRODUSEN KRJ - B - 5	0,01	14,65					
KOP. KARYA MANDIRI - Pk - 5		4,07					
KOP. KARYA MANDIRI - Hs - 5		172,22					
KOP. KARYA MANDIRI - B - 5		56,87					
Kop Rimba Raya - Pb - 5				28,17			
Kop Rimba Raya - Hs - 5				315,49			
Kop MBB - Pb - 7		13,41					
Kop MBB - Pb - 6		2,33					

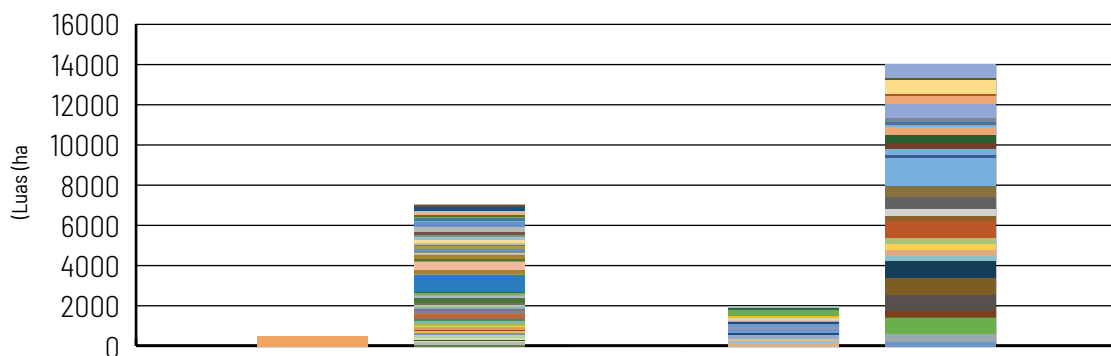
	APL	HP	HPk	HPT	SM	HL	TAHURA
		R07				R08	
Kop MBB - Pb - 5		7,43					
Kop MBB - Hs - 5		344,59					
Kop MBB - B - 6		0,17					
Kop MBB - B - 5		117,42					
Kop Maju Terus Jaya - Pb - 5				9,49			
Kop Maju Terus Jaya - Hs - 5				310,42			
Kop Maju Terus Jaya - B - 5				5,76			
Kop Mahkota Banus B - T - 7		3,27					
Kop Mahkota Banus B - Hs - 7		160,50					
Kop Mahkota Banus B - Hs - 6		5,51					
Kop Mahkota Banus B - B - 7		39,57					
Kop Hutanmas - T - 5							49,23
Kop Hutanmas - Pc - 6		69,27					
Kop Hutanmas - Ht - 6		295,16					
Kop Hutanmas - Ht - 5							80,02
Kop Hutanmas - B - 6		112,98					
Kop Gemah Ripah - T - 7		7,56					
Kop Gemah Ripah - Ht - 7		175,96					
Kop Gemah Ripah - B - 7		315,77					
Kop Bukit Barisan Jaya - Hs - 6				15,98			
Kop Bukit Barisan Jaya - Hs - 5				310,41			
Kop Budi Sejahtera - T - 5				29,25			
Kop Budi Sejahtera - Pb - 5				55,31			
Kop Budi Sejahtera - Hs - 6				0,27			
Kop Budi Sejahtera - Hs - 5				251,22			
Kop Budi Sejahtera - B - 5				39,39			
Kop BKM - Pb - 5				28,60			
Kop BKM - Hs - 5				296,59			
Kop Berkat Jaya Abadi - T - 5		1,64					
Kop Berkat Jaya Abadi - Hs - 5		99,30		230,51			
Kop Berkat Jaya Abadi - B - 5	0,00	4,85					
Kop Akar Perjuangan - Ht - 7		417,91					
Kop Akar Perjuangan - B - 7		85,16					
Kindingan - Pc - 7	0,01						
Kindingan - Pc - 5						205,23	
Kinarum - Pk - 5		204,42				102,22	
Kinarum - Pk - 4		33,61				0,01	
Kinarum - P - 4		0,00					
Kinarum - B - 4		114,78				44,71	
Kemitraan Solan (KTH-GH) - P - 4		183,99		59,65		108,51	
Kemitraan Solan (KTH-GH) - Pc - 5		0,01					
Kemitraan Pangelak - Hs - 4						58,07	
Kemitraan Pangelak - B - 4		0,0,				251,21	
Kelompok KKMB - Tm - 6					0,07		
KEL. MPG SUKA MAJU - Sw - 6	9,20					100,99	
KEL. MPG SUKA MAJU - Br - 6						15,07	
Kel. KKSM - Tm - 6					415,06		
Kel. KKSM - Hms - 6					10,51		
Kel. KKSM - Br - 6					0,16		
Kel. KKMB - Tm - 6					381,77		
Kel. KKMB - Pt - 6					8,24		
Kel. KKMB - Hms - 6					6,64		
Kel. KKMB - Br - 6					15,81		
Karya Indah - Pc - 5						1,03	
Karya Indah - Hs - 6		0,01				0,00	

	APL	HP	HPk	HPT	SM	HL	TAHURA
	R07					R08	
Kel. KKSM - Br - 6					0,16		
Kel. KKMB - Tm - 6					381,77		
Kel. KKMB - Pt - 6					8,24		
Kel. KKMB - Hms - 6					6,64		
Kel. KKMB - Br - 6					15,81		
Karya Indah - Pc - 5						1,03	
Karya Indah - Hs - 6		0,01				0,00	
Karya Indah - Hs - 5		0,00				279,79	
Karya Indah - B - 6		0,00				0,01	
Karya Indah - B - 5		0,00				156,69	
Kampung Baru - Pt - 5		12,15					
Kampung Baru - Pt - 4		92,75					
Kampung Baru - Pk - 7							
Kampung Baru - Pk - 5		182,90					
Kampung Baru - Pk - 4		58,67					
Kampung Baru - Pc - 5		325,16					
Kampung Baru - Pc - 4		123,28					
Kampung Baru - B - 5							
Jombang Prima A. - T - 5				82,46			
Jombang Prima A. - Pk - 5				0,08			
Jombang Prima A. - Pb - 5				139,90			
Jombang Prima A. - Hs - 5				23,27			
Jombang Prima A. - B - 5				169,51			
Jasling Riam Milur - Pc - 5		2,33					
Jasling Riam Milur - Pc - 4		0,00					
Jasling Riam Milur - B - 5		47,32					
Jasa Budi Sejahtera - Hs - 6				1,93			
Jasa Budi Sejahtera - Hs - 5				443,87			
Jasa Budi Sejahtera - B - 5		0,00		2,30			
Hutan Desa Sapala - T - 5			3,61				
Hutan Desa Sapala - Rw - 5		426,04	609,86				
Hutan Desa Sapala - Br - 8		0,00					
Hutan Desa Sapala - Br - 5			160,08				
Hinas Kanan - Pc - 7	1,99			0,00			
Hinas Kanan - Pc - 6				462,52			
Hinas Kanan - Pc - 5				97,81			
Haruyan Dayak - Pc - 7	0,25						
Haruyan Dayak - Pc - 5		917,84		112,73		312,62	
Haruyan Dayak - Hs - 5						2,48	
Haratai - Pk - 5						125,91	
Haratai - Pc - 5	0,01					471,32	
Haratai - B - 5	0,05					103,91	
HARAPAN BINJAI SEJAHTERA - Pk - 7						29,96	
HARAPAN BINJAI SEJAHTERA - Pc - 7						282,53	
HARAPAN BINJAI S. - Pk - 7	0,00					91,99	
HARAPAN BINJAI S. - Pc - 7	0,00					65,10	
Hantanung Jaya - Pt - 5		55,50					
Hantanung Jaya - Pc - 6		45,23					
GAPOKTANHUT THS - Hs - 7	0,08					147,27	
GAPOKTANHUT TELAGA L. - Sw - 7						0,61	
GAPOKTANHUT TELAGA L. - Pc - 7	0,01					104,25	

	APL	HP	HPk	HPT	SM	HL	TAHURA
	R07					R08	
GAPOKTANHUT TELAGA L. - B - 7						51,73	
GAPOKTANHUT T.H.S. - Hs - 7						1,21	
GAPOKTANHUT HIDUP M - Pt - 7	0,00					10,71	
GAPOKTANHUT HIDUP M - Pc - 7	0,01					148,82	
GAPOKTANHUT D - Pt - 7	0,00					6,79	
GAPOKTANHUT D - Pc - 7	0,01					70,45	
GAPOKTANHUT D - B - 7	0,00					72,08	
GAPOKTANHUT TAMIANG TINGGI - T - 7	0,03						
GAPOKTANHUT TAMIANG T. - T - 7						31,83	
GAPOKTANHUT TAMIANG T. - Pt - 7						0,02	
GAPOKTANHUT TAMIANG T. - Pc - 7	0,02					337,22	
Gapoktan Sumber Kehidupan - Pk - 7						0,02	
Gapoktan Sumber Kehidupan - Pc - 7							
GAPOKTAN SUMBER K. - Pt - 7	0,00						
GAPOKTAN SUMBER K. - Pk - 7	0,00						
GAPOKTAN SUMBER K. - Pb - 7							
GAPOKTAN SUMBER K. - B - 7	0,00						
Gapoktan S. Kehidupan - Pk - 7	0,12						
Gapoktan S. Kehidupan - Pc - 7	0,02						
GAPOKTAN S.K. - Pt - 7	0,01						
GAPOKTAN S.K. - Pk - 7	0,00						
GAPOKTAN S.K. - Pb - 7	0,00						
GAPOKTAN S.K. - B - 7	0,08						
Gapoktan S. Kehidupan - Pc - 7						0,04	
GAPOKTAN MST - Pc - 6							2,06
GAPOKTAN MST - Pc - 6						498,42	
GAPOKTAN KAKAO - Pc - 6	20,65	79,08					
Gapoktan Hutan Lestari - Pt - 7		124,10				39,36	
Gapoktan Hutan Lestari - Pt - 5							0,02
GAPOKTAN HUTAN HARAPAN B. - Hs - 6						335,43	
GAPOKTAN HHB - Sw - 6		3,65					
GAPOKTAN HHB - Pt - 6		99,07				0,82	
GAPOKTAN HHB - Pc - 6		10,68				11,02	60,93
GAPOKTAN HHB - Hs - 6		97,39					24,33
GAPOKTAN HHB - B - 6		21,24					18,12
Gapoktan CT II - Pk - 5		241,66					
Gapoktan CT II - B - 5		318,26					
Gapoktan CT I - Pk - 5		8,70					
Gapoktan CT I - B - 5		18,04					
Gapoktan Cahaya Tani II - Pk - 5		6,81					
Emil Baru - Pt - 7	0,27					91,82	
Emil Baru - Pc - 7	0,84					13,16	
Emil Baru - Hs - 7						29,87	

	APL	HP	HPk	HPT	SM	HL	TAHURA
	R07					R08	
Emil Baru -B - 7						18,66	
Desa Tampakang - Rw - 8		0,58					
Desa Tampakang - Rw - 6		0,57					
Desa Tampakang - Rw - 5		756,13	2604,88				
Desa Tampakang - Br - 8		71,88					
Desa Tampakang - Br - 6		0,06					
Desa Tampakang - Br - 5		266,05	500,28				
Dayak Satui Mandiri - Pk - 7				0,00			
Dayak Satui Mandiri - Hs - 7				0,36			
Dayak Satui Mandiri - B - 7				100,63			
Dayak Pitap - Pc - 5		0,48				364,33	
Dayak Pitap - Hs - 5		0,18				1126,60	
Dayak Pitap - B - 5						31,21	
Datar Ajab - Pc - 6	0,07			78,44		86,85	
Datar Ajab - Pc - 5	0,15	7,00		21,44		62,10	
Datar Ajab - Hs - 6				37,74			
Datar Ajab - Hs - 5				0,18			
Datar Ajab - B - 6				6,50			
Cantung Kanan - Pc - 6						244,11	
Cantung Kanan - Pb - 6						233,93	
Cantung Kanan - Hs - 6						840,53	
Cantung Kanan - B - 6						496,40	
CHAYA DAYAK PITAP - T - 6		2,26					
CAHAYA DAYAK PITAP - Pc - 7	0,12						
CAHAYA DAYAK PITAP - Pc - 6		584,91				0,21	
CAHAYA DAYAK PITAP - Pc - 5		0,25					
CAHAYA DAYAK PITAP - Hs - 6		4,79				0,10	
CAHAYA DAYAK PITAP - Hs - 5		0,02					
Burum - Pt - 7		3,58					
Burum - Pt - 4		63,54					
Burum - Pk - 9			10,03				
Burum - Pk - 8		3,12					
Burum - Pk - 7		155,07	30,05				
Burum - Pk - 6		1,68					
Burum - Pk - 4		49,77	1,45				
Burum - Pc - 8		0,00					
Burum - Pc - 7		0,00					
BUMI PRIANGAN - Pk - 7	0,41					42,82	
BUMI PRIANGAN - B - 7	0,71					288,00	
Bukit Barisan Jaya - Hs - 6				0,89			
Bukit Barisan Jaya - Hs - 5				1,79			
Bintang Ara - Pk - 4		198,35					

	APL	HP	HPk	HPT	SM	HL	TAHURA
	R07					R08	
Binjai -B -7		1,14					
Binjai -B -6		0,71					
Binjai -B -5		100,74					
Bindang Makmur - Pc -5		42,88					
Bersama Kita Membangun - Hs- 5				3,99			
Berkat Jaya Abadi - T - 5	1,99	0,04					
Berkat Jaya Abadi - Hs - 5	0,08	0,02		4,55			
Berkat Jaya Abadi - B - 5	1,52	0,00					
Batuah - Hs - 5						1421,40	
Batuah - B - 5						73	
Barawa - T - 5			76,98				
Barawa - Rw - 5	0,81	2307,06	1962,14			76,98	
Barawa - P - 5	0,24		1,78		2307,06	1962,14	
Barawa - Br - 5	7,53	120,73	357,34			1,78	
Bangkalan Melayu - Pk - 6	1,01				120,73	357,34	
Bangkalan Melayu - Pc - 6						73,30	
Bangkalan Melayu - Hs - 6	8,50					150,41	
Bangkalan Melayu - B - 6	3,98					0,92	
Ajung - Pc - 6		253,78				0,47	
Ajung - Pc - 5		0,13				0,04	



	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
Mahkota Benua Bersujud - Hs - 7		3,69			
Mahkota Benua Bersujud - Hs - 6		3,70			
Mahkota Benua Bersujud - Hs - 5		11,68			
Mahkota Benua Bersujud - B - 7		1,40			
Mahkota Benua Bersujud - B - 6		0,40			
Mahkota Benua Bersujud - B - 5		10,01			
Lumbang - Pt - 5		0,04			
Lumbang - Pc - 5		304,43			34,18
Lumbang - Hs - 4	0,01			5,86	1447,19
Lumbang - B - 4					14,38
LPHD Teluk Sirih - Pk - 7		12,96			
LPHD Teluk Sirih - Pk - 6		0,01			
LPHD Teluk Sirih - Ht - 7		142,10			
LPHD Teluk Sirih - Ht - 6	0,00	0,08			
LPHD Teluk Sirih - B - 7		48,24			
LPHD Teluk Sirih - B - 6	0,01	0,15			
LPHD Sepapah - Pc - 6	0,04	14,90			
LPHD Sepapah - Pb - 7		20,48			
LPHD Sepapah - Pb - 6		0,13			
LPHD Sepapah - B - 7		108,20			
LPHD Sepapah - B - 6	0,14	0,00			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
LPHD Santuun - Pk - 5		245,35			
LPHD Santuun - Pk - 4		13,97			
LPHD Santuun - B - 5		251,79			
LPHD Santuun - B - 4		0,88			
LPHD PADAWANYI - Sw - 7	0,00				3,13
LPHD PADAWANYI - Pk - 7	0,00				0,00
LPHD PADAWANYI - Pc - 7	0,38				384,41
LPHD PADAWANYI - B - 7					1,57
LPHD Langkang Lama - Pt - 6	0,01	80,65			
LPHD Langkang Lama - Pk - 6		25,18			
LPHD Embun Meratus - Pc - 6				24,15	
LPHD Embun Meratus - Pc - 5		29,16		322,83	
LPHD Embun Meratus - Hs - 5				1,10	
LPHD Embun Meratus - B - 5				122,85	
LPHD BINJAI - Pk - 7	0,02				
LPHD BINJAI - Pk - 5		5,69			
LPHD BINJAI - Pk - 4		76,01			
LPHD BINJAI - B - 7		0,35			
LPHD BINJAI - B - 5		99,13			
LPHD BINJAI - B - 4		159,64			
LPHD Batu Tangga - Pc - 6				60,13	198,37
LPHD Batu Tangga - Hs - 6				82,92	
LPHD Batu Tangga - B - 6				48,92	29,63
Liyu - Pc - 5					367,79
Liyu - Hs - 5					1213,30
Liyu - Hs - 4					0,74
Liyu - B - 5					142,83
Liyu - B - 4					0,49
Limpsho - Pt - 6				0,0	
Limpsho - Pc - 7	0,00				
Limpsho - Pc - 6	5,48			400,57	97,87
Limpsho - B - 6				3,44	
Libungan - Hs - 6		0,01			98,45
Lano - Pc - 4		0,00		0,00	408,98
Lano - Hs - 4				0,00	458,05

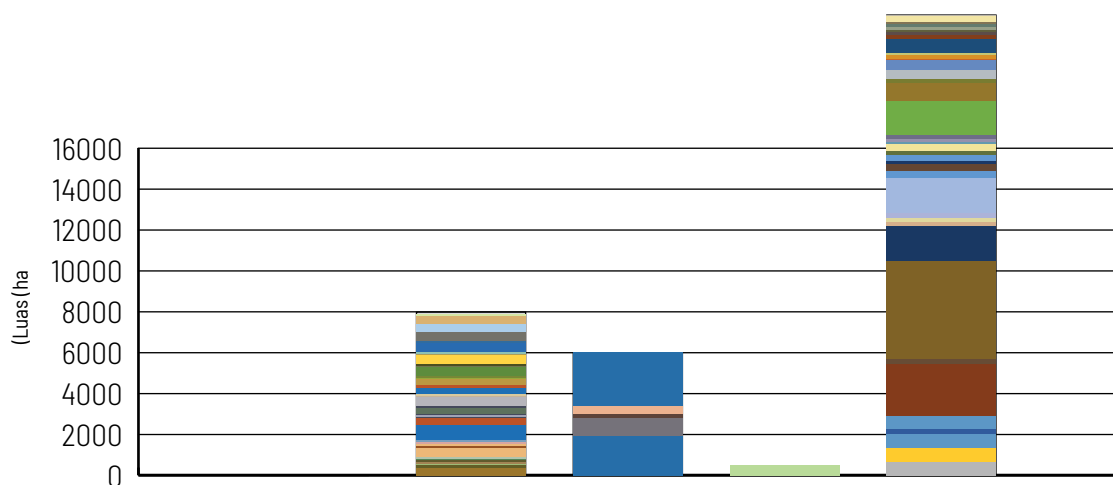
	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
Lano - B - 4				0,00	39,28
Lalapin - Pc - 6	0,02				18,06
Lalapin - Hs - 6		0,0			65,08
Lalapin - B - 6	0,01				64,28
Laburan - Pt - 6					26,63
Laburan - Pc - 6					280,94
Laburan - Hs - 6	0,02				2580,68
Laburan - B - 6					146,49
KTHN GUNUNG BATUAH - Pk - 7	0,00				
KTHN GUNUNG BATUAH - Pk - 4		89,91			
KTHN GUNUNG BATUAH - B - 7	0,30				
KTHN GUNUNG BATUAH - B - 4		17,21			
KTH Tangga Limpang - Pc-4		84,04			
KTH BINJAI SEJAHTERA - Pk - 6		6,88			
KTH BINJAI SEJAHTERA - Ht - 6		52,62			
KTH BARAK8 - Ht - 6		84,87			
KTH MAJU BERSAMA - Pc - 6	0,00	0,07			
KTH MAJU BERSAMA - Pc - 5		140,40			
KTH BURA LINO - Ht - 6		72,95			
KTH WATU MARUNG - Pk - 5		167,70			
KTH WATU MARUNG - B - 5		23,17			
KTH WANA SEJAHTERA - Pc - 5		80,46			
KTH TELAGA BIDADARI - Pt - 4					10,14
KTH TELAGA BIDADARI - Ht - 4					0,18
KTH TELAGA BIDADARI - B - 4					43,65
KTH Sumber Rejeki - T - 7		9,83			
KTH Sumber Rejeki - Pc - 7		143,54			
KTH Sumber Rejeki - Hs - 7		17,95			
KTH SULANGAI JAYA - Pc - 5		1,17			
KTH SULANGAI JAYA - Pc - 4		11,63			
KTH SULANGAI JAYA - Hs - 6		0,00			
KTH SULANGAI JAYA - Hs - 4		2,79			0,02
KTH SULANGAI JAYA - B - 6		0,00			
KTH SULANGAI JAYA - B - 5		60,35			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
KTH SULANGAI JAYA - B - 4		89,16			7,37
KTH SUBUR - Sw - 7					5,23
KTH SUBUR - Pt - 7					1,35
KTH SUBUR - Pk - 7	0,00				0,04
KTH SUBUR - Pc - 7					224,17
KTH REJEKI ABADI - Pt - 5		0,52			
KTH REJEKI ABADI - Pc - 5		249,60			
KTH REJEKI ABADI - Pc - 4		1,94			
KTH Paskel - Ht - 6	35,70				
KTH PARAPAHING BJ - Pc - 7		1,29			
KTH PARAPAHING BJ - Pc - 6		139,32			
KTH PARAPAHING BJ - Pb - 7		17,19			
KTH PARAPAHING BJ - Pb - 6		26,04			0,00
KTH PARAPAHING BJ - B - 7		28,00			
KTH PAPAGARAN BERSATU - Pc - 7	0,01				
KTH PAPAGARAN BERSATU - Pc - 5				395,99	0,00
KTH MUNGKUR JARING - Pt - 5					0,53
KTH MUNGKUR JARING - Pc - 5					39,75
KTH MUNGKUR JARING - B - 5					109,99
KTH MITRA KARYA - Pc - 5	14,40	13,70			
KTH MITRA KARYA - Pb - 5	0,06				
KTH MITRA KARYA - B - 5		98,15			
KTH MHH dan Rangkang II - Pc - 5				0,0	9,98
KTH MHH dan Rangkang II - Pc - 4					2,71
KTH MHH dan Rangkang II - P - 4					2,16
KTH MHH dan Rangkang II - Hs - 5				58,27	
KTH MHH dan Rangkang II - Hs - 4				0,71	
KTH MHH dan Rangkang II - B - 5				217,58	348,91
KTH MHH dan Rangkang II - B - 4				5,63	
KTH MARUSUNG JAYA - Pk - 4				2,92	
KTH MARUSUNG JAYA - Hs - 4				66,56	
KTH MARUSUNG JAYA - B - 4				139,81	
KTH MAJU BERSAMA - Pc - 5		38,85			
KTH MAJU BERSAMA - B - 5		10,96			
KTH MADU LESTARI - Pc - 6	0,23	39,99			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
KTH M.H.H. dan Rangkang II - Hs - 5					94,29
KTH LIYU MEMBANGUN - Pc - 7	0,01				
KTH LIYU MEMBANGUN - Pc - 5		997,30			19,30
KTH LIYU MEMBANGUN - Hs - 5		3,07			1,08
KTH LEMBAH P. - Pc - 4				23,75	
KTH LEMBAH P. - Hs - 4				48,50	
KTH LEMBAH P. - B - 4		0,39		34,38	
KTH Kepayang Karya Yakin - T - 7		1,31			
KTH Kepayang Karya Yakin - T - 5		6,45			
KTH Kepayang Karya Yakin - Pk - 7		8,85			
KTH Kepayang Karya Yakin - Pk - 5					
KTH Kepayang Karya Yakin - Pc - 6	0,00		0,00		
KTH Kepayang Karya Yakin - Pc - 5	0,00	3,99	0,00		
KTH Kepayang Karya Yakin - B - 7		7,68			
KTH Kepayang Karya Yakin - B - 5		4,87			
KTH Keluarga Bersatu - Hs - 7		420,32			
KTH Keluarga Bersatu - Hs - 6	0,02				
KTH KARAMO BERSINAR - Pc - 7	0,06				
KTH KARAMO B. - Pc - 5		67,21		13,22	
KTH KARAMO B. - Pc - 4				67,07	
KTH KARAMO B. - Hs - 4				3,35	
KTH Kanaan - Pc - 7	0,01				
KTH Kanaan - Pc - 4		48,95			
KTH Kanaan - P - 7	0,05				
KTH Kanaan - P - 4		1,08			
KTH HARAPAN JAYA - Hs - 7		88,23			
KTH HARAPAN JAYA - Hs - 6		1,29			
KTH HARAPAN JAYA - B - 7		403,68			
KTH HARAPAN JAYA - B - 6		1,15			
KTH HARAPAN JAYA - B - 4		0,94			
KTH HAMPANG LESTARI - Pc - 6		116,71			
KTH HAMPANG LESTARI - Hs - 6		8,67			
KTH HAMPANG LESTARI - B - 6		0,18			
KTH HAMPANG BERCAHAYA - Hs - 5					25,10

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
KTH HAMPANG BERCAHAYA - B -5					74,79
KTH GUNUNG UWAR - Pc -5		0,02			
KTH GUNUNG UWAR - Pc -4		93,81			
KTH GUNUNG LURUS - Pc -7					173,22
KTH Gunung Birah - Pk - 7					0,01
KTH Gunung Birah - Pc - 7					250,51
KTH GENERASI PEMUDA - Pt - 7					0,01
KTH GENERASI PEMUDA - Pc - 7					18,33
KTH GENERASI PEMUDA - B - 7	0,01				27,99
KTH GAWI M. & KT G.G. MAKMUR - Pc - 7					72,88
KTH GAWI M. & KT G.G. MAKMUR - B - 7					47,40
KTH G.M. DAN KT G.G.M. - Pk - 7		0,00			
KTH G.M. DAN KT G.G.M. - Pc - 7		105,58			
KTH G.M. DAN KT G.G.M. - B - 7		22,82			
KTH G.M. & KT G.G.M. - Pc - 7	30,94				
KTH BINA JAMBANGAN - Pc - 6	0,03				0,38
KTH BINA JAMBANGAN - B - 6	0,17				100,70
KTH BERSATU PADU - Pc - 6		58,08			
KTH BERKAT SEKUMPUL - Hs - 7	0,08				52,14
KTH Batuah Jaya - Pc - 6		0,08			
KTH Batuah Jaya - Pc - 5		164,56			
KTH Batuah Jaya - Hs - 5		254,30			
KTH Batuah Jaya - B - 5		57,33			
KTH BATU TUNGKU - Pc - 5	0,02	148,51			
KTH BATU TUNGKU - Ht - 5		17,07			
KTH BATU PUTIH - Pc - 5	1,15	58,49			
KTH BATU PUTIH - B - 5		7,74			
KTH AJUNG - Pc - 6		123,44			0,36
KTH AJUNG - Pc - 5		0,95			678,51
KTH AJUNG - Hs - 5					41,23
KTH AJUNG - B - 6		40,99			
KTH AJUNG - B - 5					140,82
KTH AHAN - Pc -5					228,09
KTH : Siola - Ht - 6		35,93			
KTH : Sejahtera Indah - Ht - 6		27,91			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
KTH : Sejahtera Indah - B - 6		1,39			
KTH : Jatuh Bangun - Pk - 8		0,03			
KTH : Jatuh Bangun - Ht - 8		21,04			
KTH : Jatuh Bangun - Ht - 6		6,21			
KTH : Harmonnis - Ht - 8		38,90			
KTH : Harmonnis - Ht - 6		85,73			
KT TAMPUTUK CS - Pc - 5		200,91			
KT SUKA MAJU - T - 5					5,27
KT SUKA MAJU - Pc - 5		4,97			0,37
KT SUKA MAJU - B - 5	0,36	39,31			130,75
KT SUKA M. & KT KARYA J. - Pt - 7	1,08				36,82
KT SUKA M. & KT KARYA J. - Pc - 7	0,02				0,17
KT SUKA M. & KT KARYA J. - B - 7	0,22				41,88
KT S. MAKMUR & KT KARYA J. - B - 7		0,89			
KT S. MAKMUR & KT K. JAYA - Hs - 7					1,77
KT S. MAKMUR & KT K. JAYA - B - 7	0,25				



	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
Wana Mitra Sejahtera - Ht - 5					23.7
Wana Mitra Sejahtera - B - 5		3.33			123.65
WANA MAKMUR- Pt- 7					2.79
WANA MAKMUR- Pc- 7	0.02				78.87
Vertek Perhutanan Sosial - T - 7			5.57		
Vertek Perhutanan Sosial - T - 5			4		
Vertek Perhutanan Sosial - Rw - 5			70.2		
Vertek Perhutanan Sosial - Hs - 6					48.72
Vertek Perhutanan Sosial - Hs - 5					177.19
Vertek Perhutanan Sosial - Br - 7			10.18		
Vertek Perhutanan Sosial - Br - 5			2332.38		
Vertek Perhutanan Sosial - B - 6		0.00			25.12
Vertek Perhutanan Sosial - B - 5		0.15			49.12
Uwie - Pk -7	0.09	0.71			
Uwie - Pk -4		186.06			
Uwie - B -4		138.78			
Usulan PS Pupuh - Pc - 4		0.00			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
Uren - Pt - 6					0.00
Uren - Pt - 5		0.23			25.1
Uren - Pc - 6		0.00			0.00
Uren - Pc - 5		0.07			237.33
Uren - B - 5					236.42
Ulang - Pc - 6	2	12.42			1354.52
Ulang - Hs - 5		0.74			20.49
Ulang - B - 5					1.28
Tuhuran - Rw - 5	0.00		18.02		
Tuhuran - Br - 7			0.02		
Tuhuran - Br - 5			309.66		
TEMBENG MEMBANGUN - Hs - 7		149.29			
TEMBENG MEMBANGUN - B - 7		15.52			
Teluk Kemuning - Pt - 6					3.11
Teluk Kemuning - Pc - 6					163.88
Teluk Aru - Pt - 6					0.23
Teluk Aru - Pc - 6					121.6
Tamunih - T - 5					10.68
Tamunih - Hs - 6					0.75
Tamunih - Hs - 5					522.98
Tamunih - B - 6					0.31
Tamunih - B - 5					343.29
Tambak Sari Panji - Rw - 5			56.7		
Tambak Sari Panji - Br - 5			18.25		
Sungai Bakar - Pt - 5					69.09
Sungai Bakar - Pc - 6					9.11
Sungai Bakar - Pc - 5					716.12
Sungai Bakar - P - 6					0.19
Sungai Bakar - P - 5					0.06
Sungai Bakar - Hs - 6					0.01
Sungai Bakar - Hs - 5					2200.81
Sungai Bakar - B - 5					136.81
SRI REJEKI - Pt - 7					20.91
SRI REJEKI - Pk - 7	0.00				17.63

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
SRI REJEKI - Pc - 7					0.00
SRI REJEKI - B - 7	0.00				179.16
Sidando - Pc - 6					0.00
Sidando - Pc - 5					67.20
Sidando - Hs - 5					153.32
Sidando - B - 6					0.00
Sidando - B - 5					81.36
Sehurai Bersama - Pb - 5	0.03	0.00			7.27
Sehurai Bersama - B - 5	0.12				141.38
Sapala - T - 5			71.06		
Sapala - Sw - 5			0.10		
Sapala - Rw - 5	0.45	377.26	835.15		
Sapala - P - 5	1.05		1.84		
Sapala - Br - 5	13.53	265,,85	1630.61		
SAKATALU BERKARYA - Pc - 7	0.01	53.94			5.12
SAKATALU BERKARYA - B - 7		49.1			97.47
RPH Tebing Tinggi - Pc - 6		743.32			5.08
RPH Tebing Tinggi - Pc - 5					2.73
RPH Tebing Tinggi - Hs - 6		26.23			
RPH Tebing Tinggi - Hs - 5					72.71
RPH Tebing Tinggi - B - 6		49.25			
RPH Tebing Tinggi - B - 5					100.71
PRH Halong - Hs - 6					0.00
PRH Halong - Hs - 5		0.0			180.49
PRH Halong - Hp - 5					112.07
PRH Halong - B - 5					24.96
Rimba Raya - Hs - 5				29.25	
Pulantani - Rw - 5			63.28		
Pulantani - Br - 5			181.74		
Pudi Seberang - Pc - 7		21.14			
Pudi Seberang - Pc - 6		5.94			
Pudi Seberang - Br - 6		10.08			
Pudi Seberang - B - 7		576.98			
Pudi Seberang - B - 6		0.03			
PS Pupuh - Pc - 4		198.85			
PS Pupuh - Hs - 4		3.45			
PS Pupuh - B - 4		106.21			
PS Mangkupum - Pk -5		211.69			

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
PS Mangkupum - Pk -4		0.78			
PS Mangkupum - Pc -5		9.69			
PS Mangkupum - Pc -4		7.43			
PS Mangkupum - B -5		674.82			
PS Lok Batu - Sw - 4		1.90			
PS Lok Batu - Pt - 4		22.23			
PS Lok Batu - Pk - 7	0.05				
PS Lok Batu - Pk - 4		50.65			
PS Lok Batu - Pc - 7	0.04				
PS Lok Batu - Pc - 4		222.4			
PKTH PENEPEH LESTARI - T - 4		19.61			
PKTH PENEPEH LESTARI - Pk - 4		16.93			
Perhutanan Sosial - Pc - 6	0.01				0.03
Perhutanan Sosial - B - 6	0.02				0.02
Pengajuan PS - Pt - 6	16.16				15.52
Pengajuan PS - Pc - 6	7.75	0.01			15.50
Pengajuan PS - Hs - 6					0.33
Pengajuan PS - B - 6	0.62	0.93			409.71
Patikalian - Pc - 5				390.25	
Paramasan Atas - Pc - 6	8.70				959.16
Paramasan Atas - Pb - 6	1.36				94.19
Paramasan Atas - Hs - 6					88.97
Paramasan Atas - B - 6					68, 48
Pantai Baru - Pk - 6					110.32
Panaan - Hs - 7		32.89			
Panaan - B - 7		50.39			
Panaan - B - 4		4.36			
Nateh - Pc - 7	0.31				
Nateh - Pc - 6		299.37		0.02	
Nateh - Pc - 5		677.01		0.03	46.22
Nateh - Hs - 7	0.04				
Nateh - Hs - 5		105.63			36.49
Nateh - B - 7	0.10				
Nateh - B - 6		18.24		0.01	
Nateh - B - 5		155.49		0.01	148.46
Nalui - Hs - 4				16.05	
Nalui - B - 4				121.67	
Muara Urie - Hs - 6		0.67			1743.34

	APL	HP	HPk	HPT	HL
	R07				R08
Muara Urie - Hs - 5		0.00			5200.53
Muara Urie - B - 6					186.88
Muara Urie - B - 5					2746.17
Muang - Hs - 4				76.92	
Marajai - Pc - 6		0.06			116.37
Marajai - Pc - 5		0.32			522.03
Marajai - B - 5					16.87
Mantuyan - Pc - 7	0.04				
Mantuyan - Pc - 6		467.36			
Mangkupum RL - Hs - 4		115.05			
Mangkupum RL - B - 4		85.48			20.23
Mangkupum Rahaya Lestari - Hs - 4		58.16			256.59
Mangkupum Rahaya Lestari - B - 4		24.18			7.22
MANDIRI SEJAHTERA - Pk - 8		0.01			
MANDIRI SEJAHTERA - Ht - 8		85.15			
MANDIRI SEJAHTERA - Ht - 6		34.73			
Mamigang - Pc - 6		0.02			0.00
Mamigang - Pc - 5		0.00			520.2
Mamigang - Hs - 5					563.09
Mamigang - B - 5					852.52
Mamantang - Pt - 5		0.08			
Mamantang - Pc - 7	0.15				
Mamantang - Pc - 6		130.95			
Mamantang - B - 7	0.49				
Mamantang - B - 6		368.68			
Maju Terus Jaya - Hs - 5				4.45	
Mahkota Banua bersujud - T - 7		0.24			
Mahkota Banua bersujud - Pb - 6		2.10			
Mahkota Banua bersujud - Hs - 7		3.69			
Mahkota Banua bersujud - Hs - 6		3.70			
Mahkota Banua bersujud - Hs - 5		11.68			
Mahkota Banua bersujud - B - 7		1.40			
Mahkota Banua bersujud - B - 6		0.40			
Mahkota Banua bersujud - B - 5		10.01			

TABEL 23. | Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
1	Ajung		253.92					254.43
2	Bangkalaan Melayu	13.50				224.64		238.13
3	Bararawa	11.23	2,427.79	2,433.01				4,872.03
4	Batuah					2,401.92		2,401.92
5	Bintang Ara		265.27					265.27
6	Burum		276.76	41.53				318.29
7	Cantung Kanan					1,814.98		1,814.98
8	Datar Ajab		7.00		144.30	148.95		300.47
9	Dayak Pitap					1,522.15		1,522.81
10	Desa Tampakang		1,095.28	3,110.27				4,205.55
11	Emil Baru	1.11				153.51		154.62
12	Hantanung Jaya		100.74					100.74
13	Haratai					701.14		701.20
14	Haruyan Dayak		917.84		112.73	315.10		1,345.93
15	Hinas Kanan	1.99			560.33			562.32
16	Hutan Desa Sapala		426.04	773.56				1,199.60
17	Jombang Prima Asri				450.15			450.15
18	Karya Indah					437.52		437.54
19	Kinarum		352.81			146.93		499.74
20	Kindingan					205.23		205.24
21	Laburan					3,034.73		3,034.75

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
22	Lalapin					147.42		147.44
23	Lano					906.31		906.32
24	Libungan					98.45		98.46
25	Limpaho	5.48			404.01	97.87		507.36
26	Liyu					1,725.15		1,725.15
27	LPHD Batu Tangga				191.97	228.00		419.97
28	LPHD BINJAI		340.83					340.85
29	LPHD Embun Meratus		29.16		470.94			500.10
30	LPHD Langkang Lama		105.83					105.84
31	LPHD PADAWANYI					389.11		389.49
32	LPHD Santuun		512.00					512.00
33	LPHD Sepapah		143.70					143.89
34	LPHD Teluk Sirih		203.53					203.54
35	Lumbang				5.86	1,461.57		1,467.43
36	Mamantang		499.70					500.34
37	Mamigang					1,935.88		1,935.90
38	Mantuyan		467.36					467.41
39	Marajai					655.28		655.65
40	Muara Urie					9,876.92		9,877.59
41	Nalui				137.72			137.72
42	Nateh		1,255.75			251.13		1,507.38
43	Pantai baru					110.32		110.32

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
44	Paramasan Atas	10.06				1,210.79		1,220.86
45	Patikalian				390.25			390.25
46	Pudi Seberang		614.17		2,570.50			614.17
47	Pulantani			245.02				245.02
48	Sapala	23.60	643.11	2,570.50				3,237.22
49	Sidando				75.02	301.88		301.88
50	Sungai Bakar					3,132.20		3,132.20
51	Tambak Sari Panji			75.02				75.02
52	Tamunih					878.00		878.00
53	Teluk Aru				327.70	121.82		121.82
54	Teluk Kemuning					166.98		166.98
55	Tuhuran			327.70				327.70
56	Ulang	2.00	13.16			1,376.29		1,391.45
57	Uren					498.85		499.15
58	Uwie		325.54					325.64
59	Binjai		102.59					102.59
60	BUMI PRIANGAN	1.13				330.82		331.94
61	Dayak Satui Mandiri							100.99
62	GAPOKTAN HUTAN HARAPAN BERSAMA		232.03			347.27	103.37	682.67
63	Gapoktan Hutan Lestari		124.10			39.36		163.46
64	GAPOKTAN MUTIARA SARANG TIUNG					498.42	2.06	500.48
65	"GAPOKTAN SUMBER KAHURIPAN"					202.70		202.70
66	Gapoktan Sumber Kehidupan					272.42		272.42
67	GAPOKTAN TAMIANG TINGGI					369.07		369.07

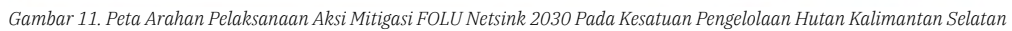
No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
68	GAPOKTANHUT DADARINGAN					149.31		149.31
69	GAPOKTANHUT HIDUP MAKMUR					159.53		159.53
70	"GAPOKTANHUT TELAGA LESTARI"					156.58		156.58
71	GAPOKTANHUT TUNGKARAN HARAPAN SEJAHTERA					148.48		148.48
72	HARAPAN BINJAI SEJAHTERA					469.58		469.58
73	Jasa Budi Sejahtera				448.10			448.10
74	Kampung Baru		926.63					926.63
75	"KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI GAMBUT SUKA MAJU"	9.20				116.06		125.27
76	Kemitraan Pangelak					309.28		309.28
77	Kemitraan Solan (KTH Gunung Hijau)		184.00		59.65	108.51		352.16
78	KT BERKAT SENTOSA	38.21	128.21					166.42
79	KT BINA BERSAMA					50.64		50.64
80	KT BUNGA SARI				482.68	209.82		692.50
81	"KT GALAM RIMBUN DAN KT BATU KURA"					378.73		378.73
82	KT GAWI SABUMI					110.64		110.64
83	KT HARAPAN BERSAMA	1.77				155.89		157.66
84	KT INGIN MAJU DAN KT SUKA MAJU					401.86		401.86
85	KT KARIYA JAYA					158.07		158.07
86	KT KARYA USAHA					39.96		39.96

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
87	KT LESTARI	2.93	36.72			161.21		200.86
88	KT MARAJAI BERSINAR					922.57		922.57
89	KT MEKAR SARI					231.52		231.52
90	KT PANCA WARGA					500.07		500.07
91	KT PINANG MUDA, KT PINANG HABANG, KT HARAPAN BARU					224.99		224.99
92	KT SUKA MAJU		44.29			136.38		180.67
93	"KT SUKA MAKMUR & KT KARYA JAYA"	1.56				80.64		82.20
94	KT TAMPUTUK CIPTA SEJAHTERA		200.91					200.91
95	KTH AHAN					228.09		228.09
96	KTH BATU TUNGKU		165.58					165.58
97	KTH Batuah Jaya		476.27					476.27
98	KTH BERKAT SEKUMPUL					52.14		52.14
99	KTH BINA JAMBANGAN					101.08		101.08
100	KTH GAWI MAKMUR DAN KT GARU GARU MAKMUR	30.94	128.41			120.28		279.62
101	KTH GENERASI PEMUDA					46.33		46.33
102	KTH Gunung Birah					250.52		250.52
103	KTH GUNUNG LURUS					173.22		173.22
104	KTH HAMPANG BERCAHAYA					99.88		99.88
105	KTH HAMPANG LESTARI		125.56					125.56
106	KTH HARAPAN JAYA		495.29					495.29
107	KTH Mampai Hijau Hijau dan Rangkang II				277.19	458.05		735.24

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
108	KTH MARUSUNG JAYA				209.29			209.29
109	KTH MUNGKUR JARING					150.27		150.27
110	KTH PAPAGARAN BERSATU				395.99			395.99
111	"KTH PARAPAHING BERSATU JAYA"		211.84					211.84
112	KTH REJEKI ABADI		252.05					252.05
113	KTH SUBUR					230.78		230.78
114	KTH Sumber Rejeki		171.32					171.32
115	KTH WANA SEJAHTERA		80.46					80.46
116	Lumbang		304.47			34.18		338.65
117	Mangkupum Rahaya Lestari		282.87			284.04		566.91
118	Muang				76.92			76.92
119	Panaan		87.64					87.64
120	SAKATALU BERKARYA		103.04			102.59		205.63
121	SRI REJEKI					217.70		217.70
122	TEMBENG MEMBANGUN		164.81					164.81
123	WANA MAKMUR					81.67		81.67
124	Gapoktan Cahaya Tani I		26.73					26.73
125	Gapoktan Cahaya Tani II		566.73					566.73
126	Berkat Jaya Abadi	3.59			4.55			8.14
127	Bersama Kita Membangun				3.99			3.99
128	Bukit Barisan Jaya				4.67			4.67
129	Kop Akar Perjuangan		503.07					503.07
130	Kop Berkat Jaya Abadi		105.78		230.51			336.29
131	Kop Bersama Kita Membangun				325.18			325.18
132	Kop Budi Sejahtera				375.44			375.44
133	Kop Bukit Barisan Jaya				326.39			326.39

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
134	Kop Gemah Ripah		499.30					499.30
135	Kop Hutanmas		477.41				129.25	606.66
136	Kop Mahkota Banua Bersujud		694.21					694.21
137	Kop Maju Terus Jaya				325.67			325.67
138	Kop Rimba Raya				343.66			343.66
139	KOPERASI KARYA MANDIRI		233.99					233.99
140	KOPERASI PRODUSEN KUSAN RAYA JAYA		727.33					727.33
141	Koperasi Suka Maju		614.02					614.02
142	KPM Kuntum Melati			485.79				485.79
143	KSU Jasa Mandiri		593.48					593.48
144	KT KEPAYANG KARYA YAQIN		228.09					228.09
145	Mahkota Banua bersujud		33.22					33.22
146	Maju Terus Jaya				4.45			4.45
147	Rimba Raya				29.25			29.25
148	Bindang Makmur		42.88					42.88
149	CAHAYA DAYAK PITAP		592.22					592.22
150	GAPOKTAN KAKAO	20.65	79.08					99.73
151	KTH : Harmonis		124.63					124.63
152	KTH : Jatuh Bangun		27.28					27.28
153	KTH : Sejahtera Indah		29.30					29.30
154	KTH : Siola		35.93					35.93
155	KTH AJUNG		165.38			860.92		1,026.30
156	KTH BATU PUTIH	1.15	66.24					67.39
157	KTH BERSATU PADU		58.08					58.08
158	KTH GUNUNG UWAR		93.83					93.83
159	KTH Kanaan		50.04					50.04

No	Perhutanan Sosial	R07				R08		Total
		APL	HP	HPK	HPT	HL	TAHURA	
160	KTH KARAMO BERSINAR		67.21		83.64			150.85
161	KTH LEMBAH PUNDUN				106.64			106.64
162	KTH LIYU MEMBANGUN		1,000.37			20.38		1,020.75
163	KTH MADU LESTARI		39.99					39.99
164	KTH MAJU BERSAMA		49.81					49.81
165	KTH MITRA KARYA	14.46	111.85					126.30
166	KTH Paskel	35.70						35.70
167	KTH SULANGAI JAYA		165.10			7.39		172.49
168	KTH TELAGA BIDADARI					53.96		53.96
169	KTH WATU MARUNG		190.87					190.87
170	KTH. BURA LINO		72.95					72.95
171	KTH. MAJU BERSAMA		140.48					140.48
172	KTH_BARAK8		84.87					84.87
173	KTH_ BINJAISEJAHTERA		59.51					59.51
174	KTHN GUNUNG BATUAH		107.12					107.12
175	MANDIRI SEJAHTERA		119.90					119.90
176	PKTH PENEPEH LESTARI		36.55					36.55
177	PS Mangkupum		904.40					904.40
178	Sehurai Bersama					148.65		148.65
179	Wana Mitra Sejahtera		3.33			147.02		150.34
Grand Total		230.25	26,128.92	10,062.40	7,083.09	47,986.55	234.68	91,730.94



TABEL 24. | Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030

Program	R07	R08
Kegiatan	Peningkatan cadangan karbon- Rotasi	Peningkatan cadangan karbon- Non Rotasi
	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan
	Pembangunan PUP hutan alam/tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Law Enforcement	Law Enforcement
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
Indikator Capaian	Laporan	Laporan
	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon meningkat
Pendanaan (Juta Rp/tahun)	Perusahaan	Perusahaan
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	228.007	368.380
APL Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Dishut, Dinas LH, Pemprov/Pemkab, NGO, APHL, masyarakat/KTH sekitar hutan HP HPK	

3.2. Strategi Konservasi

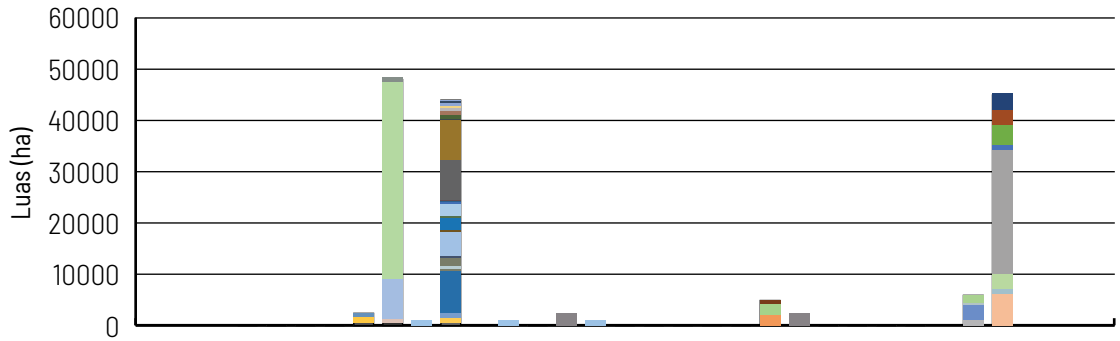
Dalam kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Di provinsi Kalimantan Selatan Rencana Aksi Mitigasi dengan total luas 148.554 ha dapat diterapkan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Tawan Wisata Alam, maupun Taman Hutan Raya (Tahura).

Prioritas lokasi untuk kegiatan aksi mitigasi ini dilakukan pada kawasan konservasi oleh 24 pengelola areal konservasi (Tabel 25 dan Tabel 26). Kegiatan RO11 terbesar berada di

lokasi Tahuta Sultan Adam dengan luasan 48.559 ha, RO11 juga dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dengan menjaga area bernilai konsentrasi tinggi (HCVF) seperti di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas lambung Mangkurat (ULM) dengan luasan 1.563 ha. Berdasarkan IJLH, area berhutan alam yang menjadi area konservasi adalah area yang masuk ke dalam arahan lindung.

Dalam area konservasi ini masih terdapat rencana mitigasi seperti RO1 seluas 76 ha di THR Sultan Adam, RO12 terbesar di Teluk Kempang dengan luasan 20.446 ha, RO7 terbesar di Kuala Lupak dan Pleihari Tanah Laut dengan luasan masing-masing 1.023 dan 1.079 ha; RO8 terbesar dengan di Tahura Sultan Adam dengan luasan 41.908 ha. Hal ini dikarenakan pada areal kawasan konservasi tersebut masih kondisi penutupan lahan yang mesti dilakukan untuk pencapaian program FOLU Netsink Kegiatan utamayang dapat direncanakan meliputi perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi species, high conservation value forest dan kelola fragmentasi habitat, kemitraan konservasi, pemilikan kawasan dan peran serta masyarakat, intensifikasi jasa lingkungan, dan taman hutan raya.

TABEL 25. | Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030



	HP	APL	HL	HP	KSA/KPA	TAHURA	APL	CA	HP	KSA/KPA	SM	TWA	
	R01			R011					R012				
Teluk K., S.Laut, S.Seb. - Tm - 6								11					
Teluk K., S.Laut, S.Seb. - Hms - 6								37					
Teluk K., S.Laut, S.Seb. - Hmp - 6								8					
TWA Pleihari Tanah L. - B - 8													
TWA Pleihari Tanah L. - B - 5												84	
Sungai B. n Sungai L. - B - 5													
Sungai B. n S. Lulan - Tm - 5								26					
Sungai B. n S. Lulan - Rw - 5								4					
Sungai B. n S. Lulan - Pt - 5								45					
Sungai B. n S. Lulan - Pm - 5								2					
Sungai B. n S. Lulan - Pk - 5								68					
Sungai B. n S. Lulan - Pc - 5								3					
Sungai B. n S. Lulan - Hms - 5								820					
Sungai B. n S. Lulan - Hmp - 5								285					
Sungai B. n S. Lulan - Br - 5								324					
Sungai B. n S. Lulan - B - 5								244					
Batu T. - Tanjung P. - Tm - 6								29					
Batu T. - Tanjung P. - Pc - 6								1					
Batu T. - Tanjung P. - Hs - 6								1					
Batu T. - Tanjung P. - Hrs - 6								84					
Batu T. - Tanjung P. - Hms - 6								342					
Batu T. - Tanjung P. - Br - 6								97					
Batu T. - Tanjung P. - B - 6								174					
KHDTK ULM - Pk - 5					2								
KHDTK ULM - Ht - 5					456	54							
KHDTK ULM - B - 5					1105	19							
Teluk Kelumpang - Tm - 6								411					
Teluk Kelumpang - T - 6								20					
Teluk Kelumpang - Pt - 6								26					
Teluk Kelumpang - Pk - 6								573					
Teluk Kelumpang - Pc - 6								227					
Teluk Kelumpang - Hms - 6		92					0	11189					
Teluk Kelumpang - Hmp - 6		5					0	6926					
Teluk Kelumpang - Br - 6								552					
Teluk Kelumpang - B - 6								387					
Selat Sebuku - Tm - 8								64					
Selat Sebuku - Tm - 6								274					
Selat Sebuku - T - 8													
Selat Sebuku - Rw - 6								0					
Selat Sebuku - Pk - 8								1					
Selat Sebuku - Pc - 8								26					
Selat Sebuku - Pc - 6								69					
Selat Sebuku - Pb - 6								11					
Selat Sebuku - Ht - 8								23					
Selat Sebuku - Ht - 6								19					
Selat Sebuku - Hms - 8								24					
Selat Sebuku - Hms - 6								1986	0				
Selat Sebuku - Hmp - 6								271					
Selat Sebuku - Br - 8								60					
Selat Sebuku - Br - 6								76					
Selat Sebuku - B - 6								4					

[illegible]

	HP	APL	HL	HP	KSA/KPA	TAHURA	APL	CA	HP	KSA/KPA	SM	TWA	
	R01			R011					R012				
Selat Laut - Tm - 7							16						
Selat Laut - Tm - 6							44	1621	2			85	
Selat Laut - Tm - 5							0	0	15				
Selat Laut - T - 7							18						
Selat Laut - T - 6							14	86				6	
Selat Laut - Sw - 6								22					
Selat Laut - Rw - 7							7						
Selat Laut - Rw - 6								13					
Selat Laut - Pt - 6							0	75					
Selat Laut - Pm - 6							1	5					
Selat Laut - Pm - 5									0				
Selat Laut - Pk - 7							27						
Selat Laut - Pk - 6							9	179					
Selat Laut - Pc - 7							9						
Selat Laut - Pc - 6							8	156					
Selat Laut - Pc - 5									13				
Selat Laut - Pb - 7							2						
Selat Laut - Pb - 6								28					
Selat Laut - Hms - 7							162		0				
Selat Laut - Hms - 6		1					21	4835				320	
Selat Laut - Hms - 5									28				
Selat Laut - Hmp - 6								32				14	
Selat Laut - Br - 7							31						
Selat Laut - Br - 6							17	1439				144	
Selat Laut - Br - 5								0	11				
Selat Laut - Bdr - 6							0	2					
Selat Laut - B - 6								55				3	
KHDTK Riam Kiwa - T - 5													
KHDTK Riam Kiwa - Pt - 5													
KHDTK Riam Kiwa - Pk - 5													
KHDTK Riam Kiwa - Pc - 5													
KHDTK Riam Kiwa - Ht - 5													
KHDTK Riam Kiwa - B - 5													
THR Sultan Adam - T - 5													
THR Sultan Adam - Sw - 5													
THR Sultan Adam - Pt - 7													
THR Sultan Adam - Pt - 5						0							
THR Sultan Adam - Pm - 5						6							
THR Sultan Adam - Pk - 5						0							
THR Sultan Adam - Pc - 5													
THR Sultan Adam - Pb - 5													
THR Sultan Adam - Ht - 5						145							
THR Sultan Adam - Hs - 7	76			0									
THR Sultan Adam - Hs - 6			4	0									
THR Sultan Adam - Hs - 5			0		1	39525							
THR Sultan Adam - Hp - 5						8044							
THR Sultan Adam - B - 7													
THR Sultan Adam - B - 6													
THR Sultan Adam - B - 5					6	879							
Teluk Pamukan - Tm - 6								143					
Teluk Pamukan - Pt - 6								11					
Teluk Pamukan - Pm - 6								20					
Teluk Pamukan - Pk - 6							1	74					
Teluk Pamukan - Pc - 6							3	257					
Teluk Pamukan - Pb - 6								15					
Teluk Pamukan - Hms - 6		6					30	7121					
Teluk Pamukan - Hmp - 6		1					3	203					
Teluk Pamukan - Br - 6								1064					

[illegible]

TABEL 26. | Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030

[illegible]

KSA/KPA				SM			TAHURA		TWA		Total
R011	R012	R07	R08	R012	R07	R08	R011	R08	R012	R07	
201					1078	1023					201
					908	1079	4605				6592
5											5
					189						189
									73		73
4											4
											10
					58						58
											1
					25						25
											9996
7		2	51				48599	41908			90703

No.	Pengelola Areal Konservasi	CA			HL				HP			
		R012	R07	R08	R011	R08	R01	R011	R012	R04	R07	R08
16	Selat Laut	8671							69			
17	Selat Sebuku	2911		781					0			
18	Teluk Kelumpang	20446										
19	KHDTK ULM											
20	Batu T. - Tanjung P.	737	1									
21	Sungai B. n S. Lulan	1799										
22	Sungai B. n Sungai L		0									
23	TWA Pleihari Tanah L											
24	Teluk K., S. Laut S. Seb.	55										
Grand Total		44624	3	781	4	1	76	0	69	0	55	0

KSA/KPA				SM			TAHURA		TWA		Total
R011	R012	R07	R08	R012	R07	R08	R011	R08	R012	R07	
									573		9313
											3692
											20446
1563							73				1636
											738
											1799
											0
									84	10	93
											55
1570	749	2	51	2258	2102	4605	48672	42192	729	10	148554



TABEL 27. | Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Areal Konservasi di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030

Program	R01	R011	R012	R04	R07	R08
	Pencegahan Deforestasi Mineral	Perlindungan areal konservasi	Pengelolaan Mangrove	Pembangunan Hutan Tanaman	Peningkatan cadangan karbon-Rotasi	Peningkatan cadangan karbon-Non Rotasi
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan
Kegiatan	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Pembangunan PUP hutan alam/tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pembangunan PUP hutan tanaman	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Indikator Capaian	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat
	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
Pendanaan (dalam juta Rupiah) / Ha	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	760	21710	484300		21710	476310
Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi, Dishut, Dinas LH, Pemprov/Pemkab, NGO, APLI, masyarakat/KTH sekitar hutan					

3.3. Strategi Pengelolaan Gambut dan Mangrove

Mangrove diketahui sebagai tipe hutan yang menjadi penyerap dan menyimpan cadangan karbon. Total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, dengan kondisi tutupan tajuk >70% atau kategori mangrove lebat adalah 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70% memiliki luas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30% seluas 54.474 Ha (2%). Mangrove di Kalimantan Selatan. Mangrove kalsel mencapai 84.621,59 ha dengan pembagian hutan mangrove lebat seluas 54.878,50 Ha (64,85%), hutan mangrove sedang seluar 26.263,83 Ha (31,04%) dan hutan mangrove jarang seluas 3.479,26 Ha (4,11%). Berdasarkan perbandingan luas dari tutupan hutan mangrove lebat di Indonesia,

maka tindakan rehabilitasi mangrove menjadi salah satu rencana aksi penting dalam upaya peningkatan serapan dan cadangan karbon.

Strategi pengelolaan gambut dan mangrove untuk mendukung perubahan iklim di kawasan tersebut dilakukan melalui aksi mitigasi RO2, RO9, RO10 dan RO12. Kawasan bergambut dan penutupan lahan mangrove berada pada kawasan hutan dan non hutan. Area bergambut dan mangrove yang berada dalam kawasan hutan pengelolaannya diarahkan kepada KPH di bawah koordinasi Dinas Kehutanan. Sedangkan, area bergambut dan mangrove di luar kawasan hutan pengelolaannya dilakukan oleh BRGM-KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kedaaan dan sebaran kawasan bergambut dan mangrove pada areal PBPH dapat dilihat pada Tabel 13, pada areal PPKH dapat dilihat pada Tabel 19, sedangkan pada areal PS disajikan pada Tabel 22. Selanjutnya untuk kawasan dapat dilihat pada Tabel 16, kawasan konservasi pada Tabel 25, sedangkan non kawasan hutan disajikan pada Tabel 28

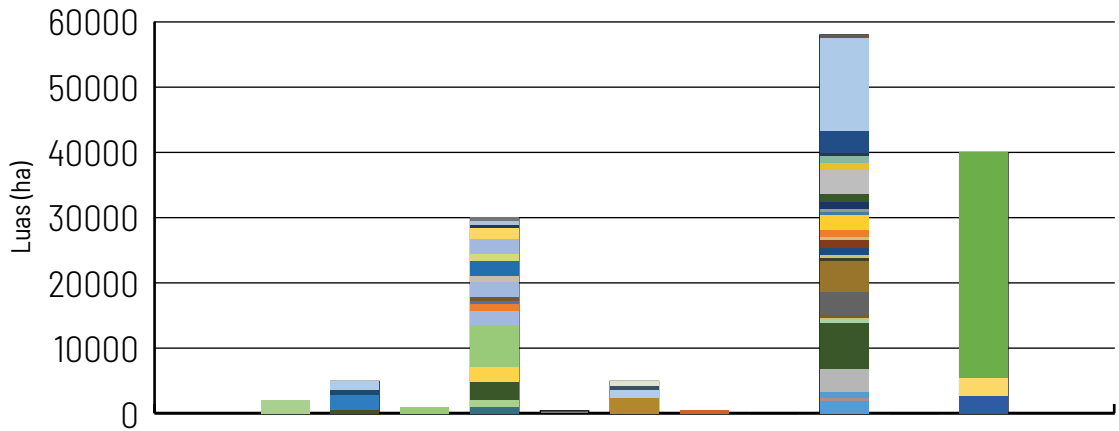
Kegiatan restorasi pada area yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya semusim dan perkebunan yang ada di luar konsesi diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi gambut dengan mengembangkan pola budidaya paludikultur dan teknik silvikultur lainnya yang memungkinkan berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk area yang tutupan lahan tidak produktif diarahkan untuk kegiatan restorasi yang dapat mendorong atau mempercepat regenerasi secara alami maupun secara buatan dengan pengayaan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi ikut menentukan keberhasilan dalam menurunkan emisi dari kebakaran gambut yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca nasional terbesar. Oleh sebab itu, hanya dengan kegiatan restorasi gambut masalah penurunan muka air tanah gambut dapat diatasi khususnya pada musim kemarau panjang sehingga risiko kebakaran dapat dikurangi.

3.4. Strategi Pengelolaan Mitigasi FOLU Net-Sink pada Kawasan Non Hutan

Mitigasi perubahan di Indonesia melalui program FOLU Net-Sink 2023-2030 ini merupakan kegiatan nasional yang meliputi seluruh area di Indonesia. Rencana ini diterapkan baik pada kawasan hutan maupun non hutan. Program ini yang dilaksanakan pada kawasan hutan berbasis pengelola yang ada dalam kawasan hutan, seperti KPH, PBPH, PS, PPKH, dan lainnya seperti yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan, di luar kawasan hutan pada tahap ini pengelola disusun berdasarkan administrasi kabupaten. Pihak kabupaten diharapkan dapat menyusun pengelola ruang tersebut untuk dikelola oleh masyarakat atau oleh pihak pemerintah daerah itu sendiri sebagai pengelolanya. Misalnya, ada kawasan konservasi tinggi atau kawasan gambut dalam yang berada di luar kawasan hutan, maka pemerintah daerah bisa mendisain pengelolaannya melalui program KEHATI yang berkelanjutan.

TABEL 28. | Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada kawasan Non Hutan di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030



	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Tapin - T - 8		16,6				
Tapin - Sw - 8						
Tapin - Pt - 5						
Tapin - Pk - 8						
Tapin - Pk - 7						
Tapin - Pc - 8						
Tapin - Pc - 7						
Tapin - Pc - 6						
Tapin - Pc - 5						
Tapin - Pb - 8						
Tapin - Pb - 7						
Tapin - Ht - 8						
Tapin - Ht - 5						
Tapin - Hs - 8	104,7					
Tapin - Br - 8		1074,9				
Tapin - Br - 5		0,0				
Tapin - B - 8						
Tapin - B - 5						
Tanah Laut - Tm - 7				552,3		
Tanah Laut - Tm - 0				0,3		
Tanah Laut - T - 7				62,0		
Tanah Laut - T - 0				1,1		
Tanah Laut - Sw - 7				399,4		
Tanah Laut - Sw - 0				20,4		
Tanah Laut - Rw - 7				93,6		
Tanah Laut - Pt - 7				5,6		
Tanah Laut - Pt - 0				0,5		
Tanah Laut - Pk - 7				197,3		
Tanah Laut - Pc - 7				456,5		
Tanah Laut - Pc - 0				0,5		
Tanah Laut - Pb - 7				0,5		
Tanah Laut - Ht - 8						
Tanah Laut - Ht - 7						
Tanah Laut - Hs - 7	1742,6					
Tanah Laut - Hms - 8						
Tanah Laut - Hms - 7				1388,0		
Tanah Laut - Hms - 0				60,4		

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
				17,2		
		4,3		5,0		
				0,3		
						33965,2
						39,6
				47,9		
				3,5		
		0,0		5,0		
				2,0		
				22,3		
	0,0			18,6		
	0,9			2,1		
				13277,6		
				3066,2	0,7	
					0,0	
		71,0				
				25,5	52,6	
				0,0	1,2	
				1,4	1,2	
				367,5		
				109,8		
				0,0		
	223,1					
	107,5				6,5	
	209,9		2,8	1,9		
	3,0					

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Tanah Laut - Br - 8				0,6		
Tanah Laut - Br - 7				3056,6		
Tanah Laut - Br - 0				10,6		
Tanah Laut - Bdr - 7				6,4		
Tanah Laut - B - 8						
Tanah Laut - B - 7				61,9		
Tanah Laut - B - 0				10,9		
Tanah Bumbu - Tr - 5						
Tanah Bumbu - Tm - 7				464,9		
Tanah Bumbu - Tm - 6				34,8		
Tanah Bumbu - Tm - 5				0,0		
Tanah Bumbu - Tm - 0				21,9		
Tanah Bumbu - T - 8						
Tanah Bumbu - T - 7				115,6		
Tanah Bumbu - T - 6				6,4		
Tanah Bumbu - T - 5						
Tanah Bumbu - T - 0				0,5		
Tanah Bumbu - Sw - 7				13,1		
Tanah Bumbu - Sw - 0				0,9		
Tanah Bumbu - Rw - 7				7,1		
Tanah Bumbu - Pt - 7				17,8		
Tanah Bumbu - Pt - 6						
Tanah Bumbu - Pt - 5						
Tanah Bumbu - Pk - 7				105,6		
Tanah Bumbu - Pk - 6				7,7		
Tanah Bumbu - Pk - 5						
Tanah Bumbu - Pk - 0						
Tanah Bumbu - Pc - 7			5,6	108,2		
Tanah Bumbu - Pc - 6						
Tanah Bumbu - Pc - 5						
Tanah Bumbu - Pc - 0				1,2		
Tanah Bumbu - Pb - 7				79,8		
Tanah Bumbu - Pb - 5						
Tanah Bumbu - Ht - 7						

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
		105,9			2,2	
				29,2	39,7	
		0,0				
		127,3		378,3		
				49,1		
				351,4		
				1,3		
		21,2		96,0		
				2,0		
				37,5		
				329,0		
				49,5		
				12,7		
				0,1		
				7,1		
		2,0		0,8		
				128,3		
				0,0		
	295,7					

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Tanah Bumbu - Hs - 8	240,0					
Tanah Bumbu - Hs - 7	64,3					
Tanah Bumbu - Hs - 5						
Tanah Bumbu - Hms - 7			0,0	1631,7		
Tanah Bumbu - Hms - 6			0,1	20,4		
Tanah Bumbu - Hms - 0				4,3		
Tanah Bumbu - Hmp - 7				144,9		
Tanah Bumbu - Br - 7				696,2		
Tanah Bumbu - Br - 6				8,6		
Tanah Bumbu - Br - 0				3,9		
Tanah Bumbu - B - 8						
Tanah Bumbu - B - 7				36,1		
Tanah Bumbu - B - 6						
Tanah Bumbu - B - 5						
Tabalong - T - 9		0,1				
Tabalong - T - 7		818,5				
Tabalong - Sw - 7		107,4				
Tabalong - Pt - 7						
Tabalong - Pk - 7						
Tabalong - Pc - 7						
Tabalong - Ht - 7						
Tabalong - Hs - 9	0.2					
Tabalong - Hs - 8	36.9					
Tabalong - Hs - 7	881.4					
Tabalong - Hs - 4			3.7			
Tabalong - Hrs - 7	5.6		180.3		2264.7	
Tabalong - Br - 9		0.4				
Tabalong - Br - 7		2621.4				
Tabalong - B - 9						
Tabalong - B - 8						
Tabalong - B - 7		1,8				
Kota Baru - Tm - 8				5,1		
Kota Baru - Tm - 7				0,5		
Kota Baru - Tm - 6				1413,0		

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
	38,1					
	0,0			0,1		
				0,0		
				3344,9		
				0,9		
				767,6		
		288,2		1154,4		
				0,7		
				5,3		
				13,5		
				4,5		
				1,1		
				70,0		1770,6
				0,1		
	5.5					
	0.9					
	218.5					
				0		
				657,0	5,4	
				28,2		
				0,5		
		3,4		2171,3		

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Kota Baru - Tm - 0				65,7		
Kota Baru - T - 8						
Kota Baru - T - 6				82,6		
Kota Baru - Sw - 6				72,7		
Kota Baru - Sw - 0				0,0		
Kota Baru - Rw - 6				38,6		
Kota Baru - Rw - 0				0,2		
Kota Baru - Pt - 6				480,0		
Kota Baru - Pt - 0				30,9		
Kota Baru - Pk - 7				26,0		
Kota Baru - Pk - 6				979,4		
Kota Baru - Pk - 0				5,0		
Kota Baru - Pc - 8				24,3		
Kota Baru - Pc - 6				1364,5		
Kota Baru - Pc - 0				30,0		
Kota Baru - Pb - 6				4,7		
Kota Baru - Pb - 0				1,6		
Kota Baru - Ht - 6				136,0		
Kota Baru - Hs - 8	0,1					
Kota Baru - Hs - 7	2,9					
Kota Baru - Hs - 6			47,0	139,6		
Kota Baru - Hs - 0				,8		
Kota Baru - Hrs - 6				9,7		
Kota Baru - Hms - 7				17,6		
Kota Baru - Hms - 6			1806	6742,9		
Kota Baru - Hms - 0				236,5		
Kota Baru - Hmp - 6			352,3	1566,4		
Kota Baru - Hmp - 0				1,2		
Kota Baru - Br - 8				5,9		
Kota Baru - Br - 7				0,2		
Kota Baru - Br - 6				2307		
Kota Baru - Br - 0				11,9		
Kota Baru - Bdr - 6				37,5		
Kota Baru - Bdr - 0				1,3		

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
				15,8		
				0,1		
				16,4		
				807,2		
				137,5		
				0,0		
	972,5			35,7		
	2112,2		9,9	8,6		
	36,8					
				49,7		

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Kota Baru - Bdr - 6				37,5		
Kota Baru - Bdr - 0				1,3		
Kota Baru - B - 8						
Kota Baru - B - 7						
Kota Baru - B - 6				1210,3		
Kota Baru - B - 5				0,0		
Kota Baru - B - 0				19,0		
Hulu Sungai Utara - T - 7		3,3				
Hulu Sungai Utara - T - 5		0,6				
Hulu Sungai Utara - Rw - 6		7,6				
Hulu Sungai Utara - Rw - 5		19,3				
Hulu Sungai Utara - Pk - 7			0,0			
Hulu Sungai Utara - Pc - 7		18,9				
Hulu Sungai Utara - Hrs - 7					0,9	
Hulu Sungai Utara - Br - 8						
Hulu Sungai Utara - Br - 7		25,3				
Hulu Sungai Utara - Br - 6		1,2				
Hulu Sungai Utara - Br - 5		15,0				
Hulu Sungai Tengah - T - 7						
Hulu Sungai Tengah - Pk - 7						
Hulu Sungai Tengah - Pc - 7						
Hulu Sungai Tengah - Pc - 6						
Hulu Sungai Tengah - Pc - 5						
Hulu Sungai Tengah - Hs - 7	10,3					
Hulu Sungai Tengah - Br - 7						
Hulu Sungai Tengah - B - 7						
Hulu Sungai Selatan - T - 7						
Hulu Sungai Selatan - Sw - 5						
Hulu Sungai Selatan - Rw - 6		0,4				
Hulu Sungai Selatan - Pt - 5						
Hulu Sungai Selatan - Pc - 5						
Hulu Sungai Selatan - Pb - 5						
Hulu Sungai Selatan - Ht - 5						
Hulu Sungai Selatan - Br - 8		0,9				

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
				1154,6	0,0	
				867,1		
				6,0		
				1,3		
						223,3
				0,7		
				1,8		
				21,1		
				28,6		
						146,5
				97,5		
				0,1		
				0,3		
				0,0		
				5541,3		
				2772,2	0,1	
				1,8		
				1,7		
		0,0		0,8		
		0,0		146,5		
				0,1		
	0,1					
				143,7		

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Hulu Sungai Selatan - Br - 7						
Hulu Sungai Selatan - Br - 6		0,0				
Hulu Sungai Selatan - Br - 5		0,1				
Hulu Sungai Selatan - B - 5						
Barito Kuala - Tm - 8				288,1		
Barito Kuala - Tm - 7				4,2		
Barito Kuala - T - 8		19,1				
Barito Kuala - Sw - 8				573,9		
Barito Kuala - Pt - 8				0,4		
Barito Kuala - Pk - 8						
Barito Kuala - Hs - 0				0,7		
Barito Kuala - Hrs - 8	4,1			258,9		
Barito Kuala - Hrs - 0				2,5		
Barito Kuala - Hms - 8				6,9		
Barito Kuala - Hms - 7				9,4		
Barito Kuala - Hms - 0				21,6		
Barito Kuala - Hmp - 3			6,3	1,8		
Barito Kuala - Br - 9						
Barito Kuala - Br - 8		931,7		353,6		
Barito Kuala - Br - 7				6,8		
Barito Kuala - Br - 6						
Barito Kuala - Br - 5		,0,1				
Banjarbaru - Sw - 6		0,0				
Banjarbaru - Br - 7						
Banjarbaru - Br - 6						
Banjarbaru - B - 7						
Banjar - T - 7						
Banjar - Sw - 7				659,1		
Banjar - Pt - 7						
Banjar - Pt - 6						
Banjar - Pk - 8						
Banjar - Pk - 7						
Banjar - Pk - 6			0,0			
Banjar - Pc - 7						

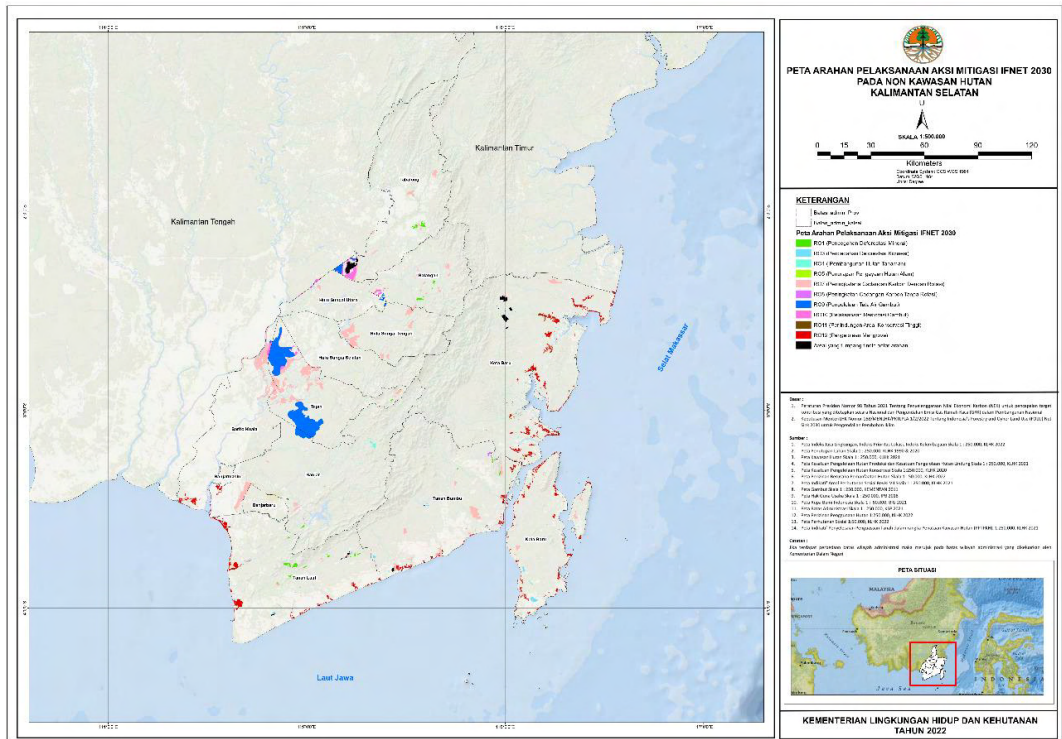
	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
				210,1		
				2,1		
				0,6		
						159,3
				33,9		
				9777,4		
				17,4		
				29,3		
				0,6		
				0,1	,	
				72,6	0,2	
				0,5		
		109,4		1,2		
						30,0
						2628,8
				45,7	14,4	
				0,6		

	R01	R10	R011	R012	R02	
	APL					
Banjar - Pc - 6						
Banjar - Pb - 6						
Banjar - Ht - 7			0,0			
Banjar - Ht - 6						
Banjar - Hs - 7	106,3		6,5			
Banjar - Br - 7				8,9		
Banjar - Br - 0				9,7		
Banjar - B - 7	21,2		6,4			
Banjar - B - 6			0,2			
Balangan - T - 7						
Balangan - Pt - 7						
Balangan - Pt - 6						
Balangan - Pk - 7						
Balangan - Pc - 7		181,8				
Balangan - Pc - 6						
Balangan - Pc - 5						
Balangan - Ht - 7						
Balangan - Hs - 7	616,3		0,0			
Balangan - Br - 7		33,6				
Balangan - B - 7		539,0				

	R03	R04	R05	R07	R08	R09
	APL					
		657,3		38,1		
				1,4		
				0,8	119,7	
	0,1					
	2,0					
				4022,7	0,0	
		6,5		97512	0,3	
				9,2		
				1,5		
		0,0		0,1		
						301,5
				2,1		
		11,6		6,7		
				0,0		
				0,1		
				395,6		
		0,1		1705,9		

TABEL 29. | Ringkasan Rencana Operasional Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non-Hutan di Kalimantan Selatan Priode 2023-2030

No.	Kabupaten/ Kota	APL											TOTAL
		R01	R010	R011	R0112	R02	R03	R04	R05	R07	R08	R09	
1	Balangan	616.3	754.4	0.0				11.6		2122.6		301.5	306.3
2	Banjarnegara	127.5		13.2	796.0		2.1	773.5		5158.8	134.6	2658.8	9664.5
3	Banjarnegara									42.3			42.3
4	Barito Kuala	4.1	950.9	6.3	1568.2					9811.9		159.3	12500.7
5	Hulu Sungai Selatan		1.7				0.1	0.1		506.			508.6
6	Hulu Sungai Tengah	10.3								8439.9	0.1	146.5	8596.9
7	Hulu Sungai Utara		113.6	0.0		0.9				37.4		223.3	375.2
8	Kota Baru	3.0		2206.1	17306.7		3121.5		9.9	3098.8	0.0		25746
9	Tabalong	924.1	3549.5	183.9		2264.7	224.9	3.4		2946.3	5.4	1770.6	11872.8
10	Tanah Bumbu	304.3		5.7	3596.2		333.8	311.4		6343.3	245.3		11139.9
11	Tanah Laut	1742.6			6462.0		543.4	304.3	2.8	914.7	205.7		10175.5
12	Tapin	104.7	1091.5				1.0	4.3		16467.4	0.7	34004.7	51674.3
Grand Total		3836.9	6461.6	2415.2	29729.1	2265.6	4226.7	1408.6	12.7	55890.2	591.8	39264.8	146103.1



Gambar 13. Peta Arahkan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2030 Pada Non-Kawasan Hutandi Provinsi Kalimantan Selatan

TABEL 30. | Program Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Kawasan Non-Hutan di Kalimantan Selatan Periode 2023-2030

Program	R01	R010	R011	R012	R02
Kegiatan	Pencegahan Deforestasi Mineral	Restorasi Lahan Gambut	Perlindungan areal konservasi	Pengelolaan Mangrove	Pelaksanaan Restorasi
	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement
	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman, perlindungan	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman	Pemeliharaan, penanaman
	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan	Pengayaan
	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
Indikator Capaian	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat
Pendanaan (dalam juta Rupiah)/ Ha	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
	383690	64616	24152	297291	22656
Para pihak terkait	KPH, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguran Tinggi, Dishut, Dinas LH, Pemprov/Pemkab, NGO, APHI, masyarakat/KTH sekitar hutan				

R03	R04	R05	R06	R07	R08
Pencegahan deforestasi oleh konsesi	Pembangunan Hutan Tanaman	Penerapan pengayaan Hutan alam	Penerapan RIL-C	Peningkatan cadangan karbon- Rotasi	Peningkatan cadangan karbon-Non Rotasi
Penyuluhan, pelatihan PHL	Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan	Penanaman, Pengayaan	Penerapan RIL-C	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan	Penanaman, Pengayaan & Pemeliharaan
Law Enforcement	Law Enforcement	Pembangunan PUP hutan alam	Penerapan SILIN	Pembangunan PUP hutan alam/tanaman	Pembangunan PUP hutan alam
Pemeliharaan, penanaman	Pembangunan PUP hutan tanaman	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL	Penyuluhan, pelatihan PHL
Pengayaan	Penyuluhan, pelatihan PHL	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement	Law Enforcement
Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL	Pemberdayaan masyarakat untuk PHL
Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon stabil meningkat	cadangan karbon meningkat
Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah	Insentif pemerintah
42267	14086	127	558902	5918	392648

3.5. Strategi Instrumen dan Informasi

Strategi instrumen adalah pembangunan instrumen pendukung seperti kelembagaan atau unit kerja. Instrumen pendukung bisa berada pada tapak (lokasi kegiatan) atau di tingkat pemerintah daerah dan atau provinsi. Instrumen ini bisa berupa kelembagaan atau unit kerja dalam SKPD pemerintah daerah sebagai pendukung program ini. Kelembagaan pendukung selama ini yang sudah di tingkat tapak adalah MPA, DARWIS, dan Kelompok Tani lainnya. Unit pendukung baru yang perlu dibangun di lapangan adalah Masyarakat Peduli Informasi (MPI) untuk mendukung updating data di lapangan. Sedangkan unit pendukung pada tingkat SKPD (sebaiknya dibawah BAPPEDA) di pemerintah daerah dan atau provinsi perlu dibangun. Unit khusus ini mendukung pemerintah daerah dan pusat untuk pengelolaan operasional mitigasi perubahan iklim ini di tingkat provinsi dan daerah. Sebagai pengelola, unit khusus ini diberi kewenangan dalam hal pengelolaan database hingga monitoring evaluasi, disarankan juga untuk pengambilan keputusan sesuai SOP yang ditentukan oleh KLHK. Artinya unit khusus ini bebas terikat oleh sistem yang dikembangkan oleh pusat terkait pengambilan keputusan sehingga pemerintah pusat tidak terbebani dengan hal rumit pada skala tapak. Dalam unit khusus ini juga sudah melibatkan para pihak yang terkait dengan program ini secara personal maupun official.

Strategi Informasi adalah pembangunan sistem informasi terutama berbasis web spasial. Sistem informasi ini sangat efektif dan bisa dinamis dalam arti kata para pihak dapat dilibatkan dalam aktifitas updating database informasi perkembangan kemajuan program FOLU Net-Sink ini. Para pihak di level masyarakat di tingkat tapak merupakan user utama sekaligus updater database, sedangkan kelembagaan di level pemerintah dan atau perguruan tinggi berupa unit kerja khusus yang berperan untuk mengelola pelaksanaan FOLU Net-Sink ini di tingkat pemerintah daerah.

Bahan dasar dari pengembangan sistem informasi dapat berupa data dinamik dan statik. Macam data dinamik dan statik tersebut sudah tersedia pada tabel-tabel di atas. Data statik seperti nama pengelola, fungsi kawasan, skala prioritas. Data dinamik adalah penutupan lahan dan macam kegiatan mitigasi. Data pendukung lainnya adalah data spasial. Sistem informasi yang dikembangkan dapat berbasis android yang ada di HP atau Web-GIS spasial. Hal yang utama dari sistem informasi yang dibangun ini mudah untuk pengembangan dan updating database, untuk monitoring dan evaluasi serta dapat mudah untuk pengambilan keputusan. Mengingat besarnya ukuran database di masa yang akan datang, sebaiknya sistem database tidak tersentralisasi. Hal ini untuk menghindari aplikasi “down” nantinya.

Sistem informasi ini sangat efektif dan bisa dinamis dalam arti kata para pihak dapat dilibatkan dalam aktifitas updating database informasi perkembangan kemajuan program FOLU Net-Sink ini. Para pihak di level masyarakat di tingkat tapak merupakan user utama sekaligus updater database, sedangkan kelembagaan di level pemerintah dan atau perguruan tinggi berupa unit kerja khusus yang berperan untuk mengelola pelaksanaan FOLU Net-Sink ini di tingkat pemerintah daerah.



BAB 04



PENDANAAN

BAB IV. PENDANAAN

Kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Selatan tahun 2023- 2030 bersifat berkelanjutan sehingga sistem penganggaran kegiatan harus dipastikan berlanjut dengan menggunakan skema penganggaran tahun jamak (multi-years). Hal ini penting untuk diperhatikan karena capaian kegiatan pada tahun 2030 dilalui melalui capaian berjenjang (milestones) tiap tahun yang sudah terukur.

Prakiraan jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Selatan untuk tahun 2023-2030 adalah sebesar 21.906,14,8 juta Rupiah seperti yang disajikan pada Tabel 31

Beberapa sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Selatan tahun 2023-2030 antara lain: State-based direct investment dalam bentuk APBN, APBD, dana transfer ke daerah (DAK, DBH-DR), dan APBDes; Private-mandatory based investment, misalnya kewajiban penggunaan kawasan hutan untuk rehabilitasi DAS, kewajiban industri yang melampaui ambang batas emisi yang diperkenankan untuk membayar denda atau pajak emisi, kemiteraan kehutanan, dan lain-lain; Private-voluntary based investment dalam bentuk CSR perusahaan BUMN dan Swasta murni; Private-market based investment yang dapat didorong adalah Izin usaha jasa lingkungan karbon dan jasa lingkungan lainnya di kawasan hutan; Hibah dan kerjasama luar negeri lainnya baik bilateral maupun multilateral; Trust fund, misalnya ICCTF, GEF, BLHD-RBP, dan lain-lain serta Community based yang dapat didorong misalnya melalui skema perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan)

TABEL 31. | Rencana Pendanaan Program Aksi Mitigasi FOLU Netsink 2023-2030 di Provinsi Kalimantan Selatan

Pengelola	R01	R02	R03	R04	R05	R06
Kab. dan Kota	3,836.95	2,265.62	4,226.72	1,408.57	12.70	-
Unit Konservasi	75.69	-	-	-	-	-
Unit KPH	30,066.28	40.69	-	-	928.22	-
Unit PBPH	0.48	-	175,254.4	82,780.84	79,721.19	137.25
Unit PPKH	78.47	-	2,691.61	10.65	0.16	-
Unit PS	-	-	-	-	-	-
Luas Total (ha)	34,057.86	2,306.31	182,172.7	84,200.06	80,662.27	137.25
biaya (juta/ha)	5.00	5.00	5.00	26.57	5.59	17.04
Biaya /RO (juta)	170.289	11.531	910.863	2,237,195	450.902	2.338

R07	R08	R09	R010	R011	R012	TOTAL
55,890.15	591.76	39,264.78	-	-	-	107,497.25
2,171.49	47,630.60	-	-	50,246.01	48,429.86	148,553.65
37,378.17	9,269.27	-	42,487.74-	285,066.91	1,609.66	406,846.95
213,198.48	30,536.14	-	-	3,112.12	54.92	584,795.87
6,336.14	3,564.05	-	-	-	284.06	12,965.13
22,800.70	36,838.00	-	-	-	-	59,638.70
337,775.14	128,429.8	39,264.78	42,487.74	338,425.0	50,378.50	1,320,297.56
34.66	32.16	9.7	5.00	5.00	5.00	-
11,707,286	4,130,303	380,868.4	212.438	1,692,125	-	21,906,142.8



BAB 05



MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan rutin untuk menilai suatu program yang mencakup pengamatan terhadap input, proses, dan output sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Monitoring dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis informasi berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan secara sistematis sehingga dapat diidentifikasi dan diantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul.

Evaluasi adalah penilaian dampak dari program dan kegiatan yang sudah dilakukan setelah waktu tertentu. Mekanisme evaluasi terdiri dari 3 aspek, yaitu relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Relevansi menggambarkan sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan yang dirumuskan. Efektifitas mengukur sejauh mana sebuah kegiatan telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Efisiensi mengukur keluaran secara kualitatif dan kuantitatif dibandingkan dengan input sumber daya. Dari kegiatan evaluasi pada akhirnya akan didapatkan informasi dan pelajaran dari pengalaman pelaksanaan program/kegiatan, output, manfaat, dan dampak dari program yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan. Target dan volume yang ditetapkan dapat dilihat pada masing-masing rencana operasional yang telah disajikan pada tabel-tabel diatas. Tabel-tabel tersebut dapat dijadikan untuk bahan perencanaan pengelolaan operasional (Rencana Operasional) yang berbasis 5M (Man, Money, Method, Material and Machine)+1S (softskill).

Pada Rencana Kerja tingkat sub nasional Kalimantan Selatan ini, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme berikut:

Monitoring dan Evaluasi Jangka Pendek (Short Term). Monitoring dan evaluasi jangka pendek dilakukan secara rutin tahunan, dimana penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan.

Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang (Long Term). Monitoring dan evaluasi jangka Panjang dilakukan diakhir program Indonesia FOLU Net Sink Sub-Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2030, dimana penilaian dilakukan terhadap

seluruh capaian kuantitas dan kualitas pada kondisi terkair (tahun 2030) dari setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Monitoring dan Evaluasi tertentu, dimana penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam).

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan. Secara teknis operasional, pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi Indonesia FOLUN

Net Sink Sub-Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca yaitu pihak pemerintah (dinas terkait), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha terkait dan perwakilan masyarakat. Secara kelembagaan, perlu dibentuk tim koordinasi yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada institusi yang berkepentingan.

Pengendalian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam pengarusutamaan (mainstreaming) program-program OPD yang dapat berkaitan dengan emisi GRK dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui UPT yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk pengukuran emisi dan kontribusi aksi-aksi mitigasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPT yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tim Koordinasi usaha implementasi kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain yang dapat beranggotakan:

- Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan RAD-GRK Provinsi Kalsel
- Tim Perwakilan KLHK di Provinsi Kalsel (UPT)
- Tim dari Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- Tim Anggaran Pembangunan Daerah
- Perwakilan Akademisi/Perguruan Tinggi
- Perwakilan Lembaga Sosial Masyarakat
- Perwakilan Dunia Usaha

BAB 06



PENUTUP

BAB VI. PENUTUP

Rencana kerja tingkat sub nasional Kalimantan Selatan ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh UPT, OPD, dan para pihak yang berkepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh rencana aksi, target, program, dan kegiatan yang tersusun pada rencana kerja diharapkan dapat menjadi komitmen kegiatan bersama untuk dapat memenuhi target penurunan emisi yang ditargetkan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dokumen hidup (living document) yang akan selalu diupdate secara berkala mengikuti variasi wilayah dan kondisi masing-masing lokus pelaksanaan dan perkembangan kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik [BPS]. 2021. *Kalimantan Selatan dalam Angka 2021*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. 2013. *Laporan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 – 2033*.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. *Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026*.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2022. *Manual Pembacaan Data Rencana Operasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*.

KLHK. 2022. Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 168/Menlhk/Pktl/Pla.1/2/2022. Tanggal: 24 Februari 2022. . KLHK. Jakarta

KLHK. 2022. *Rencana Kerja Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. Jakarta

KLHK. 2022. *Rencana Kerja Bidang II Peningkatan Cadangan Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. Jakarta

KLHK. 2022. *Rencana Kerja Bidang III Konservasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. Jakarta

KLHK. 2022. *Rencana Kerja Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. Jakarta

KLHK. 2022. *Rencana Kerja Bidang V Instrumen dan Informasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. KLHK. Jakarta

Pusdatin KLHK. 2016. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015*. **Jakarta:** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

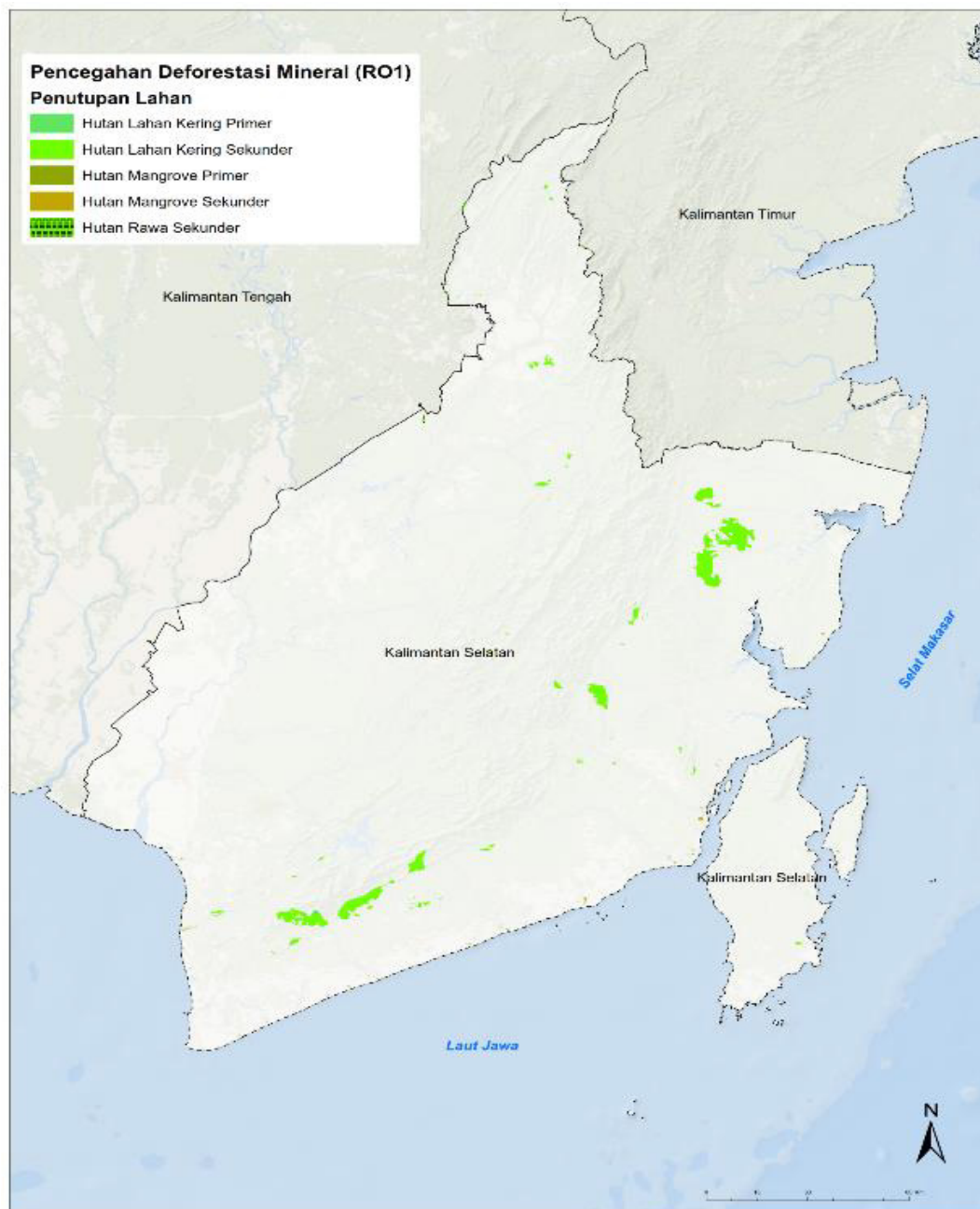
Pusdatin KLHK. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*. **Jakarta:** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pusdatin KLHK. 2020. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019*. **Jakarta:** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Republic of Indonesia. 2016. *First Nationally Determined Contribution*. Jakarta. Republic of Indonesia. 2021a. *Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050)*. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

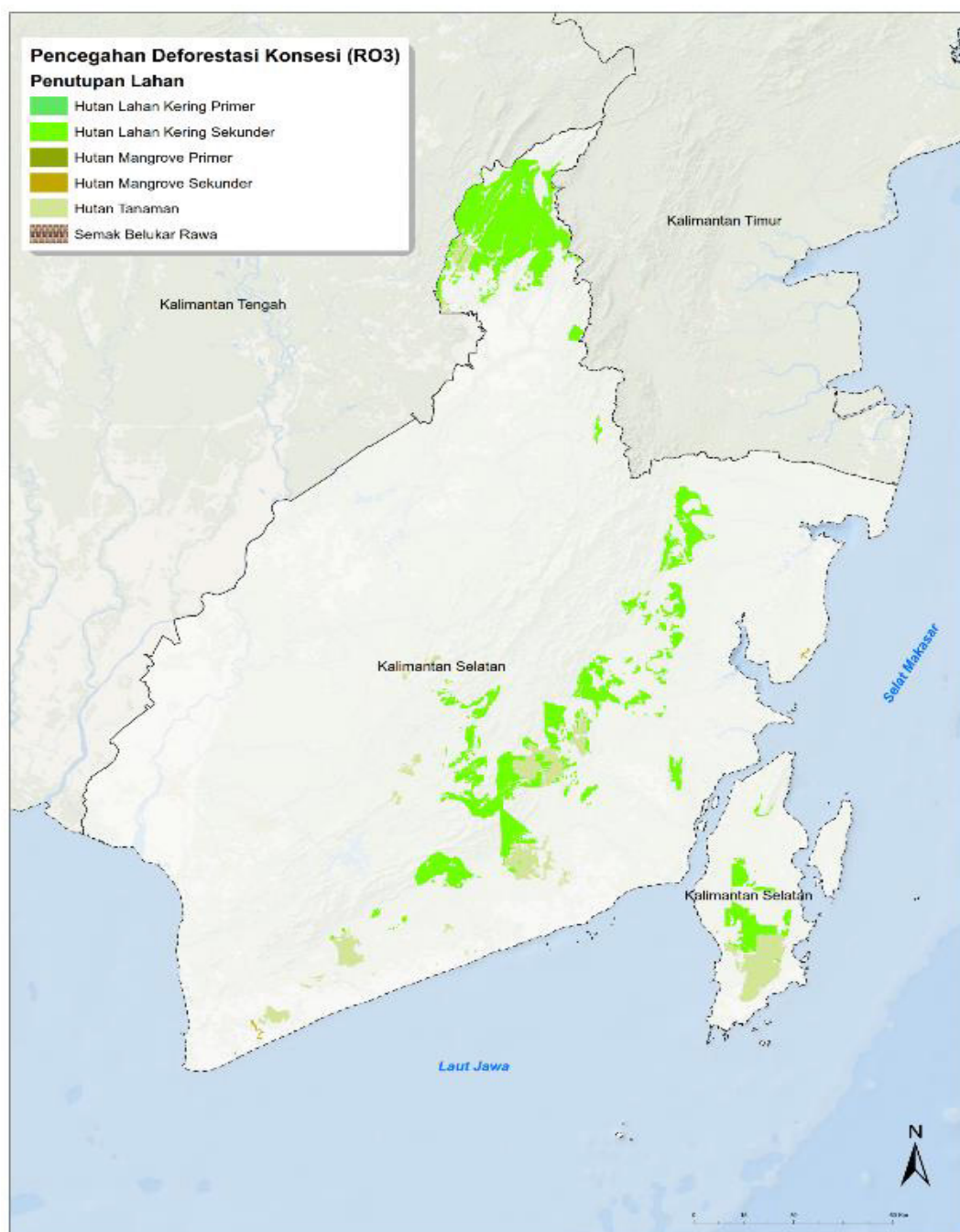
LAMPIRAN 1. | Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Mineral (R01) di Provinsi Kalimantan Selatan



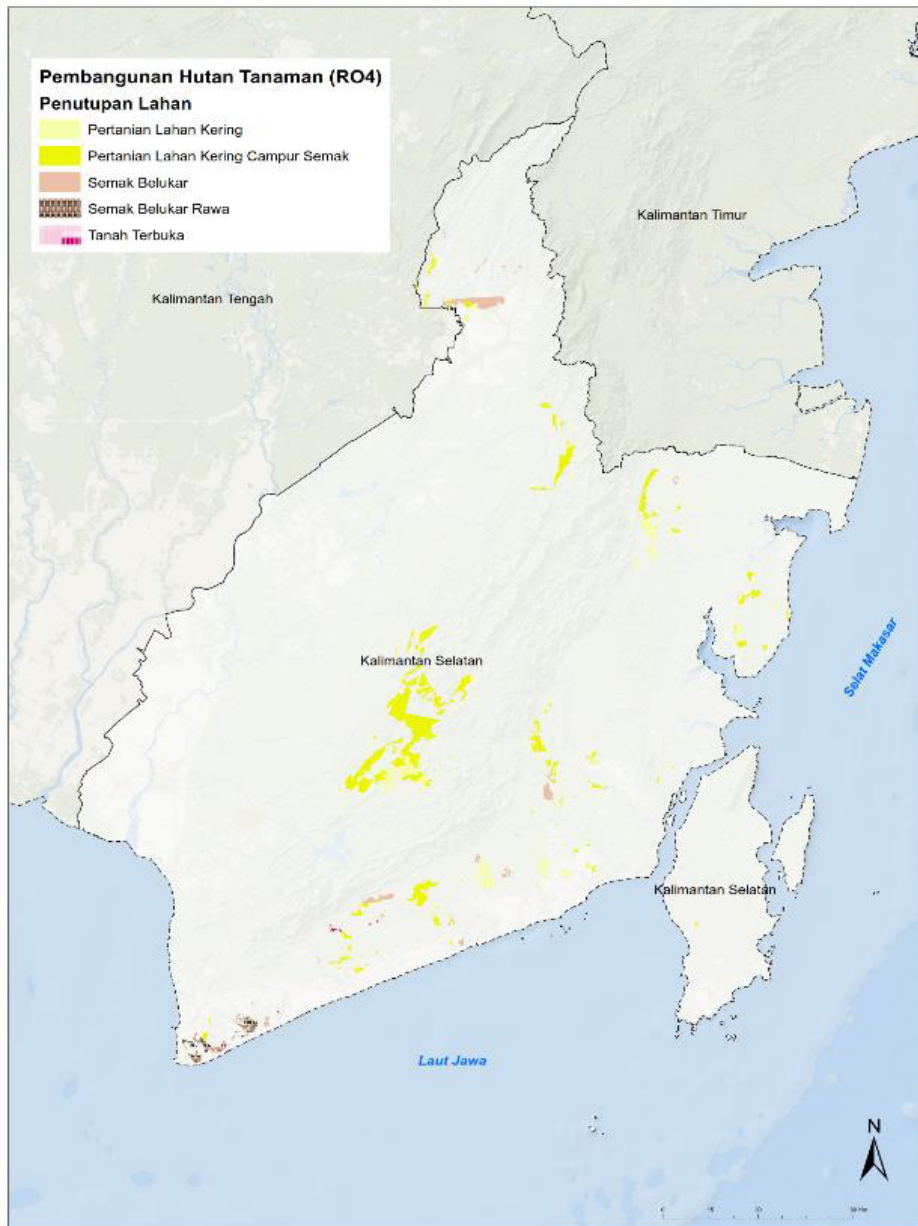
LAMPIRAN 2. | Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut (R02) di Provinsi Kalimantan Selatan



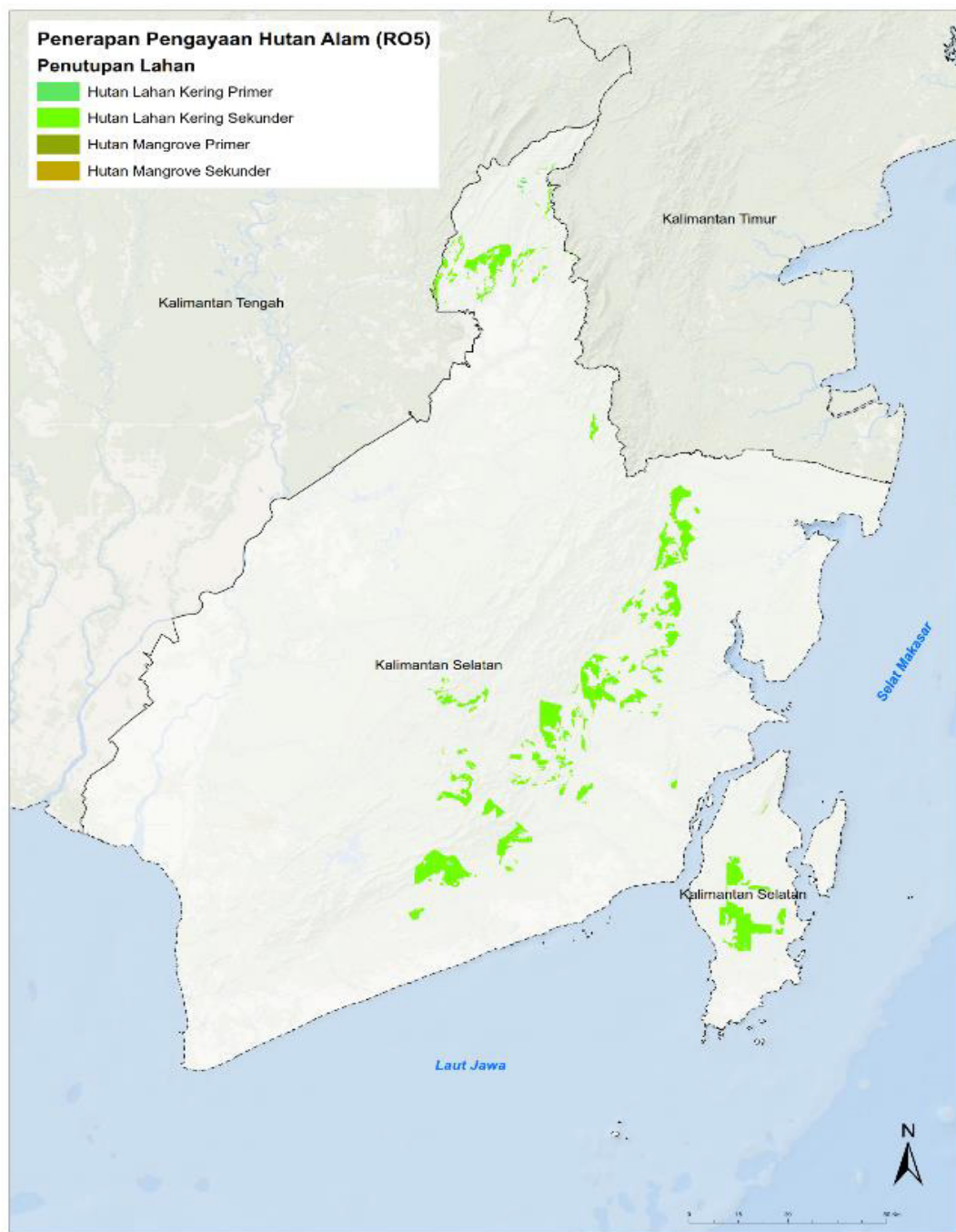
LAMPIRAN 3. | Peta Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Konsesi (R03) di Provinsi Kalimantan Selatan

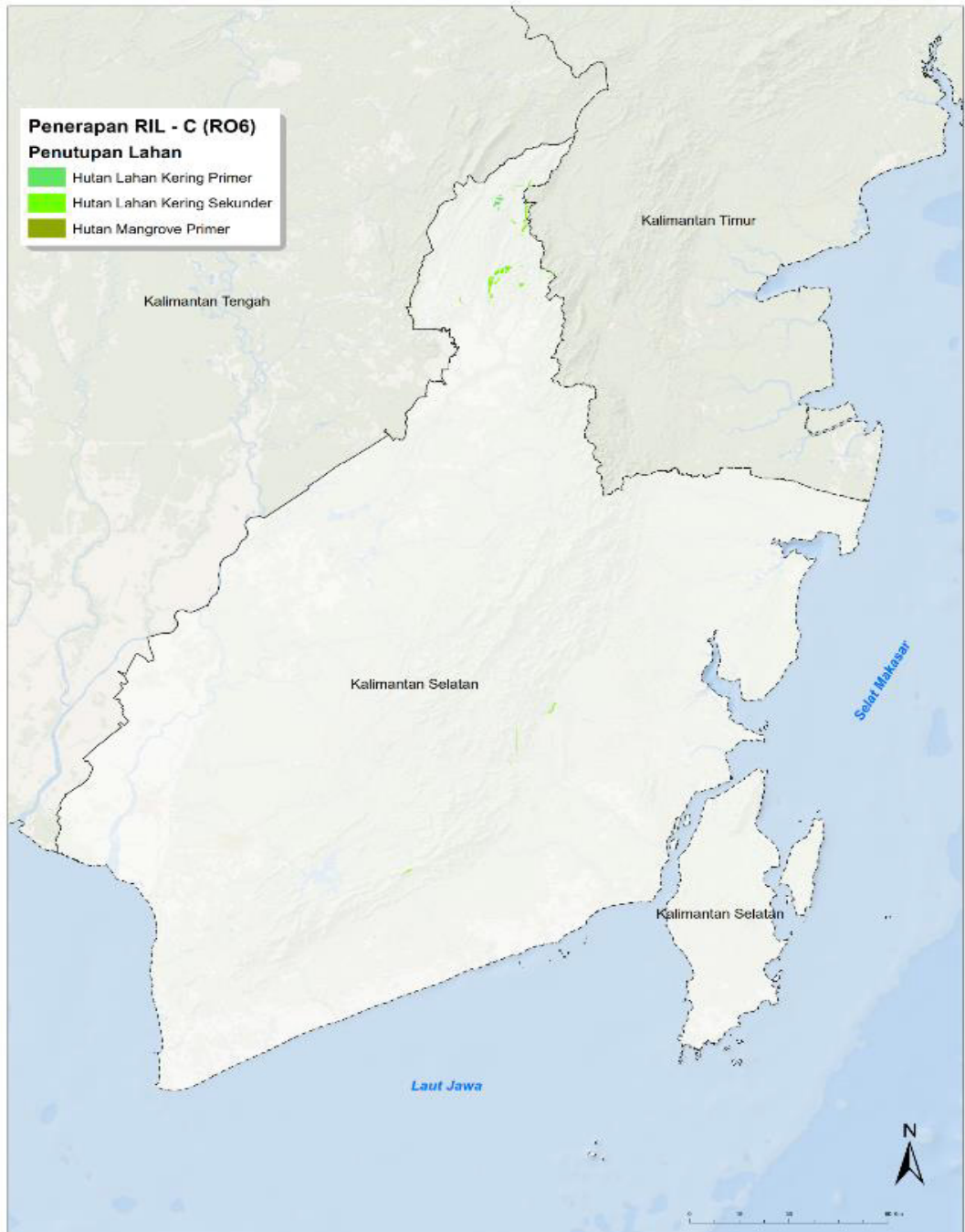


LAMPIRAN 4. | Peta Aksi Mitigasi Pembanguna Hutan Tanaman (R04) di Provinsi Kalimantan Selatan.

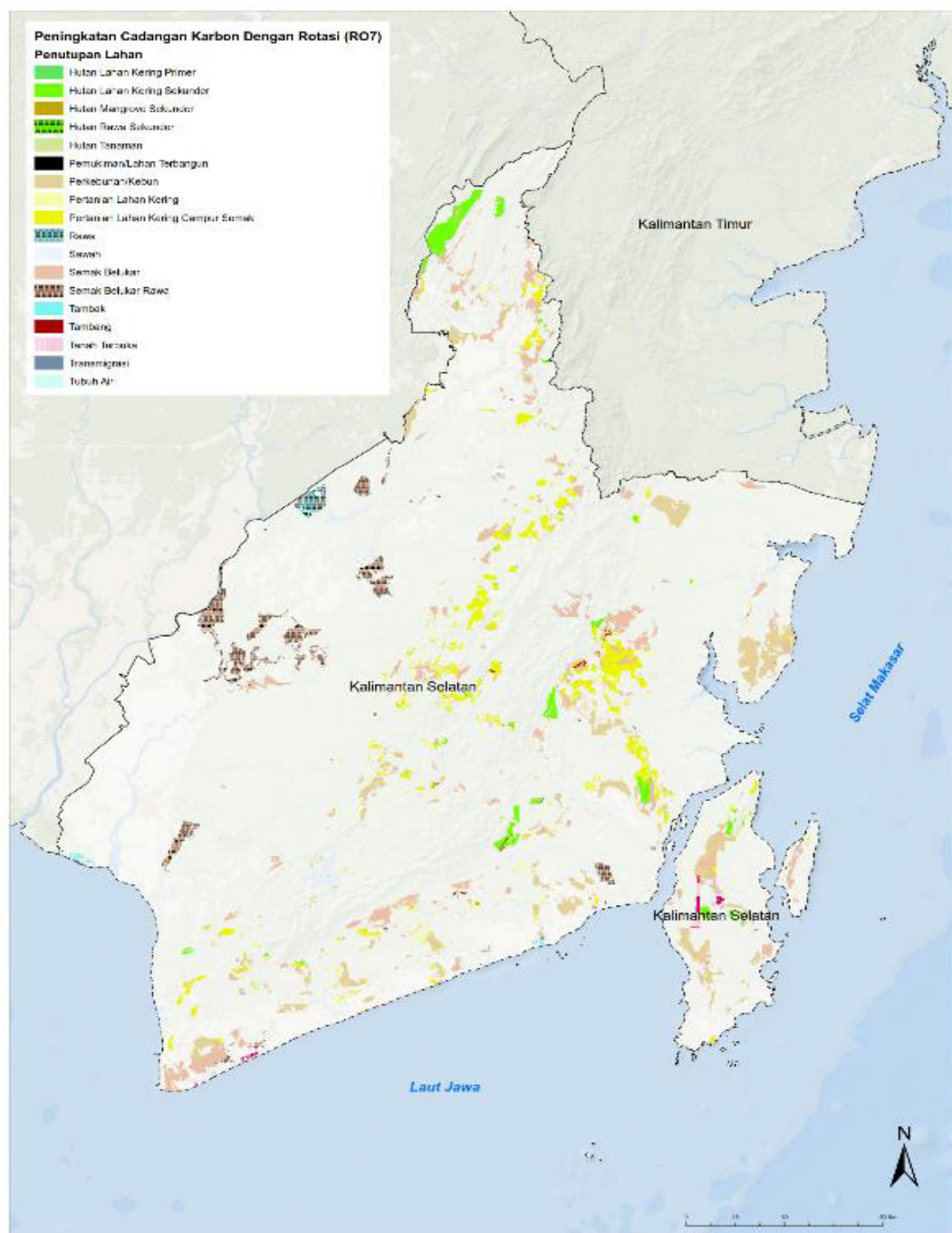


LAMPIRAN 5. | Peta Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (R05) di Provinsi Kalimantan Selatan

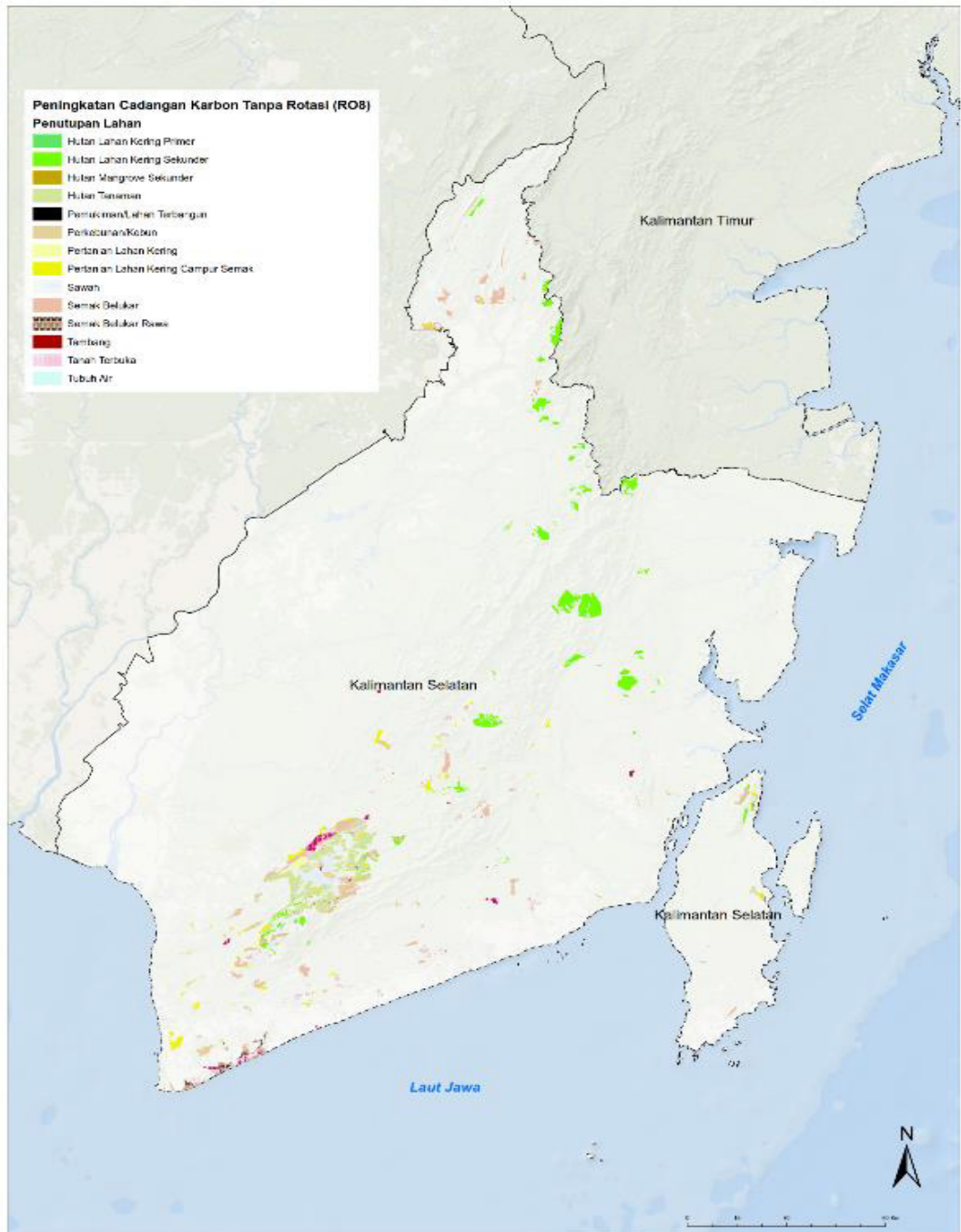


LAMPIRAN 6. | Peta Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C (R06) di Provinsi Kalimantan Selatan

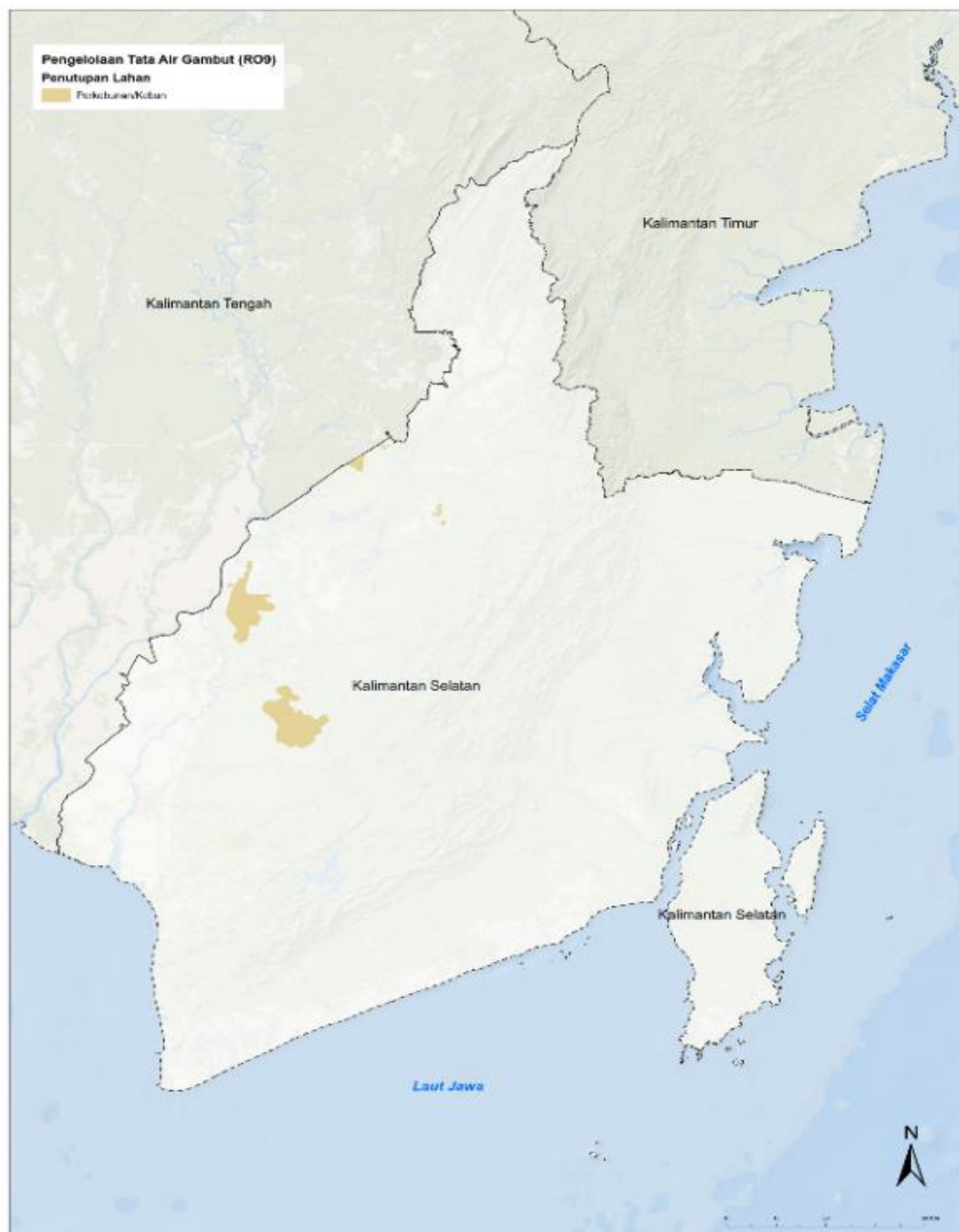
LAMPIRAN 7. | Peta Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (R07) di Provinsi Kalimantan Selatan



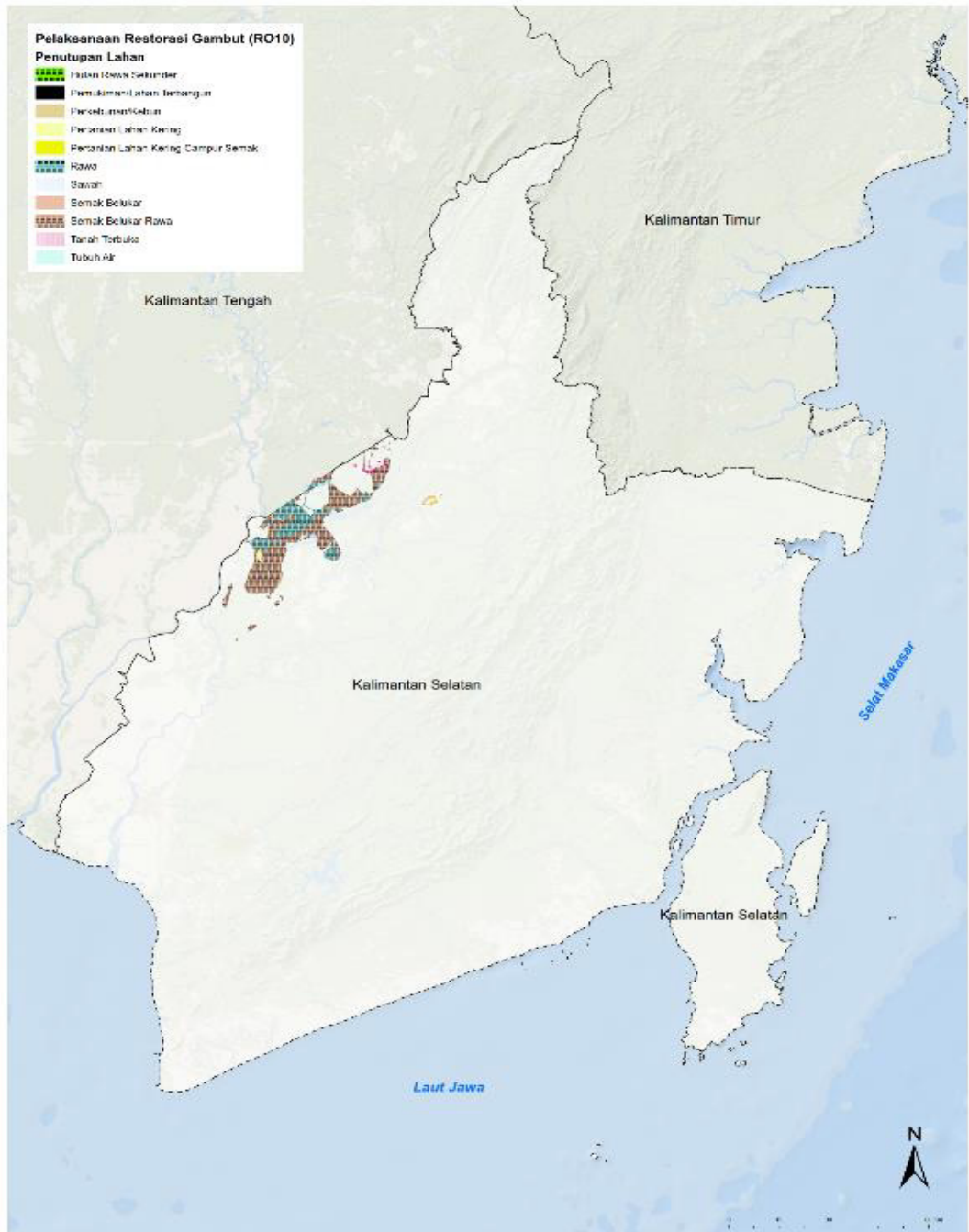
LAMPIRAN 8. | Peta Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Non-Rotasi (R08) di Provinsi Kalimantan Selatan



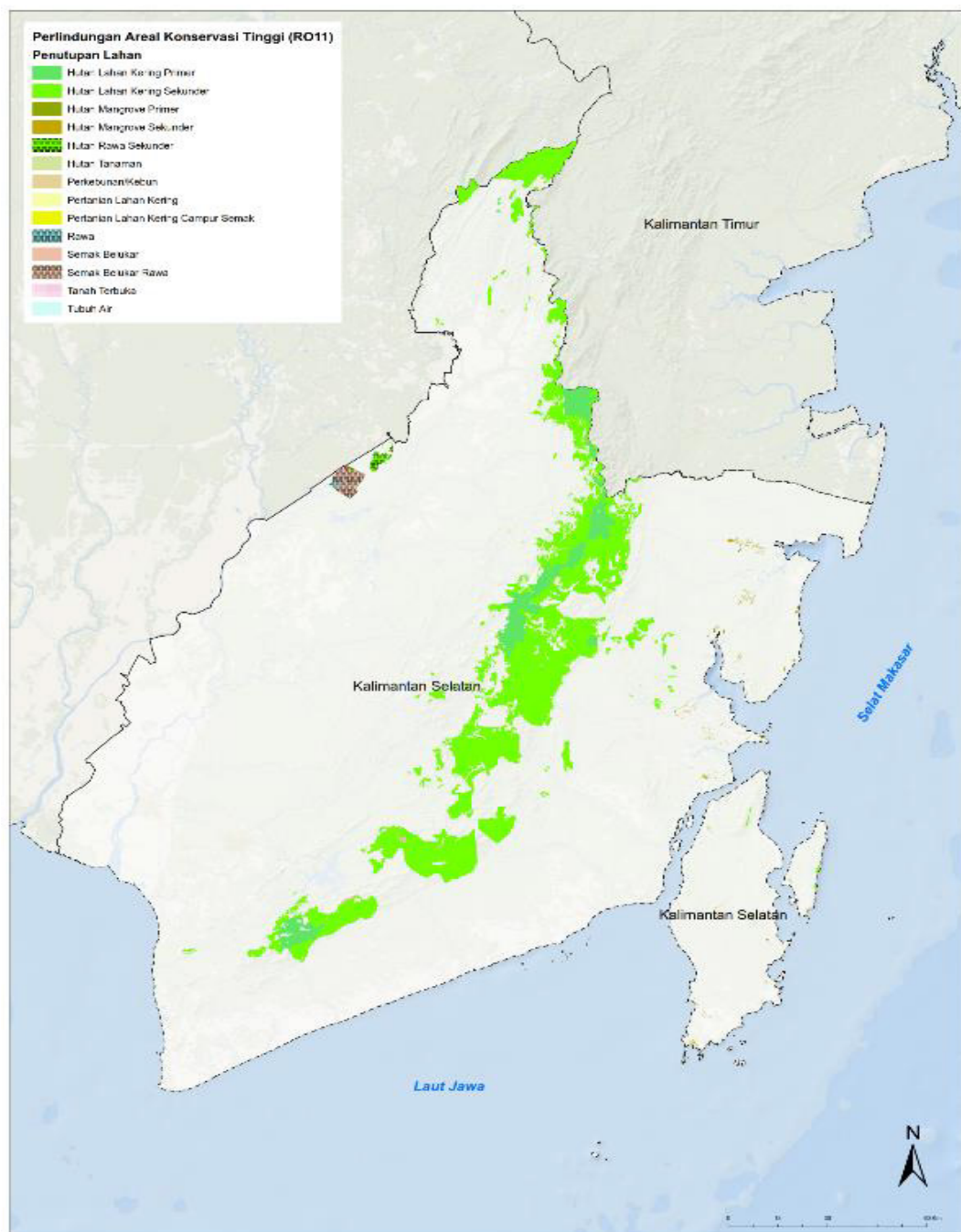
LAMPIRAN 9. | Peta Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut (R09) di Provinsi Kalimantan Selatan



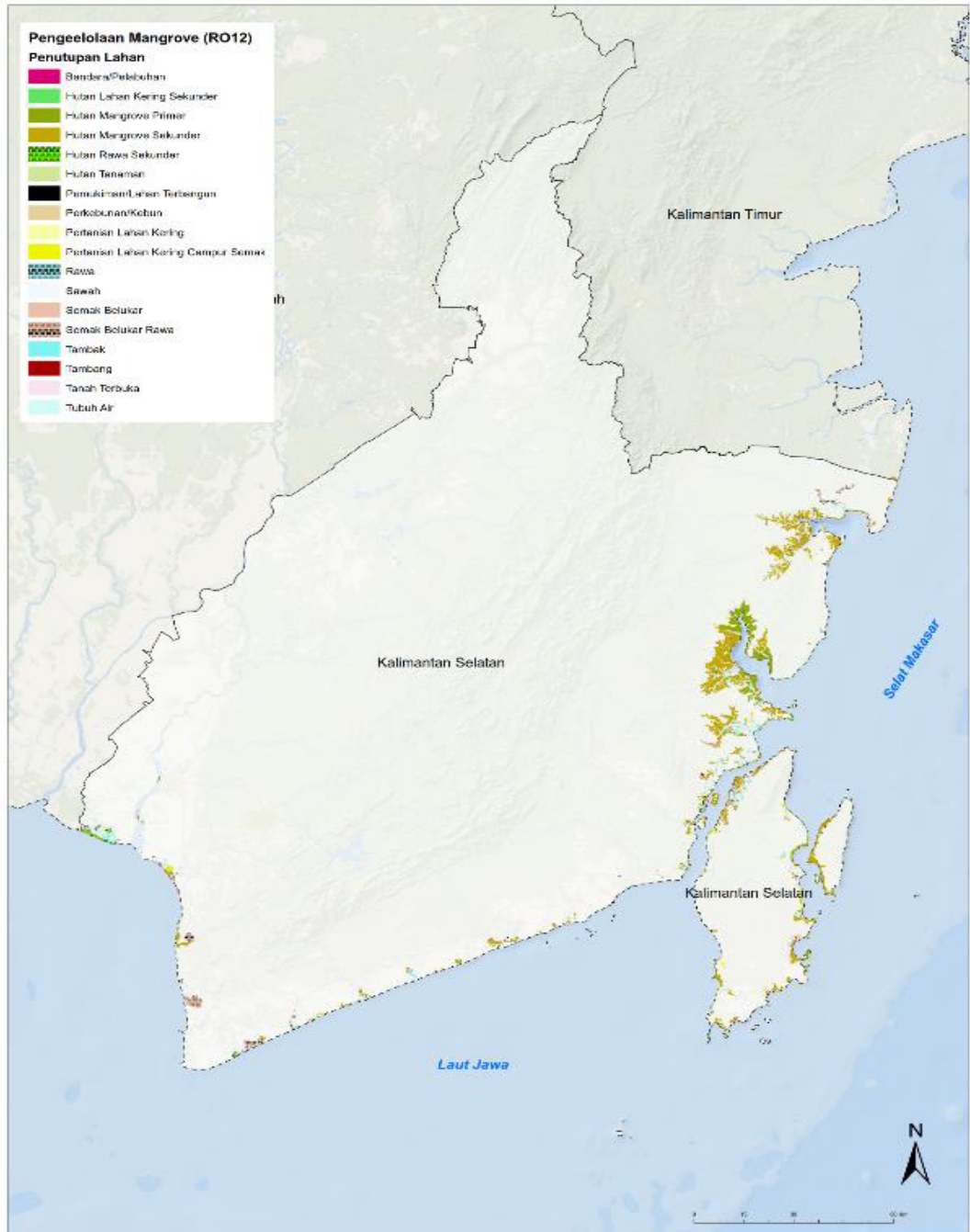
LAMPIRAN 10. | Peta Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut (R010) di Provinsi Kalimantan Selatan



LAMPIRAN 11. | Peta Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) di Provinsi Kalimantan Selatan



LAMPIRAN 12. | Peta Aksi Mitigasi Pengelolaan Gambut (R012) di Provinsi Kalimantan Selatan



LAMPIRAN 13. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait R01 Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	Pemahaman terkait pencegahan deforestasi lahan mineral dan sistem informasi kelola karbon	2023-2030, minimal setiap wilayah kecamatan mendapat sosialisasi pelatihan, pendampingan ttg pencegahan deforestasi tanah mineral. Simpanan dan serapan karbon tanah mineral minimal dipertahankan	Laporan	"DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT"
2	"Law Enforcement"	Kebakaran dan ilegal logging turun	"2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu, penebangan hutan primer tanah mineral"	Laporan	"DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BP DAS, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH,"
3	"Penerapan mekanisme insentive disinsentive"	Implementasi insentive REDD+	"Minimal terdapat 1 kawasan yang bisa mendapatkan insentive REDD+"	Laporan	"DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BP DAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,"
4	"Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu"	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	"DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPS KL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,"
5	"Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK"	Terbentuknya multi usaha kehutanan dr jasling dan HHBK	"Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasa atau HHBK dlm setiap wilayah kelola"	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes

6	"Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah"	"Keterlibatan masyarakat, Pemda dalam pencegahan deforestasi tanah mineral. Adopsi sistem silvikultur masyarakat"	"Kegiatan selalu melibatkan masyarakat lokal. Minimal terdapat 1 pengetahuan lokal yg digunakan seperti agroforestry. Pemda membuat plot aforestasi tanah mineral"	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti masyarakat adat, karang taruna, KTH dan MPA	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 lembaga lokal ikut aktif dlm kegiatan pencegahan deforestasi tanah mineral	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
8	Kegiatan penanaman pemeliharaan dan pengayaan	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 215.742 ha atau 26.968 ha/tahun	Laporan perubahan tutupan lahan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln	Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, PT, PemDes, BAPPEDA, BPHP, KPH, BPKH, BPDAS, BPSKL,
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pencegahan deforestasi	Berkurangnya deforestasi	setiap wilayah kelola membuat fakta integritas pencegahan deforestasi tanah mineral	Nota Kesepahaman	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 14. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait R02 Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	pemahaman terkait pencegahan deforestasi lahan gambut dan sistem informasi kelola karbon	2023-2030, minimal setiap wilayah kecamatan mendapat sosialisasi pelatihan, pendampingan ttg pencegahan deforestasi lahan gambut. Simpanan dan serapan karbon tanah gambut minimal dipertahankan	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging turun	2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu, pnebangan htn primer lahan gambut	Laporan	"DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH,"
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+	Minimal terdapat 1 kawasan yang bisa mendapatkan insentive REDD+	Laporan	"DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,"
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	"DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,"
5	Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK	Terbentuknya multi usaha kehutanan dr jasling dan HHBK	Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasa atau HHBK dlm setiap wilayah kelola	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes

6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	"Keterlibatan masyarakat, Pemda dalam pencegahan deforestasi lahan gambut Adopsi sistem silvikultur masyarakat"	"Kegiatan selalu melibatkan masyarakat lokal. Minimal terdapat 1 pengetahuan lokal yg dipakai ex.agroforestry polydikultur Pemda membuat plot aforestasi tanah mineral"	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
7	"Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti masyarakat peduli gambut (MPG) masyarakat adat, karang taruna, KTH dan MPA"	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 lembaga lokal ikut aktif dlm kegiatan pencegahan deforestasi lahan gambut	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
8	Kegiatan penanaman pemeliharaan dan pengayaan	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 215.742 ha atau 26.968 ha/tahun	Laporan perubahan tutupan lahan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,
9	Pengamanan kawasan	Kawasan gambut secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln	Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, PT, PemDes, BAPPEDA, BPHP, KPH, BPKH, BPDAS, BPSKL,
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pencegahan deforestasi	Berkurangnya deforestasi	Monsetiap wilayah kelola membuat fakta integritas pencegahan deforestasi lahan gambut	Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 15. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada R03
Pencegahan Deforestasi Konsesi

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	"memiliki pemahaman terkait PHL dan sistem informasi kelola karbon"	"2023-2025, minimal 2 orang dr tiap konsesi memiliki sertifikat PHL dan sistem informasi pengelolaan karbon"	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging turun	2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu, penebangan hutan primer	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+	Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,
5	Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK	"Terbentuknya multi usaha kehutanan dr jasling dan HHBK"	Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasa atau HHBK dlm setiap konsesi	Laporan	"DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes"
6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	"kelembagaan terkait PHL dilevel pemda & masyarakat terbentuk"	2024, 1 lembaga PHL dimasyarakat dan pemda	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti MA, karang taruna dan MPA	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 lembaga lokal ikut aktif dlm pembangunan hutan tanaman	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
8	Pemeliharaan dan Pengayaan	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 215.742 ha atau 26.968 ha/tahun pada HP dan HPT	Laporan perubahan tutupan lahan, PUP	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,

9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan	Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, PT, PemDes, BAPPEDA, BPHP, KPH, BPKH, BPDAS, BPSKL,
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pencegahan deforestasi	Berkurangnya deforestasi	setiap konsesi menandatangani fakta integritas pencegahan deforestasi	Nota Kesepahaman Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 16. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada R04
Pembangunan Hutan Tanaman

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait PHL dan sistem informasi kelola karbon	2023-2025, minimal 2 org/konsesi bersertifikat PHL sistem informasi tata kelola karbon	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+	Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPDAS
5	Pengembangan Hutan Tanaman Energi	Penambahan luasan hutan untuk pengembangan kayu energi	Rata-rata penambahan luasan hutan kayu energi = 3000 ha/thn pada areal konsesi	Laporan	"DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes"
6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan terkait PHL di level pemda & masyarakat terbentuk	2024, 1 lembaga PHL di masyarakat dan pemda	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Masyarakat Adat, Kelompok Tani Hutan, karang taruna dan MPA	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 kelembagaan lokal ikut aktif dlm pembangunan hutan tanaman	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes

8	Penanaman, pemeliharaan dan Pengayaan	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 215.742 ha atau 10.353 ha/th pada HP/HPT. Bibit unggul digunakan di hutan tanaman	Laporan perubahan tutupan lahan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan	Laporan	DISHUT, BPHP, kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pembangunan HT	Meluasnya areal penanaman hutan tanaman	setiap konsesi menandatangani fakta integritas pembangunan HT	"Nota Kesepahaman Laporan"	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 17. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada R05

Pengayaan Hutan Tanaman

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait PHL, sistem RIL dan SILIN, serta sistem informasi kelola karbon	2023-2025, minimal 2 orang/konsesi besertifikat PHL, memahami sistem RIL dan SILIN serta sistem informasi pengelolaan karbon	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging menurun,	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+ dan penerapan SILIN, TPTI, TJTI	Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan bagi konsesi pelaksana	Laporan	DISHUT, BPSKL, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPDAS
5	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan PHL level pemda/ masyarakat Sistem pengayaan local specific	Minimal terbentuk 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda. adopsi sistem lokal (agroforestry)	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
6	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Kelompok Tani hutan, Karang Taruna dan MPA	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 kelembagaan setempat ikut aktif dalam pengayaan tanaman	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
7	Pengayaan Tanaman	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 97.412 ha atau 12.177 ha/tahun pd hutan tanaman	Laporan perubahan tutupan lahan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,

8	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln. Secara periodik memelihara tata batas kawasan	Laporan	DISHUT, BPHP, kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
9	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pengayaan HT	Meningkatnya kegiatan pengayaan	setiap konsesi menandatangani fakta integritas ttg pengayaan	Nota Kesepahaman, Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 18. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada R06 Penerapan RIL-C

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait PHL, sistem RIL dan SILIN, serta sistem informasi kelola karbon	2023-2025, minimal 2 orang/konsesi besertifikat PHL, memahami sistem RIL dan SILIN serta sistem informasi pengelolaan karbon	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging menurun,	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+ dengan penerapan RIL-C	Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan bagi konsesi pelaksana	Laporan	DISHUT, BPSKL, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPDAS
5	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan PHL level pemda/ masyarakat	Minimal terbentuk 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda.	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
6	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Kelompok Tani hutan, Karang Taruna dan MPA	Keikutsertaan aktif lembaga masyarakat	Minimal 1 kelembagaan setempat ikut aktif dalam pengayaan tanaman	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
7	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln. Secara periodik memelihara tata batas kawasan	Laporan	DISHUT, BPHP. kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

8	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan pengayaan HT	Meningkatnya penerapan kegiatan RIL- C	setiap konsesi menandatangani fakta integritas ttg pengayaan	Nota Kesepahaman, Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes
---	---	--	--	---------------------------	---

LAMPIRAN 19. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait Pada Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi (R07)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait PHL, sistem informasi kelola karbon, cadangan karbon dgn rotasi	2023-2025, minimal 2 orang/konsesi besertifikat PHL, memahami peningkatan karbon dgn rotasi, sistem informasi pengelolaan karbon	Laporan	DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT
2	Law Enforcement atau mekanisme insentive disinsentive	Kebakaran dan ilegal logging menurun,	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu. Penghargaan bagi konsesi pelaksana	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+ dengan penerapan RIL-C, SILIN	"Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan bagi konsesi pelaksana"	Laporan	DISHUT, BPSKL, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	"DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPSKL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPDAS"
5	Pengembangan Hutan Tanaman Energi	"Penambahan luasan hutan untuk pengembangan kayu energi"	Rata-rata penambahan luasan hutan kayu energi= 3000 ha/ thn pada areal konsesi	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan terkait PHL di level pemda & masyarakat terbentuk Peningkatan Perhutsos	2024, 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda. Minimal 1 Kebun Benih Rakyat / kecamatan Target Perhutsos 20	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes

7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti KTH, Karang Taruna dan MPA	kelembagaan PHL level pemda/ masyarakat Sistem pengayaan local specific	Minimal terbentuk 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda. Adopsi sistem lokal (agroforestry)	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
8	Penanaman, Pengayaan Tanaman	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 97.412 ha atau 12.177 ha/tahun pd hutan tanaman	Laporan perubahan tutupan lahan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	Patroli rutin minimal 2x/bln. Secara periodik memelihara tata batas kawasan	Laporan	DISHUT, BPHP, kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan peningkatan cadangan karbon dgn rotasi	Peningkatan cadangan karbon system rotasi	setiap konsesi menandatangani fakta integritas ttg penngkatan cadangan karbon	Nota Kesepahaman, Laporan	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 20. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pada Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi (R08)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	"Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM"	memiliki pemahaman terkait PHL, sistem informasi kelola karbon, cadangan karbon dgn rotasi	2023-2025, minimal 2 orang/konsesi besertifikat PHL, memahami peningkatan karbon dgn rotasi, sistem informasi pengelolaan karbon	Laporan	"DISHUT, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT"
2	Law Enforcement	Kebakaran dan ilegal logging menurun,	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu. Penghargaan bagi konsesi pelaksana	Laporan	DISHUT, BPSKL, Kepolisian, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS,
3	Penerapan mekanisme insentive disinsentive	Implementasi insentive REDD+ dan jasling lainnya	"Minimal terdapat 1 konsesi yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan bagi konsesi pelaksana"	Laporan	DISHUT, BPSKL, BPDAS, BAPPEDA, PT, DLH, KPH, BPHP, BPKH,
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	Kebakaran dan ilegal logging menurun	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, BPBD, Kepolisian, BPS KL BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP,BPDAS
5	Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK	Terbentuknya multi usaha kehutanan dr jasling dan HHBK	Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasa atau HHBK dlm setiap konsesi	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes
6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan terkait PHL di level pemda & masyarakat terbentuk Peningkatan Perhutsos	2024, 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda. Target 20 Perhutsos untuk Jasling dan HHBK	Laporan	DISHUT, BPSKL, BAPPEDA, DLH, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, PT, PEMDA, PemDes

7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti KTH, Karang Taruna dan MPA	kelembagaan PHL level pemda/ masyarakat	Minimal terbentuk 1 lembaga PHL di masyarakat/ pemda.	Laporan	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, BPKH, BPDAS, BPSKL, PT, PemDes
8	Penanaman, Pengayaan Tanaman	Peningkatan cadangan karbon	2023-2030, Total 97.412 ha atau 12.177 ha/tahun pd hutan tanaman	"Laporan perubahan tutupan lahan"	DISHUT, DLH, BAPPEDA, KPH, BPHP, PT, BPKH, BPDAS, BPSKL,
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	"Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan"	Laporan	DISHUT, BPHP, kepolisian, DLH, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan peningkatan cadangan karbon nonrotasi	Peningkatan cadangan karbon system non rotasi	setiap konsesi menandatangani fakta integritas ttg peningkatan cadangan karbon	" Nota Kesepahaman, Laporan"	DISHUT, DLH, kepolisian, KPH, BAPPEDA, BPKH, PT, PemDes

LAMPIRAN 21. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak Terkait pengelolaan tata air gambut gambut (R09)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	"Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM"	memiliki pemahaman terkait pengelolaan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), sistem informasi pengelolaan karbon di ekosistem gambut	2023-2030, minimal 2 desa/KHG/thn mendapatkan sosialisasi pelatihan, pendampingan pengelolaan KHG. Simpanan dan serapan karbon KHG minimal dipertahankan	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
2	Law Enforcement	Kebakaran, illegal logging, subsidi gambut menurun,	2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
3	"Penerapan mekanisme insentive disinsentive"	"Implementasi insentive REDD+ dan jasleng lainnya Terbangunnya sekat kanal adaptif"	"Minimal terdapat 1 wilayah kelola yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan bagi wilayah pelaksana"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	"Kebakaran dan ilegal logging menurun, subsidi gambut menurun,"	"2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu"	Laporan	"DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan"
5	Pengembangan multi usaha Kehutanan (jasa lingkungan HHBK) bidang pertanian dan perikanan	Terbentuknya multi usaha kehutanan dr jasleng dan HHBK	"Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasa atau HHBK dlm setiap konsesi"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan

6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan terkait Desa Mandiri Peduli Gambut	Minimal terbentuk 1 kelembagaan Masyarakat Peduli Gambut (MPG)/KHG yang keanggotaannya dapat berasal dari beberapa desa sekitar KHG	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Masyarakat Peduli Gambut (MPG), Karang Taruna, MPA, KTH	kelembagaan level pmda/ masyarakat terkait Desa Mandiri Peduli Gambut dan Perhutanan Sosial	"Minimal terbentuk 1 Desa Mandiri Peduli Gambut/KHG Minimal terdapat 1 izin Perhutsos/KHG Minimal ada 1 lembaga masy. terlibat dlm tata kelola air gambut"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
8	Kegiatan Pembasahan Gambut	Peningkatan cadangan karbon, Kebakaran menurun	"Penerapan Mekanisme Tinggi Muka Air (TMA) 40/50 cm"	Laporan TMA	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	"Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan"	Laporan	"DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes"
10	"Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam meningkatkan cadangan karbon melalui perbaikan tata air gambut"	Peningkatan cadangan melalui kegiatan perbaikan tata air gambut	setiap wilayah kecamatan/ konsesi menandatangani fakta integritas ttg peningkatan cadangan karbon melalui perbaikan tata air	Nota Kesepahaman, Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

LAMPIRAN 22. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak terkait pelaksanaan restorasi gambut (R010)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	"memiliki pemahaman terkait pengelolaan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG), sistem informasi pengelolaan karbon di ekosistem gambut"	"2023-2030, minimal 2 desa/KHG/thn mendapatkan sosialisasi pelatihan, pendampingan pengelolaan KHG. Simpanan dan serapan karbon KHG minimal dipertahankan"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes dan Kecamatan
2	Law Enforcement	"Kebakaran, illegal logging, subsidi gambut menurun,"	2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
3	"Penerapan mekanisme insentive disinsentive"	"Implementasi insentive REDD+ dan jasleng lainnya Kegiatan revegetasi dan kegiatan restorasi gambut lainnya"	"Minimal terdapat 1 wilayah administrasi yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan/ insentive bagi wilayah pelaksana"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian kayu	"Kebakaran dan illegal logging menurun, subsidi gambut menurun."	2023-2030, Zero kebakaran dan pencurian kayu	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
5	"Pengembangan multi usaha Kehutanan (jasa lingkungan HHBK) bidang pertanian dan perikanan"	"Peningkatan ekonomi dan sosial melalui pembentukan multi usaha kehutanan dr jasleng dan HHBK, pertanian, perikanan"	"Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha jasleng, HHBK selain bidang pertanian dan perikanan ramah lingkungan"	Laporan	"DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes"

6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	kelembagaan terkait Desa Mandiri Peduli Gambut. Adopsi sistem silvikultur masyarakat seperti polydikultur dan agroforestry) dlm kegiatan restorasi	"Minimal terbentuk 1 kelembagaan Masyarakat Peduli Gambut (MPG) per KHG Minimal terdapat 1 pengetahuan lokal yg digunakan dalam kegiatan restorasi"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
7	Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Masyarakat Peduli Gambut (MPG), Karang Taruna, MPA, KTH	Kelembagaan level pemda atau masyarakat terkait Desa Mandiri Peduli Gambut dan Perhutanan Sosial	"Minimal terbentuk 1 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) tiap KHG. Minimal ada 1 lembaga masy. terlibat dlm tata kelola air gambut"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
8	Kegiatan Revegetasi dan bentuk restorasi lainnya	Peningkatan cadangan karbon,	Minimal di setiap KHG terdapat plot kegiatan revegetasi, sekat kanal dan sumur bor	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	"Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepah aman dalam mensukseskan peningkatan cadangan karbon non-rotasi	"Peningkatan cadangan melalui kegiatan restorasi ekosistem gambut"	setiap wilayah kecamatan/ konsesi menandatangani fakta integritas ttg peningkatan cadangan karbon melalui restorasi gambut	"Nota Kesepahaman, Laporan"	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

LAMPIRAN 23. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak terkait Perlindungan Area Konservasi Tinggi (R011)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait perlindungan area konservasi tinggi, sistem informasi karbon di area ekosistem tinggi	2023-2030, minimal 2 desa/ th mendapatkan sosialisasi pelatihan, pndampingan tentang perlindungan area konservasi tinggi. Cadangan karbon area konservasi tinggi minimal dipertahankan	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes dan Kecamatan
2	Law Enforcement	Keanekaragaman jenis flora dan fauna	"2023-2030, mempertahankan keanekaragaman jenis flora dan fauna Zero perburuan satwa dan flora"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
3	"Penerapan mekanisme insentive disinsentive"	Implementasi insentive REDD+ dan jasling lainnya Terjalannya hubungan antara pulau habitat satwa	"Minimal ada 1 wilayah kelola yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Minimal 1 kegiatan pemeliharaan koridor satwa area konservasi/thn. Penghargaan/ insentive bagi pelaksana"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
4	Pencegahan kebakaran dan pencurian flora dan satwa	"Kebakaran dan ilegal logging menurun, perburuan menurun"	2023-2030, Zero kebakaran, pencurian kayu, perburuan satwa menurun	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
5	Pengembangan multi usaha Kehutanan (jasling HHBK) pd kawasan konservasi	"Peningkatan ekonomi dan sosial melalui pembentukan multi usaha kehutanan dari jasling dan HHBK,"	Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasling, HHBK	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

6	"Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah"	Peran masyarakat dlm pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi.	"Minimal terbentuk 1 lembaga masyarakat peduli satwa dan tumbuhan dilidungi. Minimal terdapat 1 jenis satwa/ tumbuhan yg dijadikan spesies penting konservasi"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
7	"Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti Masyarakat Konservasi, MPG, Karang Taruna, MPA, KTH"	Kelembagaan Konservasi level pemda/ masyarakat terkait Desa Konservasi	Minimal terbentuk 1 Desa Konservasi disekitar kawasan konservasi. Minimal ada 1 lembaga masy. Terlibat dlm perlindungan areal konservasi tinggi	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
8	"Kegiatan Revegetasi dan bentuk restorasi lainnya"	Peningkatan cadangan karbon,	Minimal di setiap KHG terdapat plot kegiatan revegetasi, sekat kanal dan sumur bor	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	"Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan"	Laporan	"DISHUT, DLH, BPHP, Kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes"
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan perlindungan areal konservasi tinggi	"Peningkatan cadangan melalui kegiatan perlindungan areal konservasi tinggi"	setiap wilayah konservasi/ konsesi membuat fakta integritas tentang peningkatan cadangan kawasan konservasi	"Nota Kesepahaman, Laporan"	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, Kecamatan

LAMPIRAN 24. | Kegiatan, Output, Target dan Para pihak dalam pengelolaan mangrove (R012)

No	Kegiatan	Output	Target (tahun/luas / jumlah)	Indikator Kinerja	Stakeholder terkait
1	Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SDM	memiliki pemahaman terkait pengelolaan mangrove, sistem informasi pengelolaan karbon di ekosistem mangrove	2023-2030, minimal 1 desa/ thn pada areal yang memiliki mangrove mendapatkan sosialisasi pelatihan, pdndampingan pengelolaan mangrove. Simpanan dan serapan karbon mangrove minimal dipertahankan	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes dan Kecamatan
2	Law Enforcement	illegal logging, pembukaan mangrove	2023-2030, Zero pencurian kayu, zero pembukaan mangrove	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes, kecamatan
3	"Penerapan mekanisme insentive disinsentive"	"Implementasi insentive REDD+ dan jasling lainnya Kegiatan restorasi gambut lainnya"	"Minimal terdapat 1 wilayah kelola mangrove yang bisa mendapatkan insentive REDD+ Penghargaan/ insentive bagi wilayah pelaksana"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
4	"Pencegahan pencurian kayu dan pembukaan mangrove"	"illegal logging dan pembukaan mangrove menurun"	"2023-2030, Zero pencurian kayu dan pembukaan mangrove"	Laporan	"DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes"
5	Pengembangan multi usaha Kehutanan (jasa lingkungan HHBK)	Peningkatan ekonomi dan sosial melalui pembentukan multi usaha kehutanan dr jasling dan HHBK,	Minimal terdapat 1 tambahan bidang usaha bidang jasling, HHBK	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP, kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

6	Optimalisasi peran masyarakat lokal dan pemerintah daerah	"Keterlibatan masyarakat dan Pemda dalam pengelolaan mangrove Adopsi sistem silvikultur masyarakat seperti sylvofishery dlm kegiatan restorasi"	"Kegiatan restorasi mangrove selalu melibatkan masyarakat lokal. Minimal terdapat 1 pengetahuan lokal yg digunakan dalam kegiatan restorasi"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
7	"Optimalisasi peran lembaga masyarakat seperti, Karang Taruna, KTH, Kelompok Nelayan"	kelembagaan pengelolaan mangrove level pemda/ masyarakat terkait	"Minimal terbentuk 1 kelembagaan tiap wilayah kelola mangrove. Minimal ada 1 lembaga masy. terlibat dlm tata kelola air gambut"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
8	Kegiatan Revegetasi dan bentuk restorasi lainnya	Peningkatan cadangan karbon,	Minimal di setiap wilayah kelola mangrove terdapat 1 plot kegiatan revegetasi atau restorasi lainnya	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
9	Pengamanan kawasan	Kawasan hutan secara de facto dan de jure tidak berkurang	"Patroli rutin minimal 2x/bln Secara periodik memelihara tata batas kawasan"	Laporan	DISHUT, DLH, BPHP. kepolisian, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes
10	Membangun Fakta Integritas/ Kesepahaman dalam mensukseskan peningkatan cadangan karbon	Peningkatan cadangan melalui kegiatan restorasi ekosistem mangrove	setiap wilayah kecamatan/ konsesi menandatangani fakta integritas ttg peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan mangrove	"Nota Kesepahaman, Laporan"	DISHUT, DLH, BPHP, BAPPEDA, KPH, BPKH, PT, BPDAS, BPSKL, PemDes

INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia